



Katalog BPS : 9602001.34

Statistik Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2011

Statistik Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2011

DATA MENCERDASKAN BANGSA



Panorama Merapi
dari Gunung Kidul, September 09



BADAN PUSAT STATISTIK
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul
Telp. (0274) 4342234 (Hunting) ; Fax. (0274) 4342230
E-mail : bps3400@mailhost.bps.go.id Homepage: <http://yogyakarta.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**STATISTIK DAERAH
PROVINSI D.I.YOGYAKARTA
2011**

<http://yogyakarta.bps.go.id>

STATISTIK DAERAH PROVINSI D.I.YOGYAKARTA 2011

ISBN : 978 979 472 977 9
No. Publikasi : 34533.11.11
Katalog BPS : 1101002.34
Ukuran Buku : 17,6 cm X 25 cm
Jumlah Halaman : 88

Naskah:

Bidang Statistik Produksi

Bidang Statistik Distribusi

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar kulit:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dicetak oleh:

CV Sinar Baru Offset

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya



Kata Pengantar



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas diterbitkannya buku **Statistik Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2011** oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Publikasi ini memuat berbagai informasi terpilih seputar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan pembangunan serta potensi yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Buku Statistik Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2011 diterbitkan untuk melengkapi publikasi-publikasi statistik yang sudah terbit secara rutin setiap tahun. Berbeda dengan publikasi-publikasi yang sudah ada, publikasi ini lebih menekankan pada analisis.

Materi yang disajikan dalam buku Statistik Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2011 adalah berbagai informasi/indikator terpilih yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Diharapkan informasi tersebut dapat menjadi rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

Kritik dan saran konstruktif berbagai pihak kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan data statistik, baik oleh instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi, maupun masyarakat luas.

Yogyakarta, Desember 2011
Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala

Dyan Pramono Effendi, SE. ME.



DAFTAR ISI

1. Geografi dan Iklim	1	11. Industri Pengolahan	44
2. Pemerintahan	3	12. Konstruksi	48
3. Penduduk	9	13. Hotel dan Pariwisata	50
4. Ketenagakerjaan	13	14. Perbankan dan Investasi	53
5. Pendidikan	18	15. Harga-harga	57
6. Kesehatan	23	16. Pengeluaran Penduduk	61
7. Pembangunan Manusia	27	17. Perdagangan	63
8. Kemiskinan	31	18. PDRB	65
9. Pertanian	33	19. Perbandingan Regional	67
10. Pertambangan dan Energi	40	Lampiran	69

Geografi

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terletak pada posisi astronomi antara 7°33'-8°12' Lintang Selatan dan 110°00'-110°50' Bujur Timur. Dengan demikian, DIY merupakan provinsi dengan luas wilayah administrasi terkecil kedua di Republik Indonesia, setelah Provinsi DKI Jakarta. Luas wilayah Provinsi DIY hanya 3.185,80 km², atau 0,17 persen dari seluruh wilayah daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara geografis, Provinsi DIY berada di bagian tengah, tepatnya sisi selatan Pulau Jawa. Wilayah daratan Provinsi DIY dikelilingi oleh wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah, yakni Kabupaten Purworejo di sisi barat, Kabupaten Magelang di sisi utara; serta Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri di sisi timur laut dan tenggara. Sedangkan wilayah selatan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia.

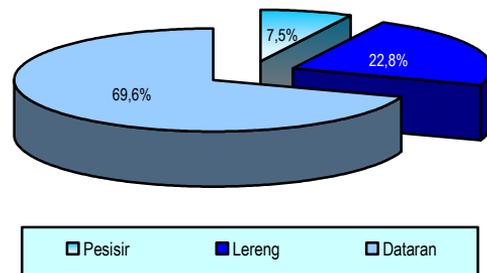
Berdasarkan satuan fisiografis, DIY terdiri atas Pegunungan Selatan (ketinggian 150-700 m), Gunung Merapi (ketinggian 80-2.911 m), dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulonprogo (ketinggian 0-80 m), serta Pegunungan Kulonprogo dan dataran rendah selatan (ketinggian 0-572 m). Posisi tersebut membuat wilayah DIY memiliki wilayah pesisir sebanyak 33 desa. Selain pesisir, topografi wilayah DIY sebagian besar berupa dataran (69,6% dari seluruh desa di DIY). Sisanya sebanyak 100 desa terletak di lereng bukit dan tidak ada satupun desa yang terletak di daerah aliran sungai (DAS).

Gambar 1.1. Peta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber: Bakosurtanal, elantowow.wordpress.com

Grafik 1.1. Distribusi Desa menurut Topografi Wilayah di DIY



Tahukah Anda?

DIY merupakan provinsi dengan luas wilayah administrasi terkecil kedua di Republik Indonesia, setelah Provinsi DKI Jakarta.



Erupsi Merapi berdampak pada terganggunya kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar Merapi karena desanya luluh lantak akibat terkena awan panas, abu vulkanik dan aliran lava.

Tabel 1.1. Indikator Geografis DIY 2010

Jenis Indikator	Satuan	Rincian
Ibukota	-	Yogyakarta
Luas daratan	km ²	3 185,80
Iklim		
Suhu tertinggi	° C	35,2
Kelembaban maks	%	97,0
Tekanan maks	Mp	1 014,6
Kec angin tertinggi	knot	47
Arah angin maks	derajat	240
Curah hujan maks	Mm	512,3
Hari hujan tertinggi	Kali	25

Sumber: Dinas Perhubungan DIY

Gambar 1.2. Erupsi Gn. Merapi 26 Oktober 2010



Sumber: <http://www.slemankab.go.id/www.tempointeraktif.com/anis-ay.blogspot.com>

Tahukah Anda?

Posisi geografis Merapi 7° 32' 5" S; longitude 110° 26' 5" E. mencakup wilayah administratif Propinsi Jawa Tengah dan DIY. Merapi terbentuk secara geodinamik pada busur kepulauan akibat subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Asia.



Iklim

Pada tahun 2010, curah hujan tertinggi tercatat 512,3 mm dengan hari hujan per bulan terbanyak 25 kali; jauh lebih tinggi dibanding tahun 2009 yang mencatat curah hujan tertinggi 316,5 mm dengan hari hujan terbanyak 24 kali per hari. Kecepatan angin maksimum mencapai 47 knot, lebih cepat dibanding kecepatan angin pada tahun 2009 yang sebesar 43 knot.

Mulai tanggal 26 Oktober 2010 dan hari-hari berikutnya, Gunung Merapi mengalami erupsi sangat hebat yang telah menyebabkan kerugian harta kekayaan masyarakat setempat, termasuk ternak dan lahan pertaniannya, akibat awan panas yang meluluh-lantakkan semua yang dilaluinya. Bahkan, berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, erupsi Gunung Merapi telah menelan korban jiwa sebanyak 277 orang.

Merapi adalah gunung api tipe Strato-volcano dan secara petrologi magma Merapi bersifat andesit-basaltik. Posisi geografis Merapi 7°32'5"S; longitude 110°26'5"E; mencakup wilayah administratif Propinsi Jawa Tengah dan DIY. Merapi terbentuk secara geodinamik pada busur kepulauan akibat subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Asia.

Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan Australia, dengan wilayah geografis kepulauan sangat rentan terhadap berbagai bencana alam. Penelitian berkesinambungan diperlukan dalam mendeteksi setiap kejadian bencana untuk mengurangi banyaknya korban materi maupun non materi. Antisipasi terhadap bencana alam seperti itu diharapkan dapat memberi rasa aman kepada masyarakat.

Dasar filosofi pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah *Hamemayu Hayuning Bawana*.

Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara legal formal berdasarkan UU No.3 Tahun 1950, mengatur wilayah dan ibu kota, jumlah anggota DPRD serta berbagai kewenangan. Kemudian direvisi dengan UU No. 19 Tahun 1950 yang berisi penambahan wewenang. Status DIY menjadi Provinsi di Indonesia baru pada tahun 1965. Dasar filosofi pembangunan DIY adalah *Hamemayu Hayuning Bawana*, sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai ke-hidupan masyarakat Yogyakarta berda-sarkan nilai budaya daerah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan.

Secara administratif, Provinsi DIY terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota. Keempat kabupaten tersebut adalah Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul, dan Sleman; sedangkan satu kota sebagai pusat pemerintahan, yakni Kota Yogyakarta. Berbeda dengan provinsi lain yang banyak mengalami pemekaran wilayah sejak otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2001, jumlah kabupaten/kota di DIY tidak mengalami perubahan. Demikian pula dengan jumlah kecamatan dan jumlah desa/kelurahan, selama beberapa tahun terakhir juga tidak mengalami perubahan.

Wilayah terluas di DIY adalah Kabupaten Gunungkidul, yakni menguasai 46,62 persen (1.485,36 km²). Sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Yogyakarta dengan luas 32,5 km² (0,01 persen wilayah Provinsi DIY). Namun, luas wilayah yang sempit, tidak menyurutkan langkah Kota Yogyakarta untuk terus membangun.

Gambar 2.1.
Logo Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber: Den Mazze, Wikipedia

Tabel 2.1. Statistik Pemerintahan Provinsi DIY

Jumlah Wilayah Administrasi	2008	2009	2010
Kabupaten	4	4	4
Kota	1	1	1
Kecamatan	78	78	78
Desa/Kelurahan	438	438	438
Desa	393	393	393
Kelurahan	45	45	45
Perkotaan	169	169	169
Pedesaan	269	269	269

Sumber: Daerah Istimewa Dalam Angka 2009-2011

Tahukah Anda?

Wilayah terluas di DIY adalah Kabupaten Gunungkidul, yakni menguasai 46,62 persen (1.485,36 km²).





Tabel 2.2. Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY, 2010

Kab/Kota	Kec.	Kel/Desa		
		Kota	Desa	Jml
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	12	13	75	88
Bantul	17	47	28	75
Gunungkidul	18	5	139	144
Sleman	17	59	27	86
Yogyakarta	14	45	0	45
Prov. DIY	78	169	269	438

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. DIY

Gambar 2.2. Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Provinsi DIY



Sumber: bpkp.go.id

Tahukah Anda?

Wilayah Provinsi DIY terdiri dari 78 kecamatan dan 438 kelurahan/desa.



Pemerintah Daerah adalah Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pimpinan Daerah bertanggung jawab sebagai eksekutif dan DPRD bertanggung jawab sebagai legislatif. Provinsi DIY dipimpin oleh seorang Gubernur.

Dalam melaksanakan tugasnya, Gubernur dibantu oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Lembaga Teknis Daerah seperti Dinas-dinas, Badan-badan dan Kantor-kantor. Sekretaris Daerah membawahi tiga asisten, yaitu:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
 - a. Biro Tata Pemerintahan
 - b. Biro Hukum
 - c. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan:
 - a. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA
 - b. Biro Administrasi Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum:
 - a. Biro Organisasi
 - b. Biro Umum Humas dan Protokol

Pembagian wilayah Provinsi DIY sebagai berikut:

1. Kabupaten Kulonprogo terdiri dari 12 kecamatan dan 88 kelurahan/desa.
2. Kabupaten Bantul terdiri 17 kecamatan dan 75 kelurahan/desa.
3. Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 kecamatan dan 144 kelurahan/desa.
4. Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan dan 86 kelurahan/desa.
5. Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan/desa.

Komposisi DPRD DIY didominasi oleh Partai-partai PDI-P, Partai Demokrat, dan PAN.

2

Komposisi DPRD Provinsi periode 2009-2014 didominasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) masing-masing 11 orang, 10 orang, dan 8 orang. Dari jumlah anggota dewan sebanyak 55 orang, ketiga partai tersebut telah menguasai 52,73 persen suara.

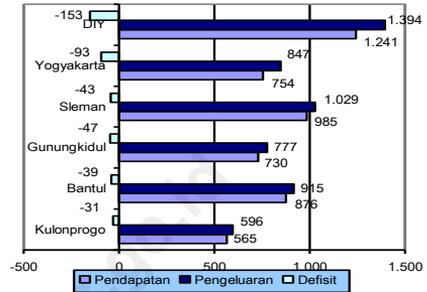
Pegawai Negeri Sipil

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di DIY berkurang 457 orang dibanding tahun 2009 yang sejumlah 93.864 orang. Penerapan kebijakan penerimaan pegawai yang bersifat *zero growth*, hanya mengganti pegawai pensiun membuat terjadinya penurunan jumlah PNS. Dengan jumlah penduduk sekitar 3,46 juta jiwa, maka setiap orang PNS bertanggungjawab melayani sekitar 37 orang penduduk.

Komposisi PNS menurut jenis kelamin masih didominasi laki-laki (55,54%). Kendati demikian, dengan perkembangan jumlah PNS perempuan (bertambah 254 orang), berarti sikap kesetaraan jender semakin dijunjung tinggi di DIY.

Komposisi PNS menurut wilayah tugasnya terbanyak di Kabupaten Sleman (27,01%), diikuti Kota Yogyakarta sebanyak 19,90 persen. Dengan wilayah yang relatif lebih luas, penduduk yang beragam, dan kegiatan sosial ekonomi yang sangat kompleks, Sleman harus memberikan pelayanan publik yang lebih baik, sehingga diperlukan PNS lebih banyak pula.

Grafik 2.2. Komposisi Anggota DPRD Provinsi DIY, 2010



Sumber: BKN Provinsi DIY

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin di DIY, 2010

Kab/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulonprogo	5 617	5 077	10 694
Bantul	7 778	7 633	15 411
Gunungkidul	8 306	5 675	13 981
Sleman	13 918	11 312	25 230
Yogyakarta	10 321	8 264	18 585
D I Yogyakarta	5 935	3 571	9 506
Jumlah	51 875	41 532	93 407

Sumber: BKN Provinsi DIY

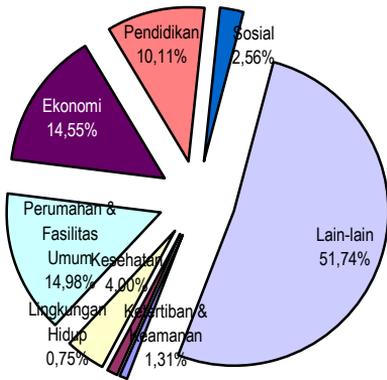
Tahukah Anda?

Rata-rata seorang PNS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melayani sekitar 37 orang penduduk.



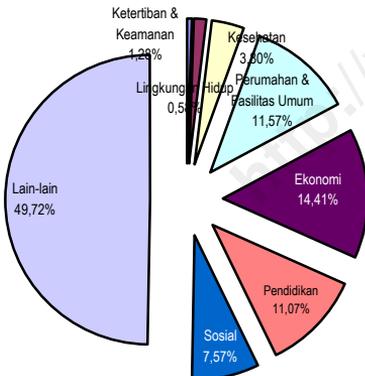
Pada tahun 2010 terdapat surplus sebesar 19,6 miliar rupiah.

Grafik 2.3. Distribusi Persentase APBD DIY Berdasar Fungsinya, 2009



Sumber: Pemerintah Provinsi DIY

Grafik 2.4. Distribusi Persentase APBD DIY Berdasar Fungsinya, 2010



Sumber: Pemerintah Provinsi DIY

Tafukah Anda?

Sumber utama Pendapatan Asli Daerah DIY berasal dari Pajak (42,94%).



Keuangan Daerah

Sumber pembiayaan pembangunan yang dikelola pemerintah daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pada tahun 2009, sumber utama PAD sebesar 596,9 miliar rupiah (48,86 % dari total APBD), berasal dari pajak (524,6 miliar rupiah atau 42,94 persen APBD). Setiap tahun penerimaan yang berasal dari pajak cenderung meningkat sejalan dengan kenaikan pengeluaran pemerintah. Untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah maka dianggarkan pada tahun 2010 penerimaan yang berasal dari pajak dapat mencapai 526,7 miliar rupiah dari seluruh perkiraan penerimaan PAD sebesar 621,7 miliar rupiah.

Realisasi pengeluaran daerah sebagian besar (49,72%) merupakan pengeluaran pemerintah untuk lain-lain atau setara dengan 673,5 miliar rupiah. Sedangkan sisanya sebesar 681,1 miliar rupiah merupakan bagian pengeluaran fungsional sektoral. Bagian pengeluaran untuk lingkungan hidup, ketertiban, kesehatan, perumahan, ekonomi dan lain-lain berkurang dibandingkan porsinya pada tahun 2009. Sebaliknya, porsi untuk pendidikan dan sosial makin bertambah masing-masing 0,96 poin dan 5,01 poin dibandingkan porsi fungsi pendidikan dan sosial pada tahun sebelumnya.

Pada beberapa tahun terakhir, realisasi pengeluaran daerah selalu lebih besar dari pendapatannya, yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya defisit keuangan sebesar 41,4 miliar rupiah (2009), walaupun untuk tahun 2010 terdapat surplus sebesar 19,6 miliar rupiah.

Anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk pemerintah daerah terdiri atas dana perimbangan dan dana otonomi khusus. Dana perimbangan merupakan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH merupakan dana yang disediakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengatasi kurangnya sumber pajak. Pada tahun 2009 tercatat dana bagi hasil sebesar 5,00 persen. Pada tahun 2010 komposisi dana bagi hasil bertambah menjadi 6,16 persen.

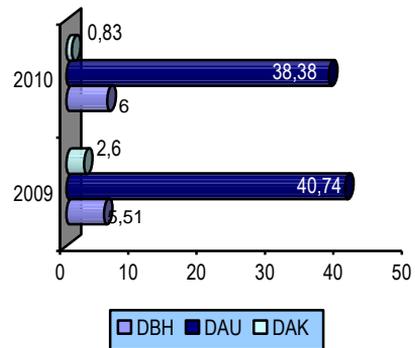
DAU merupakan dana yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik. Tercatat DAU pada tahun 2009 sebesar 42,89 persen dan 42,50 persen pada tahun 2010. Semakin sedikitnya komposisi DAU berarti perekonomian daerah sudah cukup membaik.

DAK ditujukan untuk daerah khusus yang kemudian digunakan untuk tujuan khusus. Pada tahun 2009 tercatat DAK sebesar 2,73 persen kemudian komposisinya menurun menjadi 0,92 persen pada tahun 2010. DAK tersebut digunakan untuk peningkatan infrastruktur jalan dan infrastruktur irigasi.

Tabel 2.3. Anggaran Daerah Berdasarkan Fungsinya Tahun 2009-2010 (Juta Rupiah)

Fungsi	2009	2010
(1)	(2)	(3)
Lingkungan Hidup	9 940	7 920
Ketertiban & Keamanan	17 325	17 323
Kesehatan	53 035	51 458
Perumahan & Fasilitas Umum	198 892	156 719
Ekonomi	193 131	195 130
Pendidikan	134 186	149 997
Sosial	34 040	102 540
Lain-lain	686 938	673 508
Jumlah	1 327 487	1 354 595

Grafik 2.5. Alokasi Dana Perimbangan DIY, 2009-2010 (%)



Sumber: Pemerintah Provinsi DIY

Tahukah Anda?

Dana Alokasi Khusus (DAK) di DIY digunakan untuk peningkatan infrastruktur jalan dan irigasi.

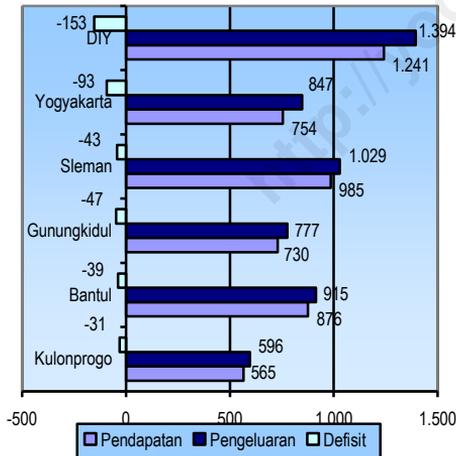


Tabel 2.4. Biaya Langsung dan Tak Langsung DIY, 2009-2010 (000 Rp)

Rincian	2009	2010
(1)	(2)	(3)
Belanja Pegawai	92 970 298	91 305 152
Belanja Barang dan Jasa	388 547 580	378 233 586
Belanja Modal	206 074 762	131 691 395
Belanja Langsung	687 592 640	601 230 133
Belanja Tak Langsung	724 456 345	793 215 967
Jumlah Belanja	1 412 048 985	1 394 446 100

Sumber: Pemerintah Provinsi DIY

Grafik 2.6. RAPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY, 2010 (miliar Rp)



Sumber: Pemerintah Provinsi DIY

Tahukah Anda?

Kabupaten Kulonprogo mengalami defisit anggaran paling kecil di DIY.



Belanja pemerintah daerah sebagian besar diberikan untuk pelayanan umum. Komposisi belanja langsung tahun 2010 mencapai 43,12 persen, lebih rendah dibanding komposisinya tahun 2009 yang mencapai 48,69 persen.

Pengeluaran lain yang relatif cukup besar pada tahun 2009 adalah untuk bidang lain-lain (51,75%); perumahan (14,98%); ekonomi (14,50%); pendidikan (10,11%) dan kesehatan (4,00%). Sedangkan pengeluaran yang relatif cukup besar pada tahun 2010 adalah untuk bidang lain-lain (49,72%), perumahan (11,57%), ekonomi (14,41%), pendidikan (11,07%) dan kesehatan (3,80%). Pendidikan yang merupakan investasi SDM menjadi prioritas karena pemerintah semakin berupaya menuju alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen.

Kabupaten Sleman mempunyai pendapatan dan belanja paling besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di DIY. Pada tahun 2010 pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman mencapai 985,4 miliar rupiah, sedangkan pengeluarannya ternyata lebih besar dari pendapatannya mencapai 1.028,6 miliar rupiah. Diikuti oleh Bantul, Yogyakarta, Gunungkidul, dan Kulonprogo dengan pendapatan masing-masing sebesar 876,2 miliar; 754,2 miliar; 729,5 miliar; dan 565,2 miliar rupiah. Jika diperhatikan nilai defisit anggarannya, Kabupaten Kulonprogo mengalami defisit anggaran yang paling kecil dibanding kabupaten/kota lainnya, yakni sebesar 31,1 miliar rupiah.

Jumlah penduduk DIY setiap tahun selalu bertambah, namun laju pertumbuhannya masih cukup terkendali.

Hasil Sensus Penduduk 2010 mencatat jumlah penduduk DIY mencapai 3.457.491 jiwa, tersebar di lima kabupaten/kota. Komposisi penduduk menurut kabupaten/kota pada tahun 2010 terbanyak di Kabupaten Sleman yang mendominasi hingga 31,62 persen dari populasi penduduk DIY, yaitu sejumlah 1.093.110 jiwa. Selanjutnya diikuti oleh kabupaten Bantul yang mencapai 26,36 persen (911.503 jiwa). Keterbatasan wilayah Kota Yogyakarta semakin jenuh menampung perkembangan sosial ekonomi masyarakat berdampak pada pengembangan wilayah-wilayah satelit di sekitarnya, seperti Sleman dan Bantul.

Jumlah penduduk DIY setiap tahun selalu bertambah, namun laju pertumbuhannya masih cukup terkendali. Pada tahun 2000, hasil Sensus Penduduk mencatat jumlah penduduk DIY mencapai 3,12 juta jiwa. Dalam kurun waktu 10 tahun hasil Sensus Penduduk 2010 tercatat 3,46 juta jiwa, atau meningkat rata-rata 1,04 persen per tahun, semakin melaju dibanding dengan pertumbuhan penduduk 1990-2000 yang sebesar 0,72 persen. Melajunya pertumbuhan penduduk memberi indikasi bahwa semakin membaiknya kesehatan ibu dan anak, atau semakin bertambahnya migrasi masuk yang bertujuan untuk bersekolah atau bekerja.

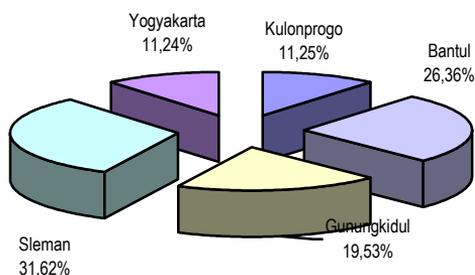
Jika dirinci menurut kabupaten/kota, laju pertumbuhan penduduk tercepat terjadi di Kabupaten Sleman (1,92%) dan paling lambat di Kota Yogyakarta (-0,22%). Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun 2000, Kulonprogo melaju sangat pesat, yakni dari -0,04% pada tahun 2000 menjadi 0,47% pada tahun 2010. Sedangkan Gunungkidul justru melambat.

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk DIY menurut Kabupaten/Kota, 2006-2010 (jiwa)

Kab/Kota	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	382 661	384 326	385 937	387 493	388 869
Bantul	859 729	872 866	886 061	899 312	911 503
Gunungkidul	675 140	675 359	675 471	675 474	675 382
Sleman	1 015 521	1 035 032	1 054 751	1 074 673	1 093 110
Yogyakarta	392 799	391 821	390 783	389 685	388 627
D.I.Yogyakarta	3 325 850	3 359 404	3 393 003	3 426 637	3 457 491

Sumber: DDA 2011

Grafik 3.1. Distribusi Penduduk DIY menurut Kabupaten/Kota, 2010 (%)



Sumber: SP2010

Tabel 3.2. Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 1990-2000, 2000-2010 (%)

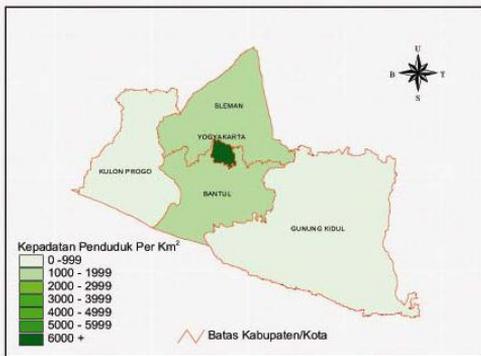
Kab/Kota	1990-2000	2000-2010	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulonprogo	-0,04	0,47	0,51
Bantul	1,19	1,55	0,36
Gunungkidul	0,30	0,06	-0,24
Sleman	1,50	1,92	0,42
Yogyakarta	-0,39	-0,22	0,17
D.I.Yogyakarta	0,72	1,04	0,32

Sumber: SP 2000, SP 2010



Kepadatan penduduk Kota Yogyakarta sudah mencapai puluhan ribu jiwa per km².

Grafik 3.2. Kepadatan Penduduk DIY menurut Kabupaten/Kota, 2010



Sumber: SP2010

Tabel 3.3. Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk DIY menurut Kabupaten/Kota, 2000 dan 2010

Kab/Kota	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)		
	2000	2010	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulonprogo	633	663	30
Bantul	1 541	1 798	257
Gunungkidul	451	455	4
Sleman	1 568	1 902	334
Yogyakarta	12 206	11 958	-248
D.I. Yogyakarta	979	1 104	106

Sumber: SP2000, SP2010

Tahukah Anda?

Penduduk Provinsi DIY terpadat ketiga sesudah kepadatan penduduk di DKI Jakarta dan Jawa Barat.



Kepadatan penduduk wilayah DIY menjadi 1.104 jiwa/km², provinsi terpadat ketiga sesudah DKI Jakarta dan Jawa Barat, yang masing-masing mencapai 14.469 jiwa/km² dan 1.217 jiwa/km². Padatnya penduduk DIY disebabkan adanya banyak perguruan tinggi besar yang menarik minat mahasiswa untuk berdomisili di sini. Jika diperhatikan menurut kabupaten/kota, Kota Yogyakarta merupakan wilayah terpadat, yakni 11,96 ribu jiwa per km². Luas wilayah Kota Yogyakarta relatif sangat terbatas, sementara sebagai ibukota provinsi, Yogyakarta dipadati oleh berbagai kegiatan ekonomi, menjadikannya wilayah terpadat. Akibatnya, perkembangan jumlah penduduk Kota Yogyakarta akan bergeser ke wilayah-wilayah di sekitarnya, seperti Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, sehingga kepadatan penduduknya semakin tinggi, menjadi 1,90 ribu jiwa dan 1,80 ribu jiwa per km². Sedangkan kepadatan penduduk di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo masih berkisar 400-700 jiwa per km².

Dalam kurun satu dasa warsa ini hampir seluruh kabupaten/kota di DIY semakin padat, kecuali Kota Yogyakarta yang semakin berkurang kepadatannya karena jumlah penduduknya semakin berkurang. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Yogyakarta sudah semakin jenuh oleh maraknya kegiatan ekonomi, sehingga penduduk lebih nyaman untuk berdomisili di wilayah sekitarnya, terutama di Sleman yang berkembang pesat dengan wilayah lebih luas. Itulah sebabnya, tingkat kepadatan penduduk Sleman meningkat rata-rata 334 jiwa per km².



Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman paling cepat dibanding kabupaten/kota lainnya di DIY, karena merupakan wilayah yang strategis dengan potensi ekonomi dan pendidikan.



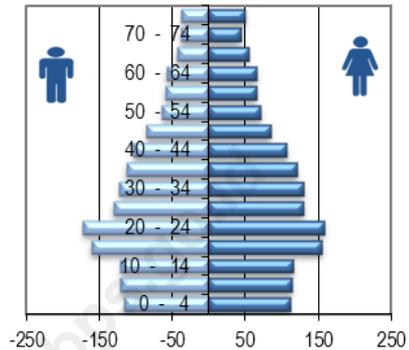
3

Dalam periode 2000-2010, telah terjadi perubahan struktur dan komposisi penduduk DIY. Hal ini terlihat dari Grafik Piramida Penduduk tahun 2000 dan 2010 (Grafik 3.1. dan Grafik 3.2). Pada tahun 2010 terjadi pengurangan pada usia 15-24 tahun; sebaliknya terjadi penggemukan pada kelompok usia di atasnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan penduduk pada usia 25 tahun ke atas, yang mencakup angkatan kerja dan lanjut usia. Peningkatan angkatan kerja perlu diwaspadai terkait ketersediaan lapangan kerja yang terbatas diharapkan tidak terjadi surplus tenaga kerja yang dapat berdampak pada tingginya jumlah pengangguran. Sedangkan peningkatan penduduk usia lanjut menunjukkan semakin membaiknya kesehatan masyarakat.

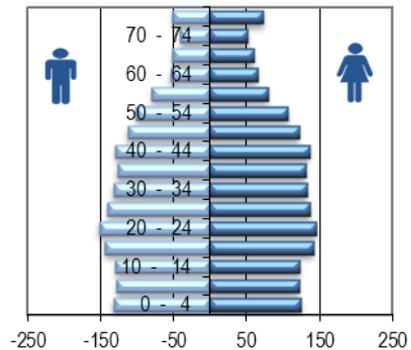
Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, penduduk laki-laki DIY sebanyak 1.708.910 jiwa dan perempuan sebanyak 1.748.581 jiwa. Seks rasio terhitung sebesar 97,73 atau terdapat 98 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Artinya, jumlah penduduk perempuan 2,27 persen lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-laki. Dibanding hasil Sensus Penduduk 2000 yang tercatat 98,3, seks rasio penduduk DIY pada tahun 2010 menurun.

Hampir seluruh kabupaten/kota mengalami penurunan seks rasio, kecuali di Bantul yang meningkat dari 99 persen pada tahun 2000 menjadi 99,45 persen pada tahun 2010. Tercatat rasio jenis kelamin terbesar di Sleman (100,49%) dan terendah di Yogyakarta (94,81%).

Grafik 3.3. Piramida Penduduk DIY, 2000



Grafik 3.4. Piramida Penduduk DIY, 2010



Tabel 3.4. Rasio Jenis Kelamin Penduduk DIY menurut Kabupaten/Kota, 2000 dan 2010 (%)

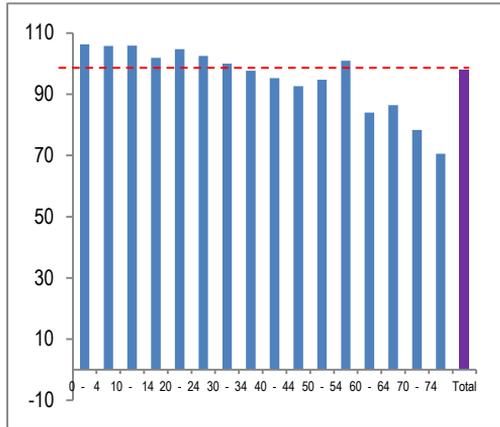
Kab/Kota	Rasio Jenis Kelamin		
	2000	2010	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulonprogo	97,00	96,23	-0,77
Bantul	99,00	99,45	0,45
Gunungkidul	95,10	93,70	-1,40
Sleman	101,80	100,49	-1,31
Yogyakarta	95,80	94,81	-0,99
D.I. Yogyakarta	98,30	97,73	-0,57

Sumber: SP2000, SP2010



Rasio ketergantungan pada tahun 2010 sedikit meningkat dibandingkan tahun 2000.

Grafik 3.5. Sex Rasio menurut Kelompok Umur di DIY, 2010 (%)



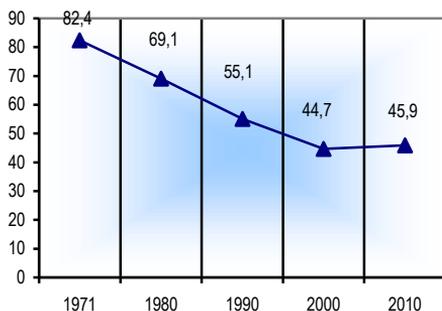
Sumber: SP 2010

Tahukah Anda?

Seks rasio tertinggi pada usia kurang dari 15 tahun, yakni 106, artinya jumlah penduduk usia kurang dari 15 tahun laki-laki 6 persen lebih banyak dibanding yang perempuan.



Grafik 3.6. Rasio Ketergantungan Penduduk DIY, 1971-2010



Sumber: BPS DIY

Menurut kelompok umur, seks rasio tertinggi pada usia kurang dari 15 tahun, yakni 106, artinya jumlah penduduk usia kurang dari 15 tahun laki-laki 6 persen lebih banyak dibanding yang perempuan. Sebaliknya, usia 60 tahun ke atas cenderung didominasi oleh penduduk perempuan. Hal ini karena angka harapan hidup perempuan relatif lebih tinggi daripada angka harapan hidup laki-laki.

Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan rasio yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk yang belum dan tidak produktif (umur dibawah 15 tahun dan 65 tahun keatas) dengan banyaknya penduduk yang termasuk produktif secara ekonomi (umur 15-64 tahun).

Rasio ketergantungan penduduk DIY pada tahun 2010 sebesar 45,9 persen, berarti setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 46 orang yang tidak produktif. Angka tersebut lebih tinggi dibanding rasio ketergantungan penduduk DIY pada tahun 2000 (44,7 persen). Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif (15-64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) dan yang sudah tidak produktif lagi (65 tahun lebih). Rasio ketergantungan penduduk di daerah perkotaan DIY tercatat 42,08 sementara di daerah perdesaan 54,19. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di perdesaan memiliki beban yang lebih berat dibandingkan dengan penduduk usia produktif di perkotaan.

Keterbatasan lapangan kerja menyebabkan tidak semua angkatan kerja yang tersedia dapat terserap di pasar kerja.

Tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi yang mendukung proses produksi dalam kegiatan perekonomian. Sebagai faktor produksi, tenaga kerja merupakan unsur manusia yang memiliki perbedaan perilaku. Setiap orang berharap mendapat penghasilan yang memadai sesuai pekerjaan yang telah dilakukannya. Namun sistem dan struktur upah tenaga kerja ditentukan berdasarkan pada pertimbangan berbagai faktor seperti pendidikan yang ditamatkan, masa kerja, jenis dan resiko pekerjaan, lokasi kerja, pengalaman kerja, usia, dan jabatan yang bersangkutan di tempat kerja.

Keterbatasan lapangan kerja menyebabkan tidak semua angkatan kerja yang tersedia dapat terserap di pasar kerja. Pada tahun 2010 tercatat 5,69 persen angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja, atau biasa disebut sebagai pengangguran terbuka (TPT). Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2009, terjadi penurunan 0,31 poin atau 13,9 ribu orang.

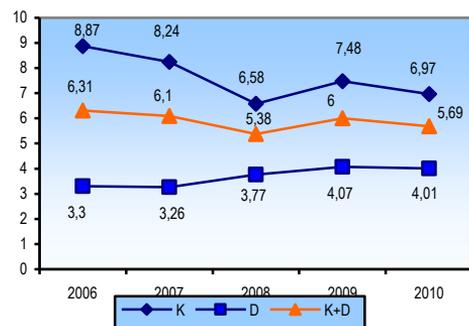
Menurut status desa, TPT di perkotaan tercatat lebih tinggi dibanding TPT di pedesaan. Pada tahun 2010, TPT di perkotaan mencapai 6,97 persen, sedangkan TPT di pedesaan lebih rendah (4,01 persen). Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di pedesaan lebih mudah terserap di pasar kerja. Kendati demikian, pasar tenaga kerja di pedesaan relatif terbatas dengan struktur lebih dominan pada kegiatan yang bersifat tradisional, seperti pertanian.

Tabel 4.1. Statistik Ketenagakerjaan DIY 2008-2010

Uraian	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan kerja	1 999 734	2 016 694	1 882 296
Bekerja	1 892 205	1 895 648	1 775 148
Pengangguran Terbuka	107 529	121 046	107 148
Bukan Angkatan Kerja	836 444	855 025	815 838
Penduduk Usia Kerja	2 836 178	2 871 719	2 698 134
TPAK	70,51%	70,23%	69,76%
TPT	5,38%	6,00%	5,69%

Sumber : Sakernas DIY, 2008-2010

Grafik 4.1. Tingkat Pengangguran Terbuka DIY menurut Status Daerah, 2006-2010



Tahukah Anda?

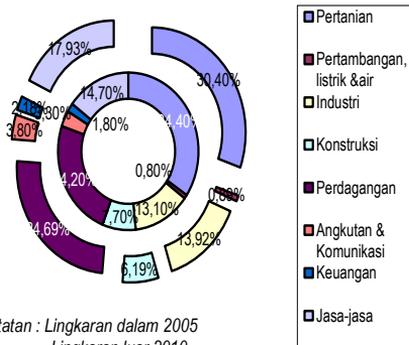
Masih terdapat 5,69 persen penduduk DIY yang belum terserap di pasar kerja.





Semakin berkurangnya distribusi tenaga kerja di sektor pertanian disebabkan oleh semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat.

Grafik 4.2. Struktur Tenaga Kerja menurut Sektor di DIY, 2005 & 2010 (%)



Catatan : Lingkaran dalam 2005
Lingkaran luar 2010
Sumber : Sakernas, 2005 & 2010

Gambar 4.1. Tenaga Kerja Rumah Makan di DIY, 2011



Sumber: ihs-indonesia.info

Tahukah Anda?

Distribusi tenaga kerja di sektor pertanian semakin berkurang.



Struktur Tenaga Kerja

Sektor pertanian dan sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi menyerap pekerja paling banyak di DIY yaitu masing-masing sekitar 30,4 persen dan 24,7 persen pada Agustus 2010. Sektor lain yang peranannya cukup berarti adalah sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan (18,0%) dan sektor industri (13,9%). Bila ditinjau dari lapangan pekerjaan utama, maka beberapa tahun terakhir persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, perikanan; sektor lembaga keuangan, *real estate*, usaha persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2005, distribusi tenaga kerja di sektor pertanian semakin berkurang. Sebaliknya, sektor pengangkutan, sektor keuangan, serta sektor jasa-jasa makin bertambah. Semakin berkurangnya distribusi tenaga kerja di sektor pertanian disebabkan oleh semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat, terutama mereka yang masih dalam masa usia produktif. Semakin tingginya tingkat pendidikan, mereka cenderung semakin meninggalkan sektor pertanian untuk bekerja pada sektor lain yang lebih formal dan menerapkan ilmu pengetahuan/ketrampilan yang diperolehnya dalam pendidikan.



Pergeseran dari buruh menjadi pengusaha mengindikasikan meningkatnya kewira-usahaan (*entrepreneurship*) masyarakat DIY.

Dari 1,8 juta orang yang bekerja di Provinsi DIY pada Agustus 2010, terdapat 30,6 persen penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan. Jika dibanding tahun 2009 terjadi penurunan distribusi karena bertambahnya pengusaha dibantu buruh dan pekerja keluarga. Penduduk yang menjadi pekerja keluarga umumnya adalah mereka yang belum memperoleh pekerjaan tetap atau hanya membantu kegiatan usaha anggota rumah tangganya. Pergeseran dari buruh menjadi pengusaha mengindikasikan meningkatnya kewira-usahaan (*entrepreneurship*) masyarakat DIY.

Produktivitas Tenaga Kerja (PTK)

Kesempatan kerja yang diindikasikan dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, secara struktural masih menumpuk di sektor pertanian (30,0%), sehingga produktivitas tenaga kerja di sektor tersebut tidak optimal. Produktivitas tenaga kerja (PTK) dalam kajian ini merupakan nilai tambah yang dihasilkan per tenaga kerja. Dengan menggunakan data produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (riil) sebagai *proxy* nilai tambah, pada tahun 2010 tercatat PTK sebesar Rp10,83 juta per tenaga kerja.

Jika digambarkan dengan *plotting* antara PTK sektoral dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006 dan 2010, tampak bahwa sektor pertanian selalu menjadi sektor yang “tidak produktif dan lambat”, meskipun pertumbuhan PTK sektor ini mampu mencapai 3,8 persen per tahun (Grafik 4.3 dan 4.4).

Tabel 4.2. Distribusi Persentase Tenaga Kerja DIY menurut Status Pekerjaan Utama, 2008-2010

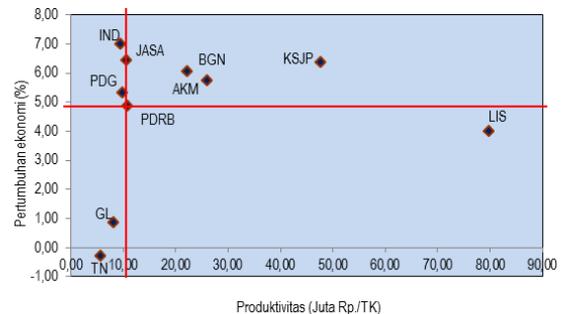
Status Pekerjaan Utama (1)	2008 (2)	2009 (3)	2010 (4)
Berusaha sendiri	16,46	14,33	13,75
Berusaha dibantu buruh tdk tetap	22,80	23,81	24,35
Berusaha dibantu buruh tetap	4,00	2,96	3,90
Buruh/karyawan/pegawai	30,83	32,44	30,57
Pekerja bebas di pertanian	3,01	2,89	2,02
Pekerja bebas di non pertanian	6,47	7,67	6,54
Pekerja keluarga	16,43	15,90	18,87
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas 2008-2010

Grafik 4.3. Plot PTK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi 2006



Grafik 4.4. Plot PTK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi 2010



Sumber: Analisis PDRB 2006-2010

Pada tahun 2010 UMP ditetapkan sebesar Rp745.694,- per bulan. Berarti meningkat 6,53 persen dibanding UMP tahun sebelumnya yang sebesar Rp700.000,-.

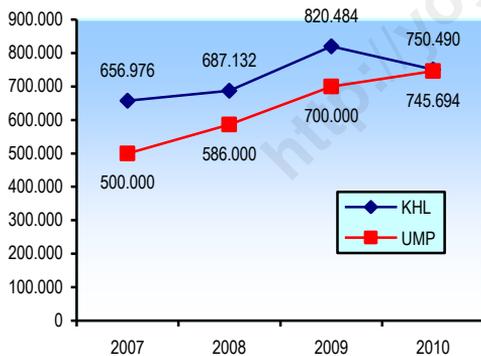


Tabel 4.3 Kebutuhan minimum, UMP, Upah Nominal, dan Upah Riil, 2007-2009 (rupiah)

Rincian	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rata-rata Kebutuhan hidup minimum	656 976	687 132	820 484	750 490
UMP	500 000	586 000	700 000	745 694
Upah nominal	500 000	586 000	700 000	745 694
Upah riil	426 300	499 600	596 800	635 700

Sumber: dari berbagai sumber

Grafik 4.5. Perkembangan Kebutuhan Hidup Minimum dan Upah Minimum Regional DIY, 2007-2010 (Rupiah)



Sumber: dari berbagai sumber

Tahukah Anda?

UMP DIY masih belum dianut semua perusahaan di DIY, sehingga rata-rata upah riil masih rendah.



Sebaliknya, PTK sektor listrik, sektor keuangan, sektor pengangkutan serta sektor bangunan semakin melaju sehingga dapat dikatakan sebagai sektor yang “cepat tumbuh dan produktif”.

Produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor jumlah pekerja, tingkat upah, jam kerja, nilai investasi, dan perkembangan teknologi. Jika pertumbuhan produktivitas yang terjadi bersifat padat modal, maka harapan adanya penyerapan tenaga kerja menjadi sangat kecil. Sebaliknya, jika pertumbuhan produktivitas yang terjadi bersifat padat karya, maka tenaga yang terserap untuk pertumbuhan produktivitas tersebut relatif cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengambil kebijakan penentuan berpihak pada kegiatan yang bersifat padat modal atau padat karya dengan segala konsekuensi pilihannya.

Upah Minimum Provinsi

Upah minimum provinsi merupakan upah minimal yang berhak diterima oleh para buruh di Indonesia. Pengaturan UMP dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang dalam antara pengusaha dan buruh.

UMP dihitung berdasarkan rata-rata kebutuhan minimum untuk hidup layak. Pada tahun 2010 UMP ditetapkan sebesar Rp745.694,- per bulan. Berarti meningkat 6,53 persen dibanding UMP tahun sebelumnya yang sebesar Rp 700.000,-. Selama periode 2007-2010, UMP meningkat sebesar 14,25 persen per tahun.



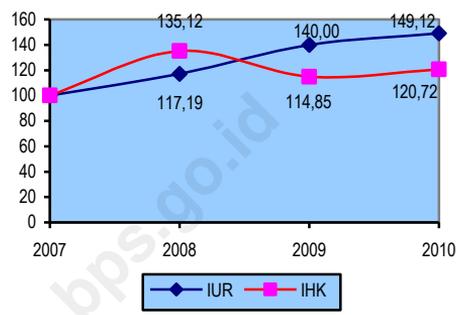
Kendati upah riil tersebut sudah mengalami kenaikan 6,52 persen, namun masih belum dapat memenuhi kebutuhan minimum untuk hidup layak.

Grafik 4.3 menunjukkan bahwa UMP tahun 2010 sudah menunjukkan perbaikan dibanding UMP 2007-2009 yang diputuskan jauh di bawah rata-rata kebutuhan hidup layak penduduk DIY. Selisih antara rata-rata kebutuhan hidup minimum dengan UMP yang ditetapkan merupakan nilai upah tambahan yang harus diupayakan para buruh agar kebutuhan hidup minimumnya terpenuhi. Dengan jam kerja yang relatif padat, para buruh tersebut tidak akan dapat mengupayakan upah tambahan tersebut. Akibatnya, mereka akan mengurangi kualitas konsumsi atau mengorbankan investasi, bahkan ada pula yang terbelit hutang.

Dari pantauan BPS mengenai upah buruh, pada tahun 2010 tercatat rata-rata upah nominal sebesar Rp745.694,-. Namun upah nominal tersebut bila distandarkan, akan diperoleh upah riil yang hanya sebesar Rp635.700,- per bulan. Kendati upah riil tersebut sudah mengalami kenaikan 6,52 persen, namun masih belum dapat memenuhi kebutuhan minimum untuk hidup layak. Pekerja yang tidak mendapatkan balas jasa yang layak berpotensi untuk tidak produktif.

Apabila dibandingkan dengan Indeks Harga Konsumen Kota Yogyakarta (IHK), indeks upah riil di DIY semakin membaik karena terletak di atas IHK sejak tahun 2009. Artinya, meskipun belum dapat memenuhi kebutuhan minimum untuk hidup layak, namun upah pekerja di DIY masih cukup untuk berkonsumsi.

Grafik 4.6. Indeks Upah Riil, Indeks Harga Konsumen, dan Indeks UMP DIY, 2007-2010



Sumber: BPS DIY
Catatan: 2007=100

Gambar 4.2. Demo Upah Buruh di Yogyakarta



Sumber: detiknews.com

Tafukah Anda?

Kendati upah riil sudah mengalami kenaikan 6,52 persen, namun masih belum dapat memenuhi kebutuhan minimum untuk hidup layak.

Pembangunan pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang cukup pesat, seperti program wajib belajar sembilan tahun.

Gambar 5.1. Lambang Pendidikan



Tabel 5.1. Banyaknya Sekolah, Kelas, Murid dan Guru menurut Tingkat Sekolah di DIY, 2010

Tingkat Sekolah	Sekolah	Kelas	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dikbud:	4 902	27 607	666 171	55 535
TK	2 194	4 125	82 631	7 571
SD	1 858	13 672	294 224	22 141
SLTP	421	4 455	127 214	10 798
SMU	165	1 747	81 315	5 624
SMK	195	2 612	77 077	8 067
SLB	69	996	3 710	1 334
Non Dikbud	276	1 008	13 318	1 679
Jumlah	5 178	28 615	679 489	57 214
2009	5 073	28 482	672 087	59 963

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DIY

Tahukah Anda?

Rasio murid guru meningkat menjadi 12 karena penambahan murid tidak disertai penambahan guru.



Salah satu tujuan negara yang diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk melaksanakannya adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan baik pendidikan di dalam sekolah maupun di luar sekolah.

Selama beberapa kurun waktu terakhir, pembangunan pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang cukup pesat. Program Wajib Belajar sembilan tahun, yang didukung dengan pembangunan infrastruktur sekolah dan penyediaan tenaga pendidik yang mencukupi serta Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) merupakan contoh program di sektor pendidikan yang dinilai cukup sukses dalam pelaksanaannya.

Jumlah sekolah di DIY pada tahun 2010 tercatat 5.178 unit, meningkat 105 unit dibanding tahun sebelumnya. Penambahan jumlah sekolah ini diikuti dengan penambahan 133 kelas guna memenuhi kebutuhan murid yang bertambah sebanyak 7.402 orang. Namun sebaliknya, jumlah guru justru berkurang 2.749 orang. Oleh karena itu, rasio murid guru mengalami kenaikan, dari 11 pada tahun 2009 menjadi 12 pada tahun 2010. Artinya, jumlah beban murid yang harus dibimbing oleh seorang guru pada tahun 2010 sebanyak 12 orang. Kenaikan rasio murid guru terjadi pada semua jenjang pendidikan, SD, SLTP sampai SMU.

Peningkatan angka partisipasi sekolah menunjukkan keberhasilan pembangunan pendidikan.

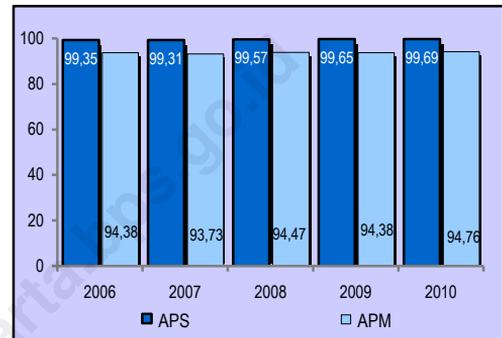
Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama pada usia muda. APS terdiri dari angka partisipasi sekolah kasar dan murni. Angka partisipasi sekolah kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Sama halnya dengan APK, angka partisipasi sekolah murni (APM) juga menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu, namun angka APM lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia SD (7-12 tahun) di Provinsi DIY selama periode 2006-2010 menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Pada tahun 2006, APS penduduk usia SD tercatat sebesar 99,35 persen dan secara berangsur-angsur mengalami peningkatan hingga mencapai 99,69 persen pada tahun 2010. Sedangkan angka partisipasi sekolah murni (APM) penduduk usia SD selama periode yang sama selalu lebih rendah dari APS dengan kisaran angka 94,38 sampai 94,76 persen.

Tingginya APS penduduk usia SD menunjukkan keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan melalui program wajib belajar sembilan tahun yang didukung dengan pembangunan fasilitas/ infrastruktur sekolah.

Grafik 5.1. APS dan APM Penduduk Usia SD di Provinsi DIY, 2006-2010



Sumber: Susenas 2006-2010

Gambar 5.2. Suasana Sekolah Dasar di Bantul



Sumber: waspada.co.id

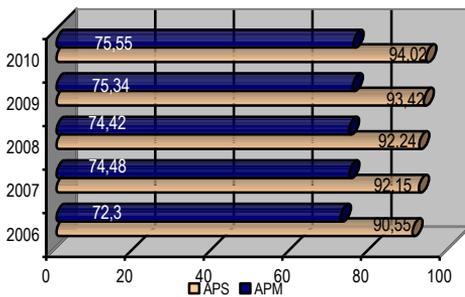
Tahukah Anda?

Tingginya APS penduduk usia SD menunjukkan keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan melalui program wajib belajar sembilan tahun.





Grafik 5.2. APS dan APM Penduduk Usia SLTP di Provinsi DIY, 2006-2010 (%)



Sumber: Susenas

Tabel 5.2. Jumlah Murid Putus Sekolah menurut Tingkatan Sekolah, 2008-2010

Tingkatan Sekolah	2008/2009	2009/2010	2010/2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Dikbud	746	966	1 308
SD	183	201	207
SLTP	210	244	218
SMA	52	103	128
SMK	301	418	755
Non Dikbud	103	450	117
SD-MI	9	331	17
SLTP-MTS	62	83	37
SLTA-MA	32	36	63
Jumlah	849	1 416	1 425

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY

Tahukah Anda?

Dibandingkan dengan penduduk usia SD, angka partisipasi sekolah penduduk usia SLTP (13-15 tahun) relatif lebih rendah.



Diberlakukannya UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang salah satunya berisi tentang alokasi minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah (APBN dan APBD) untuk bidang pendidikan maupun program kompensasi pengurangan subsidi BBM pada bidang pendidikan (dana BOS) cukup memberikan angin segar bagi kemajuan dunia pendidikan nasional.

Dibandingkan dengan penduduk usia SD, angka partisipasi sekolah penduduk usia SLTP (13-15 tahun) relatif lebih rendah. APS penduduk usia SLTP selama periode 2006-2010 terus meningkat. Pada awal periode APS penduduk usia SLTP mencapai 90,55 persen. Selanjutnya meningkat hingga tahun 2010 mencapai 94,02 persen.

APM usia SLTP sebesar 75,55 persen, menggambarkan dari 100 orang penduduk berusia 13-15 tahun, 75 orang di antaranya berstatus masih bersekolah pada tingkat SLTP. Sementara sisanya, sebanyak 25 orang kemungkinan berstatus masih bersekolah pada tingkat SD yang dapat terjadi karena kasus tinggal kelas/belum lulus. Namun ada diantara mereka yang sudah bersekolah di tingkat SLTA karena usia pada saat masuk sekolah masih terlalu muda. Bahkan tidak sedikit juga yang sudah tidak bersekolah lagi karena *drop out* atau tidak mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan SLTP atau bahkan belum/tidak pernah mengenyam sekolah sama sekali. Namun demikian, permasalahan angka putus sekolah pada tingkat SLTP ini perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

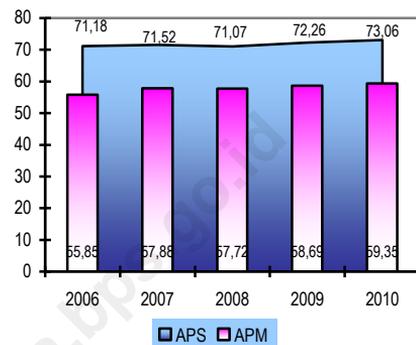
Program wajib belajar sembilan tahun cukup efektif meningkatkan angka partisipasi sekolah penduduk berusia 13-15 tahun.

Dengan adanya program insentif berupa pembebasan biaya sekolah sampai tingkat SLTP, seharusnya sudah tidak ada lagi kasus putus sekolah karena alasan tidak mampu membiayai sekolah. Menurut catatan dari Dinas Pendidikan Provinsi DIY, pada tahun 2010 angka putus sekolah tingkat SLTP mencapai 218 siswa, atau berkurang sebanyak 26 orang dibanding tahun 2009 (Tabel 5.3).

Program wajib belajar sembilan tahun cukup efektif meningkatkan angka partisipasi sekolah penduduk berusia 13-15 tahun. Di samping itu, kompensasi kenaikan harga BBM pada bidang pendidikan berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan khusus murid berupa pembebasan biaya pendidikan sampai tingkat SLTP terutama pada sekolah negeri yang mulai disalurkan pemerintah pada bulan Oktober 2005 juga cukup efektif mengurangi jumlah penduduk berusia 13-15 tahun yang terancam putus sekolah/*drop out* dan tidak mampu melanjutkan sekolah karena kesulitan ekonomi keluarganya pasca kenaikan harga BBM.

Secara umum, angka partisipasi sekolah penduduk pada usia SLTA (16-18 tahun) di DIY selalu lebih rendah bila dibandingkan dengan partisipasi sekolah penduduk pada usia SD maupun SLTP. APS penduduk usia SLTA (16-18 tahun) selama periode 2006-2010 mengalami perubahan yang berfluktuasi, dengan kisaran angka 71 sampai 73 persen. Pada tahun 2010, APS penduduk usia SLTA mencapai 73,06 persen dan sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 72,26 persen.

Grafik 5.3. APS dan APM Penduduk Usia SLTA di Provinsi DIY, 2006-2010 (%)



Sumber: Susenas

Gambar 5.3. Pelaksanaan UN SMA di Yogyakarta



Sumber: foto.detik.com

Tahukah Anda?

Pada tahun 2010 angka putus sekolah tingkat SLTP mencapai 218 siswa, atau berkurang sebanyak 26 orang dibanding tahun 2009.



Mahalnya biaya pendidikan pada tingkat SLTA sangat mempengaruhi angka putus sekolah/*drop out*, terutama pada keluarga siswa yang kemampuan ekonominya rendah.



Gambar 5.4. Siswa SMA Berprestasi dari Yogyakarta



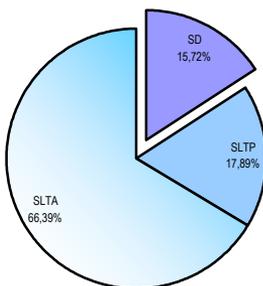
pendidikan-diy.go.id

Tahukah Anda?

Pada tahun 2010 angka putus sekolah tingkat SLTA meningkat 24,27 persen, sedangkan tingkat SMK meningkat tajam, 80,62 persen dibanding tahun 2009.



Grafik 5.4. Distribusi Anak Putus Sekolah menurut Jenjang Pendidikan di DIY, 2010



Sumber: Disdikpora Provinsi DIY

Pada tahun 2010, APM penduduk usia SLTA tercatat sebesar 59,35 persen. Artinya, dari 100 orang penduduk berusia 16-18 tahun di Provinsi DIY, sebanyak 59 orang masih berstatus sekolah pada tingkat SLTA. Sisanya sebanyak 41 orang berstatus tidak/belum pernah sekolah pada tingkat SLTA atau sudah putus sekolah (*drop out*). Sebagian diantara mereka masih berstatus sekolah di tingkat yang lebih rendah karena kasus tinggal kelas/tidak lulus atau sudah melanjutkan sekolah pada jenjang perguruan tinggi. Mahalnya biaya pendidikan pada tingkat SLTA sangat mempengaruhi angka putus sekolah/*drop out*, terutama pada keluarga siswa yang kemampuan ekonominya rendah. Di samping itu, dinaikkannya standar nilai kelulusan pada tingkat SLTP menyebabkan banyak penduduk pada usia SLTA (16-18 tahun) tidak lulus, sehingga banyak pula yang terpaksa putus sekolah/*drop out* dan tidak melanjutkan sekolah pada tingkat SLTA.

Dari Tabel 5.2 terlihat bahwa pada tahun 2010, jumlah murid yang putus sekolah tingkat SLTA meningkat sebesar 24,27 persen, sedangkan tingkat SMK meningkat sangat tajam, 80,62 persen. Secara keseluruhan jumlah anak putus sekolah didominasi oleh siswa tingkat SLTA atau yang sederajat, yakni 66,39 persen. Faktor penyebab semakin tingginya angka putus sekolah antara lain kemiskinan (faktor ekonomi), keterjangkauan akses sekolah (faktor teknis) dan preferensi kepala rumah tangga (sosiokultural rumah tangga). Dari ketiga aspek tersebut, kasus putus sekolah di DIY terutama disebabkan oleh faktor ekonomi dan sosiokultural keluarga.

Misi dalam melakukan pembangunan di bidang kesehatan adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau.

Sasaran program pembangunan di bidang kesehatan adalah masyarakat yang hidup dalam lingkungan sehat dan berperilaku hidup sehat, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang berkualitas secara adil dan merata di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sedangkan misi dalam melakukan pembangunan di bidang kesehatan adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau.

Kegiatan pembangunan kesehatan di suatu wilayah dilakukan dengan pengadaan infrastruktur dan sarana penunjang kesehatan serta didukung oleh penempatan tenaga kesehatan yang memadai. Namun demikian, banyaknya fasilitas, infrastruktur penunjang kesehatan dan tenaga kesehatan masih belum cukup menggambarkan tingkat pemerataan pembangunan. Karena pembangunan kesehatan lebih menekankan pada aspek manusia, maka indikator yang berhubungan dengan akses atau kemudahan penduduk dalam menjangkau sarana dan fasilitas serta tenaga kesehatan yang tersedia bisa lebih bermanfaat.

Pada tahun 2010 tercatat jumlah rumah sakit di DIY sebanyak 63 unit, termasuk rumah sakit khusus. Total kapasitas tempat tidur rumah sakit mencapai 5.191 unit. Secara umum, fasilitas kesehatan mengalami peningkatan setiap tahun untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Gambar 6.1. Logo Dinas Kesehatan



Sumber: <http://kuwarasanku.blogspot.com>

Gambar 6.2. Peran Tenaga Medis



Sumber: hminews.com

Tabel 6.1. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi DIY, 2008-2010

Fasilitas Kesehatan	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Sakit	53	60	63
Kapasitas Tempat Tidur RS	3 751	3 751	5 191
Rumah Bersalin	47	53	71
Balai Pengobatan	139	177	181
Puskesmas/Puskestu/Puskesling	118	580	558
Apotek	416	381	428

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DIY

6

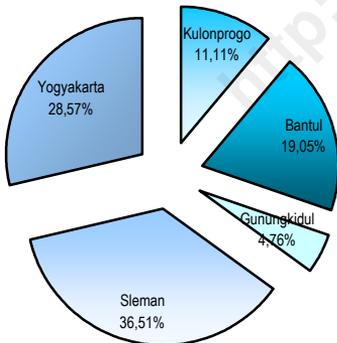
Penyebaran fasilitas rumah sakit menurut kabupaten/kota masih belum merata, sebagian besar di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta dengan jumlah masing-masing sebanyak 23 unit dan 18 unit.

Tabel 6.2. Rasio Per 100.000 Penduduk menurut Fasilitas Kesehatan di Provinsi DIY, 2010

Fasilitas Kesehatan	Rasio Per 100 000 Penduduk	Jangkauan Pelayanan Per Fasilitas
(1)	(2)	(3)
Rumah Sakit	1,82	54 881
Kapasitas Tempat Tidur RS	150,14	666
Rumah Bersalin	2,05	48 697
Balai Pengobatan	5,24	19 102
Puskesmas/Puskestu/Puskesling	16,14	6 196
Apotek	12,38	8 078

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DIY, diolah

Grafik 6.1. Distribusi Rumah Sakit menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2010



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DIY

Tahukah Anda?

Jangkauan pelayanan rumah sakit masih terlalu luas, sekitar 54.881 orang per rumah sakit.



Dengan jumlah fasilitas rumah sakit sebanyak 63 unit, maka rasio per 100.000 penduduknya mencapai 1,82, artinya setiap satu rumah sakit melayani sebanyak 54.881 jiwa penduduk. Jika dilihat dari kapasitas tempat tidurnya, maka untuk setiap 100.000 penduduk tersedia sebanyak 150 tempat tidur atau satu tempat tidur untuk 666 orang penduduk. Ketersediaan fasilitas kesehatan tersebut diharapkan mampu mendorong pening-katan kesehatan masyarakat DIY.

Namun demikian, penyebaran fasilitas rumah sakit menurut kabupaten/ kota masih belum merata, sebagian besar di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta dengan jumlah masing-masing sebanyak 23 unit dan 18 unit. Sedangkan di Kabupaten Gunungkidul, Kulonprogo dan Bantul fasilitas rumah sakit masih sangat terbatas masing-masing sebanyak 3 unit, 7 unit dan 12 unit. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kesenjangan derajat kesehatan antar wilayah di DIY.

Banyak indikator yang dapat digunakan untuk melihat derajat kesehatan masyarakat, selain jumlah sarana dan prasarana kesehatan. Indikator utama yang sering digunakan adalah angka kematian bayi (AKB, *Infant Mortality Rate, IMR*) dan angka harapan hidup (AHH, *Expectation of Life at Birth*). Namun kedua indikator tersebut yang paling ideal dari hasil sensus penduduk, sehingga perlu indikator lain yang dapat digunakan seperti kondisi persalinan, pola pemberian ASI, imunisasi, pemanfaatan fasilitas kesehatan dan angka kesakitan (*morbidity rate*).

Derajat kesehatan masyarakat menunjukkan peningkatan karena adanya kemajuan pelayanan kesehatan di DIY.

Dalam kurun waktu 2007-2010 derajat kesehatan masyarakat yang diindikasikan dengan angka kematian bayi dan angka harapan hidup menunjukkan peningkatan. Hasil SP 2010 mencatat angka kematian bayi di DIY sebesar 16 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi tersebut lebih rendah dibandingkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 yang sebanyak 19 per 1000 kelahiran hidup. Sebaliknya, angka harapan hidup penduduk DIY hasil SP 2010 terhitung 74 tahun, lebih tinggi dibandingkan angka harapan hidup hasil SDKI 2007 yang tercatat 73 tahun. Angka harapan hidup mencapai 74 berarti anak-anak yang lahir pada tahun 2010 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai mencapai umur 74 tahun.

Menurunnya angka kematian bayi dapat disebabkan oleh faktor kesehatan ibu semasa kehamilan, atau proses persalinan yang lebih baik. Proses persalinan yang ditolong oleh tenaga medis, seperti dokter dan bidan, dianggap lebih baik dibandingkan dengan proses persalinan oleh dukun atau lainnya. Berdasarkan data Susenas, persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga medis semakin meningkat, sedangkan yang ditolong oleh dukun atau lainnya semakin berkurang. Pada tahun 2008, sebanyak 95,81 persen balita yang ditolong oleh tenaga medis, meningkat menjadi 97,22 persen pada tahun 2010. Hal ini menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan di DIY.

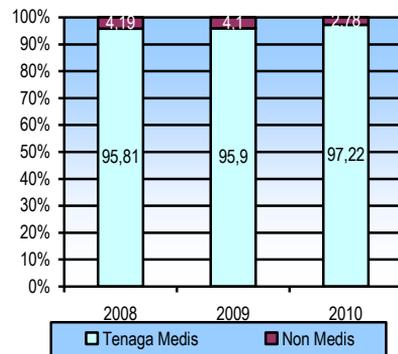
Keluhan kesehatan yang paling sering dialami penduduk DIY adalah batuk dan pilek.

Tabel 6.3. Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup, 2007 dan 2010

Indikator	SDKI 2007	SP 2010
(1)	(2)	(3)
AKB	19,0	16,0
AHH	73,0	74,0

Sumber: SDKI 2007, SP 2010

Grafik 6.2. Distribusi Persentase Balita menurut Penolong Persalinan Pertama, 2008-2010



Sumber: Susenas 2008-2010

Tahukah Anda?

Angka harapan hidup mencapai 74 berarti anak-anak yang lahir pada tahun 2010 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai mencapai umur 74 tahun.





Membaiknya angka harapan hidup disinyalir karena semakin berkurangnya morbiditas atau angka kesakitan. Morbiditas adalah proporsi penduduk yang mengeluh sakit pada kurun waktu tertentu. Hasil data Susenas mencatat bahwa keluhan kesehatan yang paling sering dialami penduduk DIY adalah batuk dan pilek. Dalam kurun waktu 2008-2010, morbiditas terhadap batuk dan pilek cenderung menurun. Pada tahun 2008 mencapai 49,84 persen untuk batuk, dan 49,48 persen untuk pilek. Kemudian pada tahun 2010, morbiditas batuk menjadi 49,34 persen dan morbiditas pilek menjadi 46,47 persen.

Tahukah Anda?

Pemanfaatan fasilitas puskesmas cenderung terus meningkat dari 29,03 persen pada 2008 menjadi 33,92 persen pada 2010.



Pemanfaatan fasilitas kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah seperti disebutkan di atas juga dapat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Fasilitas kesehatan yang representatif, murah dan aksesnya mudah dijangkau akan sangat membantu upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Selama periode 2008-2010, penduduk DIY lebih memilih berobat ke praktek dokter dan puskesmas. Bahkan trennya terus meningkat pada puskesmas, yang relatif lebih murah dan tersedia sampai ke pelosok desa. Pada awal periode (2008) sekitar 29,03 persen penduduk DIY yang memilih berobat ke puskesmas, kemudian pada tahun 2010 meningkat terus hingga mencapai 33,92 persen. Hal ini membuktikan bahwa pelayanan kesehatan oleh puskesmas semakin baik dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai pula.

PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan manusia sebagai isu pokok, mengemban amanat *Millenium Development Goals (MDGs)*.

7

Isu utama dalam pembangunan nasional maupun regional adalah pembangunan manusia. Bahkan pada tingkat internasionalpun, pembangunan manusia sebagai isu pokok, mengemban amanat *Millenium Development Goals (MDGs)*.

Dari butir-butir MDGs, tersirat bahwa penanggulangan kemiskinan dan upaya pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan merupakan prioritas. Manusia menjadi obyek sasarannya. Keberpihakan ini tentu saja tidak cukup tertuang dalam komitmen, namun memerlukan implementasi yang nyata.

Dalam lingkup nasional, pemerintah dewasa ini gencar melaksanakan program-program pembangunan yang menyangkut pembiayaan untuk mengangkat kondisi sosial ekonomi masyarakat secara langsung khususnya bagi penduduk berpendapatan rendah. Program yang bersifat intervensi tersebut dianggap perlu mengingat terbatasnya akses penduduk miskin terhadap faktor-faktor produksi maupun layanan pendidikan dan kesehatan.

Di bidang pendidikan, Pemerintah menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membantu biaya penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah dan membantu meringankan biaya sekolah bagi murid yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Keberpihakan Pemerintah terhadap pendidikan masyarakat merupakan investasi yang cukup besar dalam upaya mencapai masyarakat sejahtera.

Komitmen MDGs, 2000:

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan.
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua.
3. Mendorong kesetaraan dan pemberdayaan jender.
4. Menurunkan angka kematian anak.
5. Meningkatkan kesehatan ibu.
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya.
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup.
8. Mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan.

Gambar 7.1. Lambang Komitmen MDGs



Sumber: pastipanjangi.wordpress.com

Secara eksplisit UNDP menyarankan bahwa Indonesia perlu memberikan prioritas investasi yang lebih tinggi pada upaya pembangunan manusia dan bagaimana cara pembiayaannya.

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-2013

1. *Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Indikator Misi Pertama: Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung.*
2. *Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Indikator Misi Kedua: Memperkuat fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera.*
3. *Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Indikator Misi Ketiga: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis Good Governance.*
4. *Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Indikator Misi Keempat: Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.*

Di bidang kesehatan, pemerintah juga meluncurkan program asuransi kesehatan bagi keluarga miskin (Askes Gakin), sehingga masyarakat berpendapatan rendah dapat memperoleh layanan kesehatan secara gratis di puskesmas ataupun fasilitas kelas III pada rumah sakit pemerintah.

Dalam lingkup daerah, ada **empat arah** Kebijakan Pembangunan yang akan ditempuh pemerintah Provinsi DIY baik dalam jangka panjang maupun pendek. Keempat arah kebijakan tersebut bermuara pada pembangunan manusia yang berkualitas.

Kebijakan di atas sejalan dengan rekomendasi *United Nations Development Programme* (UNDP) terkait dengan kebutuhan pembiayaan yang lebih memadai bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Secara eksplisit UNDP menyarankan bahwa Indonesia perlu memberikan prioritas investasi yang lebih tinggi pada upaya pembangunan manusia dan bagaimana cara pembiayaannya. Ditambahkan pula bahwa pembangunan manusia merupakan hak azasi manusia yang sangat penting untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi dan menjamin keberlangsungan demokrasi dalam jangka panjang.

Telah banyak kritik yang diserukan para pengamat maupun lembaga-lembaga internasional yang meneliti tingkat ketimpangan pendapatan karena peran pembangunan ekonomi yang hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun mengabaikan kesempatan bagi manusia untuk hidup lebih berkualitas.



Namun, ternyata ada kesenjangan antara skala PDB dengan kondisi nyata di lapangan.

Teori pembangunan yang utamanya berlandaskan pada ilmu ekonomi sedikit banyak telah mengantarkan kita kepada penilaian bahwa kesejahteraan penduduk dapat diukur dengan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan, yang umumnya dihitung dengan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk skala nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk regional.

Pada era 1970-an dunia mengenal indeks PDB, atau Produk Nasional Bruto (PNB) yang digunakan sebagai indikator tunggal untuk menilai besarnya kekayaan negara. Logikanya, semakin tinggi PDB suatu negara maka semakin besar pula penghasilan penduduk dan semakin sejahtera negara itu. Namun, ternyata ada kesenjangan antara skala PDB dengan kondisi nyata di lapangan. Beberapa negara mencatat indeks PDB yang cukup mengesankan, namun ternyata kemudian diketahui masih banyak penduduknya yang tidak bisa membaca. Stewart, Streeten, dan Hicks (1981) mulai merumuskan metode pengukuran kebutuhan dasar manusia, yang dipertegas oleh Amartya Sen (1985) melalui kritiknya terhadap skala GNP (PNB).

Menurut Amartya, taraf hidup manusia tidak boleh hanya dipandang dari sekedar tingkat pendapatan, namun juga kualitas hidup yang dimilikinya. Akhirnya tahun 1995, Mahbub Ul-Haq, ilmuwan Pakistan yang bekerja di UNDP mengembangkan indikator progres ekonomi baru yaitu *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel 7.1. Dasar Perhitungan IPM

Dimensi	Indikator	Indeks Dimensi	IPM
Kesehatan (Umur panjang dan sehat)	Angka harapan hidup pd saat lahir (e_0)	Indeks harapan hidup → Indeks X1	
Pendidikan (Pengetahuan)	1. Angka melek huruf (AMH) 2. Rata-rata lama sekolah (MYS)	Indeks pendidikan → Indeks X2	
Ekonomi (Kehidupan yang layak)	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan (PPP Rupiah)	Indeks pendapatan → Indeks X3	

Gambar 7.2. Upaya Membangun Manusia



Sumber: liburan.info

Tafukah Anda?

Indeks Pembangunan Manusia dikembangkan oleh Mahbub Ul-haq, ilmuwan Pakistan pada tahun 1995.



Pada tahun 2010, IPM DIY tercatat 75,77, meningkat 0,54 poin dibanding IPM tahun 2009.

Gambar 7.3. Anak-anak di Yogyakarta



Sumber: salamjogja.wordpress.com

Tabel 7.2. IPM DIY menurut Kabupaten/Kota, 2009-2010

Prov/Kab/Kota	IPM		Reduksi Shortfall
	2009	2010	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulonprogo	73,77	74,49	2,74
Bantul	73,75	74,53	2,96
Gunungkidul	70,18	70,45	0,93
Sleman	77,70	78,20	2,21
Yogyakarta	79,29	79,52	1,12
D.I.Yogyakarta	75,23	75,77	2,18

Sumber: BPS RI

Tahukah Anda?

IPM merupakan besaran agregat PNB, tingkat harapan hidup, serta kemampuan baca tulis dan lamanya sekolah.



IPM merupakan besaran agregat PNB, tingkat harapan hidup, serta kemampuan baca tulis dan lamanya sekolah. Skala IPM hingga kini digunakan di berbagai penjuru dunia sebagai tolok ukur kesejahteraan suatu bangsa.

Meskipun demikian, IPM juga tak lepas dari kritik karena indikator ini tidak dapat mengukur dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini yang diakibatkan oleh pembangunan akan menurunkan kualitas hidup manusia di masa mendatang.

Pada tahun 2010, IPM DIY tercatat 75,77, meningkat 0,54 poin dibanding IPM tahun 2009. Dengan angka IPM tersebut, posisi DIY bertahan pada peringkat keempat sesudah DKI Jakarta, Sulawesi Utara dan Riau, tidak berubah sejak tahun 2008. Kenaikan IPM DIY pada tahun 2010 disebabkan oleh peningkatan semua variabel pendukungnya, terutama dari komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan, meningkat hingga 1,9 poin.

Menurut kabupaten/kota, IPM tertinggi masih disandang oleh penduduk Kota Yogyakarta (79,52) dan terendah di Kabupaten Gunungkidul (70,45). Sedangkan *reduksi shortfall* atau kecepatan menuju IPM ideal (100) tercepat dialami oleh penduduk Kabupaten Bantul (2,96), dan terlambat dialami oleh penduduk Kabupaten Gunungkidul (0,93). Melajunya *Reduksi shortfall* di Bantul terutama karena kenaikan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

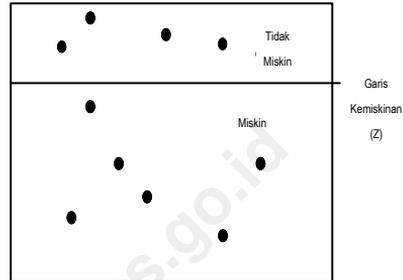
Misi dalam melakukan pembangunan di bidang kesehatan adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau.

Komitmen pertama dalam MDGs tahun 2000 adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Hal ini menyiratkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang sangat mendesak untuk segera ditanggulangi.

Penduduk miskin secara makro dihitung dengan pendekatan kebutuhan minimum seseorang untuk dapat hidup layak (*basic needs approach*). Kebutuhan minimum tersebut mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non makanan. Dari pengukuran kebutuhan minimum komoditas makanan dan non makanan tersebut diperoleh batas yang disebut sebagai “Garis Kemiskinan”. Garis tersebut merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Orang-orang yang mempunyai pendapatan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Sebaliknya, dikategorikan sebagai penduduk tidak miskin.

Pada tahun 2011 tercatat garis kemiskinan di DIY senilai Rp249.629,- per kapita sebulan, atau meningkat 11,31 persen dibanding garis kemiskinan tahun 2010 yang senilai Rp224.258,- per kapita per bulan. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh laju inflasi 7,45 persen dalam periode Februari 2010-Februari 2011. Dengan batas garis kemiskinan tersebut, terhitung jumlah penduduk miskin sebanyak 560,9 ribu jiwa, atau 16,00 persen dari total penduduk DIY. Jika dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 16,83 persen dari total penduduk, penduduk miskin di DIY bertambah 20,5 ribu jiwa.

Gambar 8.1. Garis Kemiskinan



Sumber: Analisis PDRB 2006-2010

Tabel 8.1. Indikator Kemiskinan di Provinsi DIY, 2006-2010

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bl)	Jml Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2006	170 720	648,7	19,15
2007	184 965	633,5	18,99
2008	202 362	608,9	18,02
2009	220 830	574,9	16,86
2010	224 258	540,4	16,83
2011	249 629	560,9	16,00

Sumber: BPS DIY

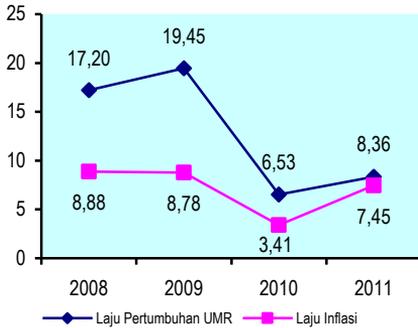
Tahukah Anda?

Penduduk miskin secara makro dihitung dengan pendekatan kebutuhan minimum seseorang untuk dapat hidup layak (*basic needs approach*).



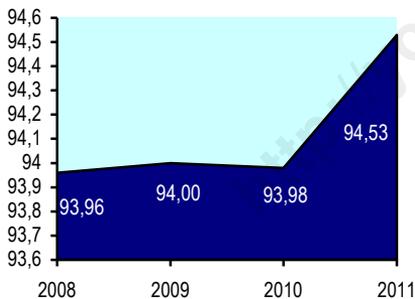
Tingkat kesempatan kerja pada bulan Februari 2011 meningkat sangat signifikan dibanding tingkat kesempatan kerja pada bulan Februari 2010.

Grafik 8.1. Laju Pertumbuhan UMR dan Inflasi di DIY, 2008-2011



Sumber: BPS DIY

Grafik 8.2. Perkembangan Tingkat Kesempatan Kerja di DIY, 2008-2011



Sumber: Sakernas, Februari 2008-2011

Tabel 8.2. Persentase Pendapatan yang Dinikmati Penduduk menurut Kelas Sosial Ekonomi DIY, 2009-2010

Kelas Sosek	2009	2010	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)
40% berpendapatan terendah	18,85	18,77	-0,08
40% berpendapatan menengah	36,5	35,22	-1,28
20% berpendapatan tertinggi	44,65	46,02	1,37

Sumber: Susenas 2008-2010

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan antara lain: kenaikan pendapatan atau upah, kesempatan kerja yang lebih luas, dan pendapatan masyarakat yang semakin merata. Kenaikan upah buruh yang diindikasikan dengan upah minimum regional (UMR) pada tahun 2011 meningkat cukup signifikan, yakni 8,36 persen. Jika dibandingkan dengan laju inflasi yang sebesar 7,45 persen, kenaikan upah tersebut lebih tinggi. Dengan asumsi bahwa penetapan UMR tersebut diikuti oleh sebagian besar perusahaan DIY, maka rata-rata pendapatan penduduk meningkat cukup signifikan.

Tingkat kesempatan kerja (TKK) sebagai gambaran persentase angkatan kerja yang terserap di pasar kerja pada bulan Februari 2011 meningkat sangat signifikan dibanding bulan yang sama pada tahun 2010, yakni dari 93,98 persen menjadi 94,53 persen. Penyerapan angkatan kerja yang sangat besar ini berdampak pada berkurangnya persentase penduduk miskin.

Namun berdasarkan data Susenas tahun 2010, tingkat pemerataan pendapatan masyarakat semakin buruk karena persentase pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah berkurang dari 18,85 persen pada tahun 2009 menjadi 18,77 persen di tahun 2010. Artinya, pangsa pendapatan yang dapat dinikmati penduduk miskin terserap oleh penduduk yang relatif kaya.

Komoditas beras yang merupakan output padi mempunyai bobot yang tinggi dalam penghitungan angka inflasi, sehingga menjadi perhatian pemerintah.

Tanaman bahan makanan terdiri dari padi dan palawija yang mencakup padi (baik padi sawah maupun padi ladang), jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, dan cantel. Dari kedelapan komoditas tersebut, tanaman padi paling dominan karena merupakan bahan makanan pokok penduduk. Selain padi dan palawija, tanaman bahan makanan juga termasuk sayur-sayuran dan buah-buahan, baik yang berupa tanaman semusim maupun tanaman tahunan.

Komoditas beras yang merupakan output padi mempunyai bobot yang tinggi dalam penghitungan angka inflasi yaitu sebesar 3,29 persen. Apabila terjadi gejolak harga beras, akan berdampak pada inflasi atau deflasi yang berpengaruh terhadap perekonomian DIY. Kenaikan harga beras dapat mendongkrak inflasi, sehingga kestabilan harga beras harus terkendali. Oleh karenanya, beras merupakan komoditas yang sangat penting dalam perekonomian. Jaminan ketersediaan beras dan kestabilan harga beras supaya tidak bergejolak tidak dapat diabaikan begitu saja.

Ketersediaan beras menyangkut aspek produksi dan konsumsi. Ketidakseimbangan antara besaran produksi dan konsumsi beras dalam suatu wilayah akan menyebabkan terjadinya impor atau ekspor antar wilayah. Oleh karena itu, Pemerintah sangat berkepentingan dalam pengambilan kebijakan perberasan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani secara khusus dan seluruh masyarakat secara umum.

Tabel 9.1. Produksi Beberapa Komoditas Tanaman Bahan Makanan dan Hortikultura, 2008-2010 (ton)

Komoditas	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
Padi	798 232	837 930	823 887
Jagung	285 372	314 937	345 576
Kedelai	34 998	40 278	38 244
Kacang tanah	63 240	65 893	58 918
Kacang Hijau	514	473	610
Ubi kayu	892 907	1 047 684	1 114 665
Ubi jalar	7 656	6 687	6 484
Bawang merah	16 996	19 763	19 950
Cabe Besar	15 063	15 118	13 049
Kacang panjang	2 887	2 639	3 034

Sumber: BPS DIY

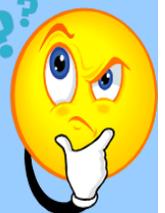
Gambar 9.1. Tanaman Padi



Sumber: radionewongtani.blogspot.com

Tahukah Anda?

Produksi tanaman padi palawija pada tahun 2010 menurun, kecuali jagung, kacang hijau, dan ubi kayu yang naik masing-masing 9,73 persen, 28,96 persen, dan 6,39 persen.



9

Perkembangan jumlah rumah tangga yang mengusahakan tanaman padi selama 6 tahun terakhir mengalami penurunan rata-rata sebesar 670 rumah tangga atau 0,20 persen per tahun.

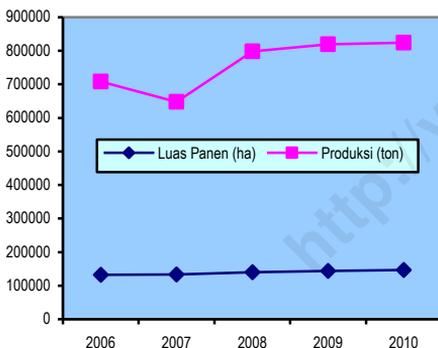


Tabel 9.2. Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi di Provinsi DIY, 2006-2010

Tahun	Luas Panen (ha)	Produktivitas (ku/ha)	Produksi (ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
2006	132 374	53,50	708 166
2007	133 369	53,18	647 357
2008	140 167	56,95	798 223
2009	144 020	56,87	819 122
2010	147 058	56 02	823 887

Sumber: BPS DIY

Grafik 9.1. Luas Panen dan Produksi Padi di Provinsi DIY, 2006-2010



Sumber: BPS DIY

Tahukah Anda?

Di sisi lain terjadi alih fungsi lahan sawah tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 sebesar rata-rata 205 hektar atau 0,36 persen per tahun.



Produksi beras atau padi tidak terlepas dari peran pelaku usaha tanaman padi. Pelaku utama atau produsen padi adalah rumah tangga yang mengusahakan tanaman padi. rumah tangga usaha tanaman padi inilah yang memegang peran penting dalam proses produksi tanaman padi.

Dalam pelaksanaan proses tersebut petani tentu saja dihadapkan berbagai faktor produksi. Pembinaan pemerintah dalam meningkatkan produksi padi dilakukan dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi padi secara terus menerus. Hal ini dilaksanakan dengan berbagai macam kebijakan seperti: pemberian subsidi atau bantuan benih, pupuk dan obat-obatan baik secara langsung (Bantuan Langsung Masyarakat), subsidi, pemberian kredit usaha tani, kebijakan menstabilkan harga gabah di tingkat padi melalui program Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP).

Jumlah rumah tangga yang mengusahakan tanaman padi hasil Sensus Pertanian 2003 (ST03) di Provinsi DIY sebanyak 333.229 rumah tangga. Perkembangan jumlah rumah tangga yang mengusahakan tanaman padi tersebut selama 6 tahun terakhir menjadi sebesar 329.207 rumah tangga atau mengalami penurunan rata-rata sebesar 670 rumah tangga atau 0,20 persen per tahun. Di sisi lain terjadi alih fungsi lahan sawah tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 sebesar rata-rata 205 hektar atau 0,36 persen per tahun. Konversi lahan sawah tersebut cukup memberi andil dalam penurunan jumlah petani padi.

Kebanyakan komoditas palawija mengalami penurunan produksi pada tahun 2010, kecuali jagung, kacang hijau, dan ubi kayu.

9

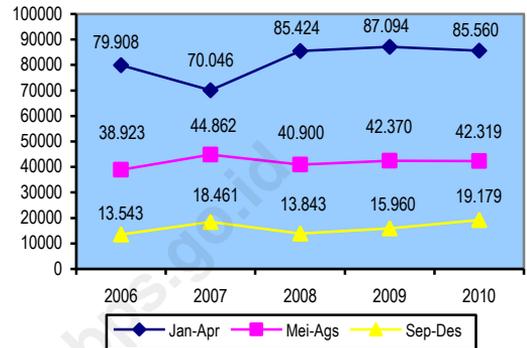
Dengan demikian diharapkan intervensi pemerintah dalam rangka upaya peningkatan produksi padi harus bertumpu pada peningkatan produktivitas padi atau penerapan teknologi pertanian yang secara langsung menyentuh rumah tangga usaha tanaman padi tersebut.

Produksi padi tertekan pada tahun 2007 (64,74 ribu ton) akibat adanya pergeseran musim tanam setelah terjadinya pedatan hujan. Kendati demikian, luas panen dan produktivitas relatif tetap. Hal ini menunjukkan bahwa produksi komoditas padi sangat tergantung pada musim.

Penanaman padi pada bulan Oktober s.d Desember akan dipanen pada sekitar bulan Januari s.d Maret, sehingga pada bulan Januari-April selalu terjadi panen raya. Kondisi tersebut tercermin dalam Grafik 5.2 yang memperlihatkan bahwa luas panen pada setiap bulan Januari s.d April rata-rata dua kali lipat luas panen bulan September-Desember. Selanjutnya luas panen padi pada bulan Mei-Agustus lebih rendah dari bulan Januari-April dikarenakan curah hujan semakin menurun dan petani sebagian beralih menanam palawija.

Produksi palawija yang mengalami peningkatan yaitu jagung, kacang hijau, dan ubi kayu selama tahun 2010. Peningkatan produksi tertinggi terjadi pada tanaman kacang hijau yang tumbuh sebesar 28,96 persen. Kenaikan ini akibat kenaikan luas panen dari 745 ha pada tahun 2009 menjadi 1.024 pada tahun 2010. Sedangkan tanaman palawija yang mengalami penurunan produksi antara lain kedelai, kacang tanah, ubi jalar, dan cantel jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Grafik 9.2. Luas Panen Padi Per Sub Round di DIY, 2006-2010 (ha)



Sumber: BPS DIY

Tabel 9.3. Produksi Palawija di DIY, 2006-2010 (ton)

Komoditi	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jagung	223 620	258 187	285 372	314 937	345 576
Kedelai	39 545	29 692	34 998	40 278	38 244
Kacang Tanah	66 359	56 667	63 240	65 893	58 918
Kacang Hijau	563	571	514	473	610
Ubi kayu	1 016 270	976 610	892 907	1 047 684	1 114 665
Ubi Jalar	6 236	5 496	7 656	6 687	6 484
Cantel	218	198	167	298	228

Sumber: BPS DIY

Tahukah Anda?

Penanaman padi pada bulan Oktober s.d Desember akan dipanen pada sekitar bulan Januari s.d Maret, sehingga pada bulan Januari-April selalu terjadi panen raya.

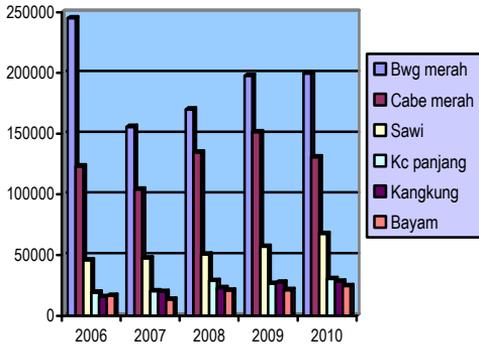


9

Potensi produksi sayuran di DIY adalah komoditas bawang merah, cabe merah, dan sawi dengan produktivitas masing-masing 90,40 kw/ha, 58,28 kw/ha, dan 110,22 kw/ha.



Grafik 9.3. Produksi Sayur-sayuran di DIY, 2006-2010 (kwintal)



Sumber: BPS DIY

Tabel 9.4. Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Sayuran di Provinsi DIY Tahun 2010

Komoditas	Luas Panen (ha)	Produktivitas (ku/ha)	Produksi (ku)
(1)	(2)	(3)	(4)
Bawang Merah	2 207	90,40	199 503
Cabe Merah	2 239	58,28	130 489
Sawi	613	110,22	67 562
Kc. panjang	677	44,82	30 342
Kangkung	377	74,51	28 092
Bayam	566	43,46	24 600

Sumber: BPS DIY



Penurunan produksi palawija terbesar pada komoditas cantel yaitu sebesar 23,49 persen, hal ini disebabkan karena penurunan luas panen dari 945 ha pada 2009 menjadi 724 ha pada 2010. Selama periode 2008-2009 produksi ubi kayu tertinggi tercatat pada tahun 2010 dengan produksi sebesar 1.114.665 ton yang disebabkan kenaikan produktivitas dari 154,83 ku/ha pada 2009 menjadi 210,42 ku/ha pada 2010

Beberapa komoditas tanaman sayuran semusim yang cukup potensial dikembangkan di Provinsi DIY adalah cabe merah, bawang merah dan kacang panjang. Bawang merah merupakan komoditas unggulan yang banyak dibudidayakan di wilayah Pesisir Selatan Kabupaten Bantul dan Kulonprogo. Pada tahun 2010, produksi bawang merah naik sebesar 0,95 persen atau menjadi 199.503 kuintal.

Tanaman cabe juga menjadi komoditas unggulan yang banyak diusahakan di tiga Kabupaten, yaitu Kulonprogo, Bantul dan Sleman. Pada tahun 2010, produksi cabe turun sebesar 13,69 persen menjadi 130.489 kuintal. Penurunan tersebut berdampak pada kenaikan harga yang cukup signifikan.

Dibandingkan dengan bawang merah dan cabe, budidaya tanaman sawi hijau memang lebih sedikit. Pada periode 2008-2010, produksi tanaman sawi selalu meningkat, tahun 2010 produksi sawi sebesar 67.562 kuintal atau meningkat 18,68 persen dibanding tahun 2009.

Potensi tanaman perkebunan di DIY adalah komoditas kelapa dan tebu rakyat, dengan produktivitas masing-masing 7,64 ton/ha dan 4,90 ton/ha.

Tanaman Perkebunan

Beberapa tanaman perkebunan yang cukup berpotensi dan banyak dibudidayakan di Provinsi DIY antara lain adalah kelapa, cengkeh, jambu mete, coklat, tembakau rakyat dan tebu rakyat. Berdasarkan luas tanamannya pada tahun 2010, kelapa merupakan tanaman perkebunan yang paling banyak diusahakan dengan luas tanaman mencapai 42.796 hektar.

Produksi kelapa pada tahun 2010 mencapai 56.754 ton, meningkat 1,06 persen dibanding produksi kelapa tahun 2009 yang mencapai 53.156 ton. Dengan luas panen 32.558 hektar, terjadi peningkatan produksi yang sangat signifikan, menjadi 7,64 ton/ha.

Tembakau rakyat yang sebagian besar diusahakan di Kabupaten Sleman, pada tahun 2010 menghasilkan 257 ton, turun drastis sebesar 79,36 persen terhadap produksi tahun sebelumnya.

Produksi tanaman tebu rakyat yang banyak diusahakan di Kabupaten Sleman dan Bantul mengalami kenaikan sebesar 7,89 persen terhadap produksi tahun sebelumnya yang mencapai 17.031 persen. Jika dikaitkan dengan kebutuhan konsumsi gula oleh masyarakat, produksi tanaman tebu seharusnya semakin diperhatikan, agar tidak tergantung pada impor.

Produksi cengkeh turun hingga 59,61 persen, dari 557 ton pada tahun 2009 menjadi 225 ton pada tahun 2010. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan luas panen dari 1.947 ha menjadi 1.358 ha pada tahun 2010.

Tabel 9.5. Luas Tanaman, Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Beberapa Tanaman Perkebunan di DIY, 2010

Komoditas	Luas Tanaman (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Rata-rata Produksi (ton/ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kelapa	42 796	32 558	56 754	7,64
Jambu mete	19 794	1 546	408	1,43
Coklat	4 619	2 540	1 334	3,52
Tebu rakyat	3 476	3 476	17 031	4,90
Cengkeh	2 882	1 358	225	0,70
Jarak pagar	2 054	219	40	0,22
Tembakau	1 555	752	257	3,13
Kopi	1 294	913	400	0,77

Sumber: BPS DIY

Grafik 9.4. Produksi Kelapa dan Tebu di DIY, 2006-2010 (ton)



Sumber: BPS DIY

Tahukah Anda?

Produksi tanaman tebu rakyat tumbuh sebesar 7,89 persen terhadap produksi tahun sebelumnya.



Komoditas ternak unggulan di DIY adalah sapi yang populasinya meningkat 2,79 persen pada tahun 2010 dan terbanyak di Gunungkidul.



Tabel 9.6. Populasi Ternak dan Unggas di DIY, 2008-2010 (ekor)

Jenis Ternak/ Unggas	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
Kuda	1 354	1 222	1.360
Sapi	269 927	283 043	290.949
Sapi perah	5 652	5 495	3.466
Kerbau	4 607	4 312	4.277
Kambing	304 780	308 353	331.147
Domba	130 775	132 872	136.657
Babi	8 766	12 038	12.695
Ayam kampung	3 925 958	3 916 636	3.861.676
Ayam ras	8 061 704	8 501 005	8.234.703
Itik	443 203	446 704	498.237

Sumber: Dinas Peternakan Provinsi DIY

Ternak dan Unggas

Beberapa hewan ternak yang cukup banyak dibudidayakan oleh penduduk di wilayah Provinsi DIY diantaranya adalah sapi, kambing, domba, kerbau dan babi. Sampai saat ini sapi masih merupakan komoditas ternak unggulan yang populasinya senantiasa bertambah. Pada tahun 2008 jumlah populasi sapi mencapai 269.267 ekor, meningkat menjadi 283.043 ekor pada tahun 2009 dan kemudian meningkat 2,79 persen menjadi 290.949 ekor pada tahun 2010.

Peningkatan jumlah populasi yang cukup tinggi terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah populasi sapi di Kabupaten Gunungkidul. Selama ini sebagian besar dari populasi sapi tersebut dibudidayakan di wilayah Gunungkidul.

Populasi kambing meningkat 7,39 persen, menjadi 331.147 ekor. Populasi babi dan itik mengalami peningkatan masing-masing 5,46 persen dan 11,54 persen, sedangkan ayam kampung dan ayam ras mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,40 persen dan 3,13 persen.

Perikanan

Provinsi DIY yang sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan lautan dan dilalui oleh beberapa jalur sungai yang cukup besar memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya perikanan, baik perikanan laut maupun perikanan darat. Namun belum dikelolanya potensi sumber daya perikanan ini secara optimal menyebabkan produktivitas perikanan laut dan darat dari tahun ke tahun masih belum mengalami kemajuan yang berarti.



Tahukah Anda?

Populasi kambing meningkat 7,39 persen, menjadi 331.147 ekor.



Potensi perikanan baik perikanan darat maupun laut memiliki prospek yang cukup baik karena potensi lahan seperti kolam, sungai dan laut yang sangat luas.

Produksi perikanan darat selama periode 2006-2010 senantiasa mengalami pertumbuhan, dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 64,75 persen. Pada tahun 2006 produksi perikanan darat mencapai 10.472 ton dan meningkat menjadi 39.033 ton pada tahun 2010. Sebanyak 97,18 persen produksi perikanan darat merupakan hasil budidaya kolam, sedangkan sisanya 0,69 persen dihasilkan dari tambak; dan 2,13 persen dari budidaya keramba, jaring apung, sawah dan telaga. Oleh karena iklim kemarau basah cukup mendukung budidaya perikanan di kolam, maka pada tahun 2010 terjadi kenaikan produksi yang sangat signifikan.

Produksi perikanan laut dari hasil penangkapan pada tahun 2006 tercatat sebesar 1.720 ton naik sedikit pada tahun 2007 menjadi 2.462 ton. Pada tahun 2008, produksi perikanan laut menurun sebesar 21,21 persen menjadi 1.939 ton. Selanjutnya, pada tahun 2009 terjadi panen raya ikan laut yang mencapai 4.238 ton. Tingginya produksi pada tahun 2009 disebabkan oleh cuaca yang kondusif bagi para nelayan, terutama di wilayah perairan Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2010 produksi ikan laut turun drastis menjadi 669 ton. Penurunan ini dikarenakan faktor cuaca yang kurang mendukung dengan banyaknya angin dan seringnya terjadi gelombang yang tinggi. Gelombang tinggi sangat beresiko bagi para nelayan dengan prasarana yang sangat terbatas (perahu kecil) untuk diarungi, sehingga perolehan tangkapan laut sangat minim.

Grafik 9.5. Produksi Perikanan Darat dan Laut di DIY, 2006-2010 (Ton)



Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi DIY

Tabel 9.7. Produksi Perikanan Darat menurut Budidaya di DIY, 2009-2010 (ton)

Jenis Budidaya	2009	2010	Pertumbuhan (%)
	(1)	(2)	
Umum	862,0	0,0	-100,0
Tambak	495,7	268,3	-45,9
Kolam	19 307,7	37 934,0	96,5
Keramba	78,4	90,8	15,8
Jaring Apung	10,0	13,2	32,3
Sawah	134,4	483,8	260,0
Telaga	79,2	242,9	206,7
Jumlah	20 967,4	39 033,0	86,2

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi DIY

Tahukah Anda?

Pada tahun 2010 produksi ikan laut turun drastis menjadi 669 ton.



Bahan galian golongan C yang berasal dari Yogyakarta adalah bahan galian yang berkualitas karena merupakan material keluaran dari Gunung Merapi.



Tabel 10.1. Nilai Tambah dan Sumbangan terhadap PDRB Sektor Pertambangan dan Energi Provinsi DIY, 2010

Sektor/ subsektor	Nilai tambah (milyar rp)	Sumbangan thd PDRB (%)
(1)	(2)	(3)
Pertambangan dan penggalian	304,66	0,67
Listrik	576,25	1,26
Air bersih	30,82	0,07

Sumber: BPS DIY

Gambar 10.1. Kegiatan Penggalian Batu Di Kulonprogo



Sumber: Evan Chandra

Tahukah Anda?

Kendati sumbangan terhadap PDRB sangat sedikit, namun sebagian penduduk mengandalkan penggalian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.



Pertambangan

Sektor pertambangan dan penggalian mencakup pertambangan migas dan non migas. Provinsi DIY tidak memiliki pertambangan migas atau non migas, namun berpotensi sebagai produsen batu, pasir atau bahan galian yang tergolong dalam golongan C. Potensi barang galian golongan C tersebut disebabkan oleh letak geografis DIY di lereng Gunung Merapi, gunung berapi paling aktif di Asia.

Nilai tambah yang diciptakan oleh sektor pertambangan dan penggalian di DIY hanya menyumbang sekitar 0,67 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena tidak adanya pertambangan migas atau non migas selain penggalian bahan galian golongan C. Kendati sumbangan terhadap PDRB sangat sedikit, namun sebagian penduduk mengandalkan sektor ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, disamping kualitas bahan galian yang dihasilkan sangat berpotensi mendukung produksi sektor lainnya, seperti konstruksi dan industri pendukung konstruksi (ubin, buis beton, dan sebagainya).

Listrik dan Air Bersih

Sama seperti sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih di DIY tidak terlampaui banyak memberikan sumbangan dalam pembentukan PDRB. Sektor ini hanya mencakup listrik dan air bersih karena tidak tersedianya produsen gas di wilayah ini.



Pada tahun 2010, sumbangan sektor listrik dan air hanya sebesar 1,33 persen terhadap PDRB, terdiri dari 1,26 persen oleh subsektor listrik dan 0,07 persen oleh subsektor air bersih.

PT PLN Divisi Regional DIY tidak memproduksi listrik sendiri, melainkan mendistribusikan listrik yang dibangkitkan di Jawa Tengah. Setiap tahun, pendistribusian tenaga listrik senantiasa meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatan ekonomi yang membutuhkan listrik sebagai sumber energinya. Pada tahun 2010 tercatat listrik yang terjual di DIY sebanyak 1.809.022.224 kilo watt jam (KWH), meningkat 6,04 persen dibandingkan listrik tersalur pada tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah pelanggan sejumlah 2,03 persen (808.593 unit), baik rumah tangga, usaha, industri dan umum (rumah sakit dan kegiatan sosial lainnya).

Jumlah pelanggan listrik terbanyak adalah rumah tangga, yakni sejumlah 92,77 persen dengan konsumsi listrik mencapai 55,31 persen dari total listrik terjual. Sedangkan usaha seperti hotel, restoran, pertokoan sebanyak 3,87 persen dengan konsumsi mencapai 20,37 persen. Umum seperti pemerintahan umum dan jasa lainnya sebanyak 0,69 persen menyerap 4,89 persen konsumsi listrik. Jumlah pelanggan paling sedikit adalah industri pengolahan (0,06 persen), namun menyerap energi listrik hingga 10,93 persen.

Tabel 10.2. Produksi, Terpasang, Terjual dan Susut Tenaga Listrik DIY, 2006-2010 (juta KWH)

Tahun	Produksi	Terpasang	Terjual	Susut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2006	1 485,73	765,03	1 355,59	130,14
2007	1 635,09	837,43	1 481,57	153,51
2008	1 733,41	837,43	1 578,45	154,96
2009	1 866,77	924,47	1 705,94	160,83
2010	1 975,73	11 467,86	1 809,02	166,70

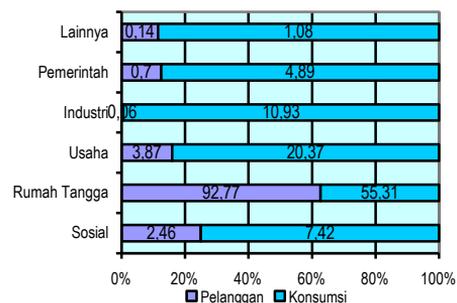
Sumber: PT PLN

Gambar 10.2. Jaringan Listrik



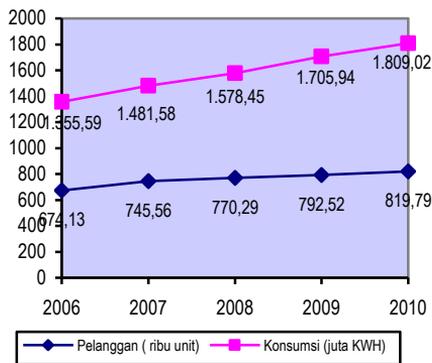
Sumber: Evan Chandra

Grafik 10.1. Distribusi Pelanggan dan Konsumsi Listrik di DIY, 2010



Pascagempa tektonik tahun 2006, jumlah pelanggan dan konsumsi listrik dari tahun ke tahun terus meningkat.

Grafik 10.2. Perkembangan Jumlah Pelanggan dan Konsumsi Listrik di DIY, 2006-2010



Sumber: DDA 2011

Tabel 10.3. Jumlah Perusahaan, Kapasitas Produksi, Sumber Air dan Tenaga Kerja Perusahaan Air Minum, 2008-2010

Rincian	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
Perusahaan	6	6	6
Kapasitas Produksi (lt/dt):			
- Potensial	2 042	2 115	2 250
- Efektif	1 638	1 577	1 811
Sumber air (000m ³):	38 866	31 779	39 150
Tenaga kerja	814	878	766

Sumber: BPS DIY

Tahukah Anda?

Potensi kapasitas produksi air bersih di DIY pada tahun 2010 tercatat 2.250 liter/detik, namun baru efektif 80,49 persen (1.811 liter/detik).



Dengan kapasitas daya yang terpasang mencapai 10.877,44 juta KWH dan jumlah listrik terjual hanya 15,68 persen, maka persediaan listrik masih berpotensi untuk didistribusikan. Hal ini menyiratkan bahwa sedikit peluang kelangkaan energi listrik di DIY, seperti masalah yang sering dialami di daerah lain, terutama di luar Jawa.

Pascagempa tektonik tahun 2006, jumlah pelanggan dan konsumsi listrik dari tahun ke tahun terus meningkat. Jumlah pelanggan dan konsumsi masing-masing 674,13 ribu unit dan 1.355,59 juta KWH pada tahun 2006 menjadi 819,79 ribu unit dan 1.809,02 juta KWH pada tahun 2010. Keadaan ini menunjukkan bahwa listrik semakin dibutuhkan, bahkan setiap unit pelanggan semakin banyak mengkonsumsi listrik.

Dari jumlah perusahaan air bersih di DIY sebanyak 6 unit, 5 di antaranya adalah badan usaha milik daerah (BUMD), atau milik pemerintah. Oleh karena menyangkut persediaan air yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, maka pengelolaan air bersih masih menjadi tanggung jawab pemerintah.

Potensi kapasitas produksi air bersih di DIY pada tahun 2010 tercatat 2.250 liter/detik, namun baru efektif 80,49 persen (1.811 liter/detik). Sumber air yang digunakan untuk masyarakat adalah dari sungai, waduk, mata air, serta air tanah dan lainnya (air hujan, dan sebagainya). Dari empat sumber air tersebut, 63,79 persen diantaranya berupa air tanah dan lainnya.

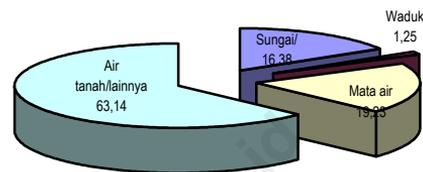


Pascagempa tektonik tahun 2006, jumlah pelanggan dan konsumsi listrik dari tahun ke tahun terus meningkat.

Jumlah air bersih yang tersalur pada tahun 2010 mencapai 39.149 ribu m³, meningkat 5,02 persen dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dapat disebabkan oleh hujan debu akibat meletusnya gunung Merapi, sehingga dibutuhkan banyak air untuk pembersihan. Dari jumlah suplai air tersebut, 49,93 persen disalurkan kepada rumah tangga. Konsumen instansi pemerintah hanya mengkonsumsi air bersih dari PDAM sebanyak 2,66 persen, hampir seimbang dengan penggunaan oleh niaga dan industri (2,13 persen). Sedangkan institusi sosial serta lainnya hanya mengkonsumsi 1,84 persen dan 0,82 persen. Yang patut disayangkan, sebagian dari suplai air bersih susut dalam penyaluran (42,61 persen). Susutnya penyaluran dapat terjadi karena kurangnya pemeliharaan infrastruktur distribusi air bersih. Sementara pemeliharaan infrastruktur membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga perlu adanya pengelolaan yang lebih intensif dalam upaya pelayanan publik yang lebih baik.

Nilai produksi (omset) yang dihasilkan air bersih dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2010 omset air bersih tercatat 74,02 milyar rupiah, meningkat 10,26 persen terhadap omset pada tahun sebelumnya yang mencapai 67,13 milyar rupiah. Dari total omset yang diperoleh, 82,51 persen berasal dari konsumen rumah tangga sebagai pengguna terbesar.

Grafik 10.3. Sumber Air Bersih di DIY, 2010 (%)



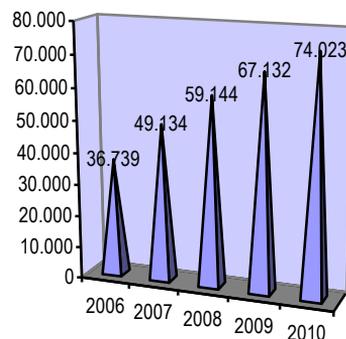
Sumber: BPS DIY

Tabel 10.4. Distribusi Air Bersih menurut Jenis Konsumen di DIY, 2008-2010 (%)

Jenis Konsumen	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Rumah tangga	49,95	51,44	49,93
2. Instansi	2,97	2,90	2,66
3. Niaga	2,15	2,22	2,05
4. Industri	0,08	0,18	0,08
5. Sosial	2,69	2,70	1,84
6. Khusus	0,28	0,38	0,82
7. Susut/Depreciation	41,87	40,19	42,61
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: DDA 2011

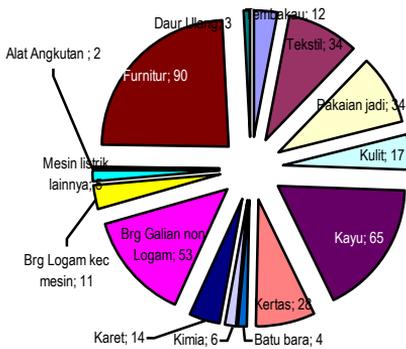
Grafik 10.4. Perkembangan Nilai Produksi Listrik di DIY, 2006-2010 (juta Rp)



Sumber: DDA 2011

Jumlah perusahaan industri besar dan sedang di DIY pada tahun 2008 sebanyak 416 unit.

Grafik 11.1. Jumlah Perusahaan Industri Besar Sedang di DIY, 2008



Sumber: BPS DIY

Tabel 11.1. Jumlah Tenaga Kerja dan Pengeluaran Tenaga Kerja Industri Besar Sedang di DIY, 2008

Golongan pokok industri	Tenaga kerja	Pengeluaran (ribu Rp)
(1)	(2)	(3)
Makanan	3 018	106 689 624
Tembakau	5 817	55 859 290
Tekstil	6 650	65 401 256
Pakaian	11 229	129 153 449
Kulit	2 638	31 028 759
Kayu	2 486	17 359 011
Kertas	2 191	34 063 082
Batu Bara	308	4 770 263
Kimia	550	9 952 105
Karet	2 064	19 055 781
Barang Galian	2 982	22 990 389
barang Logam	1 661	28 731 706
Mesin	912	9 224 214
Alat Angkutan	106	1 564 973
Furniture	9 636	79 493 121
Daur Ulang	141	664 051
Jumlah	53 297	616 001 074

Sumber: BPS DIY

Berdasarkan hasil Survei Industri Besar Sedang yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah perusahaan industri besar dan sedang terbanyak di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah perusahaan industri *furniture* dan industri pengolahan lainnya dengan jumlah perusahaan sebanyak 90 perusahaan. Sedangkan, perusahaan industri alat angkutan selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih di Provinsi DIY mempunyai jumlah perusahaan paling sedikit, yaitu sebanyak 2 perusahaan. Hasil survei tersebut mencatat jumlah perusahaan industri besar dan sedang di Provinsi DIY sebanyak 416 perusahaan industri.

Salah satu indikator yang dapat kita lihat untuk mengetahui suatu perusahaan itu merupakan perusahaan kecil, sedang, ataupun perusahaan besar adalah banyaknya jumlah tenaga kerja pada perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil survei tahunan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik di DIY jumlah tenaga kerja terbanyak pada perusahaan industri pakaian jadi dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 11.229 orang. Tenaga kerja sebanyak itu mendapat upah/gaji/balas jasa tenaga kerja sebesar Rp129,15 milyar. Sebaliknya, perusahaan alat angkutan selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih memiliki tenaga kerja paling sedikit (106 orang), dengan total upah/gaji sebesar Rp1,56 milyar. Secara keseluruhan, tercatat jumlah tenaga kerja industri besar dan sedang di DIY sebanyak 53.297 orang dan memperoleh upah/gaji/tunjangan sebesar Rp616,00 milyar.

Industri makanan dan minuman mengeluarkan biaya antara terbesar dan industri alat angkutan selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih menelan biaya terkecil.

11

Biaya input untuk perusahaan industri besar dan sedang terdiri dari biaya untuk bahan baku dan bahan penolong, biaya untuk bahan bakar pelumas, biaya untuk sewa gedung, mesin, dan alat-alat, dan biaya untuk lainnya. Untuk tahun 2008 jumlah biaya antara untuk perusahaan industri di DIY mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp3.642,98 miliar. Industri makanan dan minuman mengeluarkan biaya antara terbesar dan industri alat angkutan selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih menelan biaya terkecil.

Selain nilai input pada perusahaan juga ada nilai output. Nilai output perusahaan industri besar dan sedang terdiri dari nilai barang yang dihasilkan, tenaga listrik yang dijual, pendapatan dari jasa, selisih nilai *stock* barang setengah jadi, dan penerimaan lainnya. Nilai output perusahaan industri besar dan sedang terbesar pada tahun 2008 berasal dari perusahaan industri makanan dan minuman dengan nilai sebesar Rp1.443,26 miliar. Sebaliknya, nilai output terkecil berasal dari perusahaan industri alat angkutan selain roda empat atau lebih, yaitu sebesar Rp8,99 miliar.

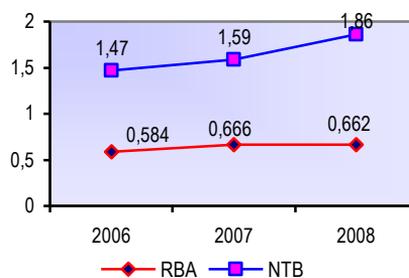
Rasio biaya antara adalah nilai input antara (biaya antara) terhadap total output dalam suatu kegiatan ekonomi. Rasio ini menunjukkan berapa besar kebutuhan input antara dalam suatu proses produksi untuk menghasilkan satu unit output. Semakin tinggi rasio biaya antara, semakin kurang efisien produk tersebut diproduksi.

Tabel 11.2. Input dan Output Industri Besar Sedang menurut Golongan, 2008 (ribu rupiah)

Golongan	Input	Output	Nilai Tambah
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan	1 224 702 379	1 443 256 052	218 553 673
Tembakau	55 750 273	129 141 715	73 391 442
Tekstil	355 059 039	476 925 445	121 866 406
Pakaian	497 435 505	1 079 046 289	581 610 784
Kulit	210 322 018	339 419 652	129 097 634
Kayu	34 283 862	65 978 721	31 694 859
Kertas	122 630 419	226 700 779	104 070 360
Batu Bara	41 049 348	66 647 362	25 598 014
Kimia	69 906 090	102 527 749	32 621 659
Karet	206 223 279	301 015 150	94 791 871
Barang Galian	97 218 480	146 445 965	49 227 485
barang Logam	393 809 482	486 501 869	92 692 387
Mesin	65 883 684	168 208 526	102 324 842
Alat Angkutan	6 259 783	8 991 963	2 732 180
Furniture	255 774 065	452 301 247	196 527 182
Daur Ulang	6 679 915	7 706 771	1 026 856
Jumlah	3 642 987 621	5 500 815 255	1 857 827 634

Sumber: BPS DIY

Grafik 11.2. Rasio Biaya Antara dan Nilai Tambah (trilyun rp) Industri Besar Sedang DIY, 2006-2008



Sumber: BPS DIY

Tahukah Anda?

Nilai output terkecil berasal dari perusahaan industri alat angkutan selain roda empat atau lebih, yaitu sebesar Rp8,99 miliar.



Dari aspek nilai tambah, industri makanan dan industri pakaian merupakan 2 golongan industri penyumbang terbesar terhadap total nilai tambah industri besar sedang DIY tahun 2008.

Tabel 11.3. Distribusi Persentase Output dan NTB Industri Besar Sedang DIY, 2008

Golongan	Dist. Output	Dist. NTB	Kelebihan Dist. NTB
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan	26,24	33,62	11,76
Tembakau	2,35	1,53	3,95
Tekstil	8,67	9,75	6,56
Pakaian	19,62	13,65	31,31
Kulit	6,17	5,77	6,95
Kayu	1,20	0,94	1,71
Kertas	4,12	3,37	5,60
Batu Bara	1,21	1,13	1,38
Kimia	1,86	1,92	1,76
Karet	5,47	5,66	5,10
Barang Galian	2,66	2,67	2,65
Barang Logam	8,84	10,81	4,99
Mesin	3,06	1,81	5,51
Alat Angkutan	0,16	0,17	0,15
Furniture	8,22	7,02	10,58
Daur Ulang	0,14	0,18	0,06
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS DIY

Gambar 11.1. Industri Gula Merah



Sumber: krjogja.com

Tahukah Anda?

Dalam proses produksi makanan jadi relatif lebih efisien penggunaan inputnya.



Rasio biaya antara periode 2006-2008 terus meningkat. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin kurang efisiennya proses produksi industri besar dan sedang di DIY. Hal ini dapat disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku di masing-masing kegiatan industri, sedangkan permintaan produk hasil industri tersebut relatif tetap.

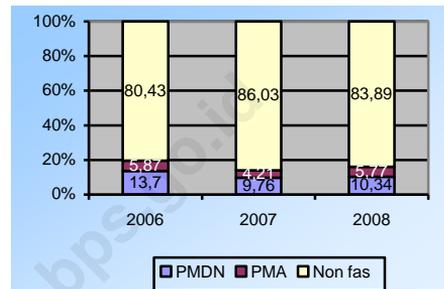
Nilai tambah merupakan nilai output yang dihasilkan setelah dikurangi dengan biaya antara. Semakin besar rasio biaya antara, semakin sedikit nilai tambah yang dihasilkan. Dari Grafik 11.2 tampak bahwa perubahan sedikit rasio biaya antara dapat memicu penurunan nilai tambah yang cukup besar. Dari aspek nilai tambah, industri makanan dan industri pakaian merupakan 2 golongan industri penyumbang terbesar terhadap total nilai tambah industri besar sedang DIY tahun 2008. Hal itu searah dengan distribusi outputnya. Namun bila diperhatikan dalam hal besaran sumbangannya, andil nilai tambah industri pakaian mencapai 13,65 persen. Sedangkan sumbangan terhadap output mencapai 19,62 persen. Artinya, secara relatif, ada potensi kehilangan nilai tambah industri pakaian akibat tingginya biaya antara. Sebaliknya, industri makanan yang menyumbang output sebesar 26,24 persen, nilai tambahnya mampu menyumbang 33,62 persen. Artinya, dalam proses produksi makanan jadi relatif lebih efisien penggunaan inputnya. Demikian pula halnya dengan industri tekstil dan industri furniture. Keempat golongan industri tersebut merupakan industri unggulan DIY.

Jumlah industri besar dan sedang di DIY sebagian besar masih berupa non fasilitas, yakni sejumlah 388 perusahaan.

Status permodalan perusahaan industri bisa berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN), penanaman modal asing (PMA), dan non fasilitas. Jumlah industri besar dan sedang di DIY sebagian besar masih berupa non fasilitas, yakni sejumlah 388 perusahaan. Distribusi industri besar sedang dengan status modal non fasilitas dalam kurun waktu 2006-2008 berfluktuasi, namun kecenderungannya semakin besar, demikian juga distribusi industri PMA juga fluktuatif tetapi cenderung semakin berkurang. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa kemandirian perusahaan industri di DIY semakin baik. Namun patut menjadi perhatian pemerintah provinsi untuk merangsang minat investastor asing yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi namun tetap berpihak pemerataan dan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Jumlah industri kecil berlisensi yang dicatat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2010 sebanyak 78.122 unit dan menyerap 292.625 orang tenaga kerja. Menurut kelompok komoditas produk, industri pengolahan pangan serta industri kerajinan dan umum sangat berpotensi dengan jumlah 35.648 unit dan 21.593 unit. Kedua kelompok industri tersebut dapat menyerap 119.418 orang tenaga kerja dan 70.682 orang. Industri pengolahan pangan yang paling banyak adalah industri gula merah/jawa yang cukup berkembang di Kabupaten Kulonprogo.

Grafik 11.3. Distribusi Industri Besar Sedang menurut Status Permodalan di DIY, 2006-2008 (%)



Sumber: BPS DIY

Tabel 11.4. Industri Kecil Berlisensi di DIY, 2010

Kelompok	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)
a. Pengolahan Pangan	35 648	119 418
b. Sandang dan Kulit	4 433	23 597
c. Kimia & Bahan Bangunan	12 196	66 779
d. Kerajinan dan Umum	21 593	70 682
e. Logam dan Jasa	4 252	12 149
Jumlah	78 122	292 625

Sumber: Dinas Perindustrian DIY

Tahukah Anda?

Sebaliknya, nilai output terkecil berasal dari perusahaan industri alat angkutan selain roda empat atau lebih, yaitu sebesar Rp8,99 miliar.



Sumbangan sektor konstruksi terhadap PDRB mencapai 10,70 persen pada tahun 2009.

Tabel 12.1. Jumlah Perusahaan Konstruksi, Tenaga Kerja, Nilai Konstruksi di DIY, 2005-2009

Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja Tetap (orang)	Nilai Konstruksi (milyar rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2005	1 155	4 780	1 184,26
2006	1 081	3 335	1 081,63
2007	1 033	3 419	987,90
2008	1 098	3 567	1 839,59
2009	1 234	3 312	1 456,54

Sumber: Statistik Indonesia 2010

Gambar 12.1. Kegiatan Konstruksi di DIY



Sumber: Evan Chandra

Tahukah Anda?

Perusahaan Konstruksi di Provinsi DIY sebanyak 1.234 perusahaan pada tahun 2009.



Konstruksi merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup kegiatan pembangunan baik bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal (kantor, pabrik, dan sebagainya), pembangunan jalan, jembatan, instalasi listrik, ac, dan lain-lain. Kegiatan konstruksi, dalam perkembangannya senantiasa tumbuh dan memberikan andil yang cukup signifikan. Sumbangannya terhadap PDRB DIY mencapai 10,70 persen pada tahun 2009. Dalam kurun waktu 2005-2009, konstruksi DIY mengalami pertumbuhan nilai tambah rata-rata 8,36 persen per tahun.

Perusahaan konstruksi di DIY pada tahun 2009 sebanyak 1.234 perusahaan, meningkat 12,39 persen dibanding jumlah perusahaan pada tahun sebelumnya yang sejumlah 1.098 unit. Peningkatan jumlah perusahaan tidak selalu menjamin adanya peningkatan kegiatan konstruksi di wilayah penelitian. Hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan bahwa kegiatan konstruksi tertentu di wilayah kajian harus dilakukan oleh perusahaan konstruksi setempat. Sudah banyak terjadi bahwa perusahaan konstruksi yang berdomisili di wilayah DIY mendapat order proyek di luar DIY.

Oleh karena PDRB sektor konstruksi dihitung berdasarkan nilai bangunan yang dibangun di wilayah kajian, tidak tergantung di mana posisi perusahaan konstruksinya, maka nilai tambah yang diperoleh karena adanya pembangunan di wilayah tersebut dapat berbeda dengan nilai konstruksi yang dibangun oleh perusahaan setempat.

Komposisi penguasaan tempat tinggal lebih bervariasi di perkotaan daripada di pedesaan, karena faktor pendidikan, urbanisasi, ekonomi, dan sebagainya.

Dari data Susenas diperoleh persentase rumah tangga menurut status penggunaan bangunan tempat tinggal. Pada tahun 2010 tercatat status penguasaan tempat tinggal milik sendiri sebanyak 74,50 persen rumah tangga. Berikutnya mereka yang kontrak, sewa dan tinggal di rumah orangtua masing-masing sebanyak 7,99 persen; 8,96 persen; dan 5,79 persen. Rumah tangga yang tinggal dengan status penggunaan tempat tinggal lainnya paling sedikit (0,23 persen).

Meskipun sama-sama didominasi oleh rumah tangga yang menguasai rumah milik sendiri, namun persentase rumah tangga yang tinggal di pedesaan jauh lebih banyak lagi (94,79 persen). Di perkotaan, penduduk cenderung lebih bervariasi, dengan mereka yang kontrak (11,63 persen), sewa (13,04 persen), dan sebagainya.

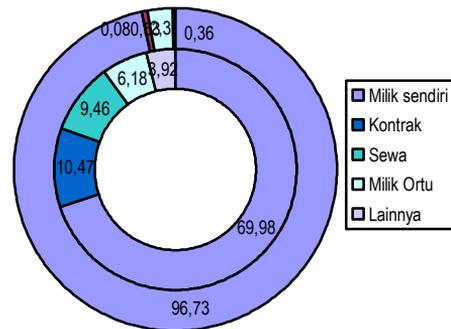
Penguasaan tempat tinggal di wilayah-wilayah sentra pendidikan yang umumnya dipadati oleh mahasiswa yang kontrak/sewa, menunjukkan variasi yang lebih tinggi juga. Disamping itu, sebagian penduduk adalah pelaku urbanisasi, datang ke kota untuk berusaha atau mengadu nasib, umumnya mereka menyewa tempat tinggal sesuai kemampuannya. Sebagai contoh, banyak terdapat penduduk Kabupaten Gunungkidul yang berdomisili di Kota Yogyakarta dengan mengkontrak rumah bersama-sama untuk mencari nafkah, seperti berjualan bakso, rujak, dan sebagainya. Pada hari-hari libur sebagian di antara mereka mengisi liburan dengan pulang kampung.

Grafik 12.1. Persentase Rumah Tangga menurut Penguasaan Tempat Tinggal, 2008-2010

Penguasaan Tempat Tinggal	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
Milik Sendiri	74,17	78,93	74,5
Kontrak	8,83	7,14	7,99
Sewa	6,87	6,32	8,96
Milik ortu	7,66	4,88	5,79
Lainnya	2,47	2,73	2,76
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2008-2010

Grafik 12.2. Persentase Rumah Tangga menurut Penguasaan Tempat Tinggal dan Daerah, 2010



Keterangan: Lingkaran dalam daerah perkotaan, lingkaran luar daerah pedesaan

Sumber: Susenas 2010

Tahukah Anda?

Di perkotaan, penduduk cenderung lebih bervariasi, dengan mereka yang kontrak (11,63 persen), sewa (13,04 persen), dan sebagainya.



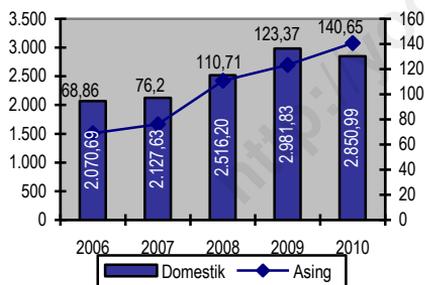
Kunjungan wisatawan baik domestik maupun asing cenderung semakin meningkat dengan semakin besarnya perhatian pemerintah provinsi/kabupaten/kota

Tabel 13.1. Jumlah Akomodasi dan Kamar menurut Golongan Hotel, 2006-2010

Tahun	Bintang		Non Bintang	
	Akomo-dasi	Kamar	Akomo-dasi	Kamar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2006	37	3 458	1 046	11 307
2007	38	3 458	1 039	11 307
2008	34	3 297	1 095	12 158
2009	34	3 373	1 092	12 091
2010	36	3 631	1 098	12 519

Sumber: BPS DIY

Grafik 13.1. Kunjungan Wisatawan ke DIY, 2006-2010



Sumber: BPS DIY

Tahukah Anda?

Jumlah akomodasi baik hotel bintang maupun non bintang di DIY mengalami kenaikan dibanding tahun 2009.



Misi pembangunan bidang pariwisata adalah untuk meningkatkan perannya dalam kegiatan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja serta kesempatan berusaha dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan penerimaan devisa. Keberhasilan pembangunan pariwisata di suatu wilayah dapat dilihat dari peningkatan jumlah akomodasi dan kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara. Selain itu, tingkat penghunian kamar hotel dan rata-rata menginap tamu hotel juga merupakan indikator penting yang menggambarkan perkembangan bidang pariwisata.

Pada tahun 2010 jumlah hotel bintang mengalami kenaikan menjadi 36 unit, yang pada tahun sebelumnya hanya 34 unit, dengan jumlah kamar juga meningkat dari 3.373 kamar menjadi 3.631 kamar. Demikian halnya dengan jumlah hotel non bintang/akomodasi lainnya juga naik sebanyak 6 unit, menjadi 1.098 unit, dengan jumlah kamar naik menjadi 12.519 kamar.

Kunjungan Wisatawan

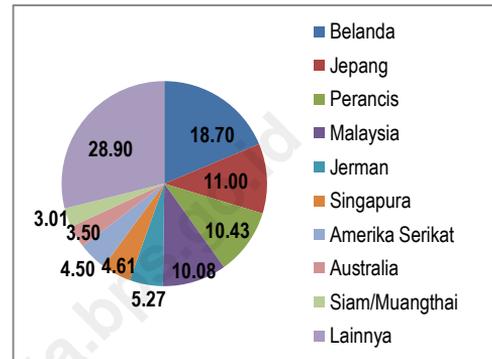
Provinsi DIY dikenal sebagai daerah yang memiliki beraneka macam kekayaan wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya. Jumlah kunjungan wisatawan mendekati dari banyaknya tamu yang menginap di hotel-hotel dalam wilayah Provinsi DIY. Pada tahun 2010, banyaknya tamu yang menginap di hotel mencapai 2,99 juta orang, terdiri dari 2,85 juta wisatawan domestik dan 140,65 ribu wisatawan asing. Kunjungan wisatawan domestik selalu lebih banyak daripada wisatawan asing.

Kunjungan wisatawan asing ke DIY terutama berasal dari Belanda, Malaysia, Jepang dan Perancis.

Pada tahun 2010, pangsa kunjungan wisatawan domestik mencapai 95,30 persen dan wisatawan asing sebesar 4,70 persen. Dibandingkan tahun 2009 kunjungan wisatawan domestik mengalami penurunan sebesar 4,68 persen. Sebaliknya, pangsa kunjungan wisatawan asing mengalami kenaikan 14,01 persen. Jika dilihat dari negara asal wisatawan asing, kunjungan wisatawan asing yang paling banyak berasal dari Belanda (18,70 persen), diikuti oleh wisatawan dari Jepang (11,00 persen), Perancis (10,43 persen) dan Malaysia (10,08 persen). Wisatawan yang berasal dari Belanda dari tahun ke tahun selalu terbanyak, dikarenakan adanya nilai historis, dimana Belanda pernah menduduki Indonesia dalam kurun waktu yang sangat lama.

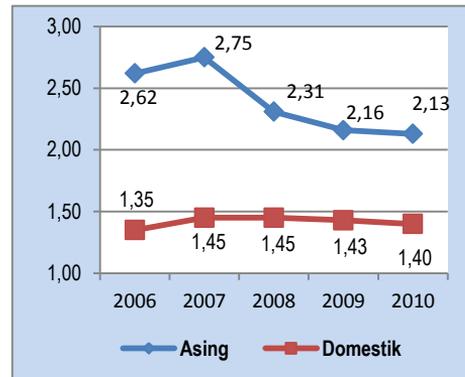
Kendati jumlah wisatawan asing lebih sedikit dibanding jumlah wisatawan domestik, namun rata-rata lama menginap di hotel DIY ternyata lebih lama. Pada periode tahun 2006-2010, rata-rata lama menginap wisatawan asing berkisar antara 2,13 sampai 2,75 malam. Sedangkan dalam kurun waktu tersebut, rata-rata lama menginap wisatawan domestik hanya sekitar 1,35 hingga 1,45 malam. Pada tahun 2006 dan 2007 tampak ada peningkatan rata-rata lama menginap, terutama bagi wisatawan asing, karena saat itu banyak kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pascagempa yang mendapat pengawasan langsung dari luar negeri. Perkembangan rata-rata lama menginap wisatawan domestik relatif landai, karena banyak relawan yang cukup menginap bersama masyarakat setempat, bahkan di tenda-tenda darurat.

Grafik 13.2. Pangsa Asal Wisatawan Asing yang mengunjungi DIY, 2010 (%)



Sumber: Dinas Pariwisata DIY

Grafik 13.3. Rata-rata Lama Menginap Wisatawan di Hotel/Akomodasi DIY, 2006-2010 (malam)



Tahukah Anda?

Rata-rata lama menginap wisatawan asing di DIY sekitar 2 malam atau lebih.



Dengan semakin besarnya minat wisatawan, sedangkan jumlah hotel berbintang yang terbatas, maka tingginya permintaan akomodasi dipenuhi dengan menginap di hotel/akomodasi non bintang.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel

TPK hotel merupakan salah satu indikator di bidang pariwisata yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat produktivitas hotel. TPK hotel dihitung dengan cara membagi jumlah kamar yang terjual dengan jumlah kamar yang tersedia, dikalikan 100 persen. Semakin tinggi TPK hotel menunjukkan semakin tinggi pula tingkat produktivitas hotel.

TPK hotel di Provinsi DIY selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan semakin meningkat. Pada tahun 2006, TPK hotel mencapai 23,07 persen, naik menjadi 29,11 persen pada tahun 2007. Tahun 2008 dan tahun 2009, TPK hotel semakin meningkat menjadi 35,73 persen dan 36,94 persen. Pada tahun 2010, TPK hotel sedikit mengalami penurunan menjadi 35,34 persen, yang berarti dari 100 kamar yang tersedia sebanyak 35 kamar dipakai setiap malamnya. Jika dilihat pada masing-masing kategori hotel, TPK hotel bintang mencapai 48,83 persen dan untuk hotel non bintang sebesar 31,59 persen.

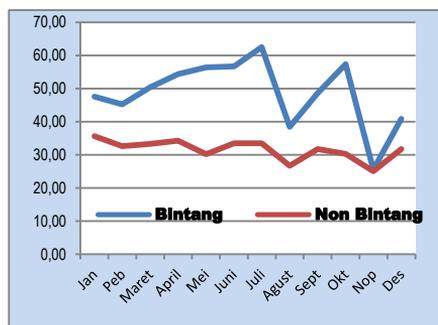
Minat para wisatawan yang semakin tinggi untuk mengunjungi DIY mendorong tingginya TPK hotel. Selama tahun 2010, TPK hotel setiap bulannya mengalami fluktuasi yang cukup tajam, terutama untuk hotel bintang. TPK tertinggi terjadi pada bulan Juli sebesar 62,55 persen dan terendah terjadi pada bulan November yang hanya sebesar 25,57 persen. Sedangkan untuk hotel non bintang, TPK hotel tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 35,65 persen dan terendah pada bulan November sebesar 25,04 persen.

Tabel 13.2. Tingkat Penghunian Kamar Hotel menurut Golongan Hotel di DIY, 2006-2010

Tahun	Bintang	Non Bintang	B + NB
(1)	(2)	(3)	(4)
2006	37,86	19,51	23,07
2007	45,85	24,17	29,11
2008	49,26	30,97	35,73
2009	49,44	33,66	36,94
2010	48,83	31,59	35,34

Sumber: BPS DIY

Grafik 13.4. Perkembangan TPK Hotel Bulanan di DIY, 2010



Sumber: BPS DIY

Tahukah Anda?

TPK hotel tertinggi DIY terjadi pada bulan Juli dan terendah terjadi pada bulan November.



Aset perbankan pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan 18,80 persen, yakni dari Rp24.572 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp29.191 miliar pada tahun 2010.

Kelembagaan

Jumlah bank di DIY pada tahun 2010 sebanyak 97 unit dengan jumlah kantor 533 unit. Jumlah bank terdiri dari 4 bank pemerintah, 28 bank swasta nasional, 1 bank pembangunan daerah, serta 64 bank perkreditan rakyat. Jika dibandingkan dengan jumlah bank pada tahun sebelumnya, terjadi penambahan 2 unit bank dan jumlah kantor bertambah 39 unit.

Perkembangan Perbankan

Aset perbankan pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan 18,80 persen, yakni dari Rp24.572 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp29.191 miliar pada tahun 2010. Pertumbuhan ini lebih cepat daripada pertumbuhannya pada tahun 2009 yang mencapai 17,46 persen. Pada sisi pasiva, pertumbuhan aset terutama dari dana pihak ketiga, sedangkan pada sisi aktiva dari penyaluran kredit.

Dana pihak ketiga perbankan DIY mengalami pertumbuhan sebesar 16,46 persen, menjadi Rp22.919 miliar pada tahun 2010. Penghimpunan dana terbesar dari tabungan (51,46%). Sedangkan simpanan berjangka dan giro masing-masing 35,01 persen dan 13,53 persen.

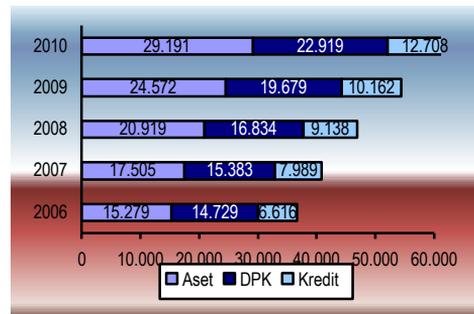
Pertumbuhan kredit perbankan pada tahun 2010 sebesar 25,05 persen dengan jenis penggunaan terbesar untuk konsumsi (45,61%). Sedangkan yang digunakan untuk modal kerja dan investasi masing-masing 38,39 persen dan 16,00 persen. Secara sektoral, penggunaan kredit sebagian besar untuk lainnya (54,51%).

Tabel 14.1. Jumlah Bank dan Kantor Bank di DIY, 2010

Status	Bank	Kantor	Pertumbuhan Kantor Bank (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Bank Pemerintah	4	117	14,71
Bank Swasta Nasional	28	144	1,41
Bank Pembangunan Daerah	1	137	0,74
Bank Perkreditan Rakyat	64	135	18,42
Jumlah	97	533	7,89

Sumber: BI Yogyakarta

Grafik 14.1. Jumlah Dana Pihak Ketiga, dan Kredit Tersalur Bank di DIY, 2010



Sumber: BI Yogyakarta

Tahukah Anda?

Jenis penggunaan kredit perbankan sebagian besar untuk konsumsi (48,21%), yang digunakan untuk modal kerja dan investasi masing-masing



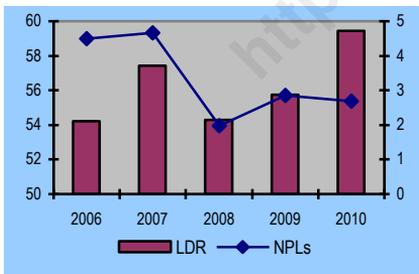
Meningkatnya LDR disebabkan oleh semakin kondusifnya perekonomian DIY juga disinyalir adanya ketentuan LDR minimal 78 persen (PBI 12/19/2010) yang mendorong perbaikan kinerja penyaluran kreditnya.

Tabel 14.2. Kredit Perbankan menurut Jenis Penggunaan, 2006-2010 (Miliar Rp)

Tahun	Jenis Penggunaan		
	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi
(1)	(2)	(3)	(4)
2006	2 596	1 063	2 957
2007	3 258	1 132	3 599
2008	3 878	1 162	4 098
2009	4 010	1 360	4 792
2010	4 879	2 033	5 796

Sumber: BI Yogyakarta

Grafik 14.2. Perkembangan Loan to Deposit Ratio dan Non Performing Loans Perbankan DIY, 2006-2010 (%)



Sumber: BI Yogyakarta

Tahukah Anda?

Non performing loans DIY masih cukup terkendali dengan nilai 2,68 persen, masih di bawah batas 5 persen.



Fungsi intermediasi perbankan semakin baik, terlihat dari *loan to deposit ratio* (LDR) yang lebih tinggi dibanding tahun 2009, yakni sebesar 59,45 persen. Meningkatnya LDR disebabkan oleh semakin kondusifnya perekonomian DIY juga disinyalir adanya ketentuan LDR minimal 78 persen (PBI 12/19/2010) yang mendorong perbaikan kinerja penyaluran kreditnya.

Non performing loans (NPLs) yang merupakan indikator resiko kredit perbankan menunjukkan adanya penurunan 0,18 poin menjadi 2,68 persen. Angka tersebut masih tergolong aman karena di bawah batas 5 persen. Semakin rendahnya NPLs menunjukkan lancarnya pembayaran kredit perbankan, artinya semakin kecil resiko perbankan dalam penyaluran kreditnya.

Investasi

Investasi adalah pengorbanan materi maupun non materi pada masa sekarang untuk memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Menurut pelaku investasi dikelompokkan menjadi 3, yaitu oleh Pemerintah, perusahaan (terdiri dari perusahaan yang difasilitasi dan tidak difasilitasi), serta oleh rumah tangga. Data investasi oleh perusahaan yang paling sering digunakan adalah data perencanaan dan realisasi penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang merupakan kelompok investasi yang difasilitasi, yang dilaporkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi DIY.



Realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) secara kumulatif di DIY mencapai Rp1,88 triliun yang dilaksanakan oleh 118 perusahaan dan menyerap 22.941 orang tenaga kerja Indonesia dan 13 orang tenaga kerja asing.

Pada tahun 2010 realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) secara kumulatif di DIY mencapai Rp1,88 triliun yang dilaksanakan oleh 118 perusahaan dan menyerap 22.941 orang tenaga kerja Indonesia dan 13 orang tenaga kerja asing. Jika dibandingkan dengan perencanaannya yang senilai Rp2,60 triliun, maka penanaman modal tersebut baru mencapai 72,53 persen. Capaian realisasi penanaman modal tersebut lebih rendah dibandingkan dengan capaian realisasi penanaman modal tahun 2009 yang 74,47 persen.

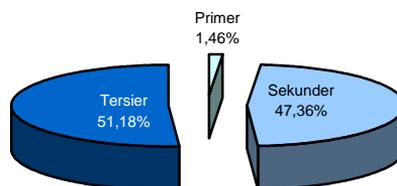
Menurut kelompok sektor, realisasi PMDN terbesar di DIY pada kelompok sektor tersier (bangunan; hotel dan restoran; perdagangan; perumahan; pengangkutan; jasa lainnya; listrik, gas dan air minum), yakni 51,41 persen dari total realisasi PMDN. Investor domestik lebih berminat menanamkan modalnya di sektor hotel dan restoran (34,15%). Kemudian diikuti oleh sektor industri tekstil (34,09%) dan jasa lainnya (14,58%). DIY dalam skala nasional sebagai daerah tujuan wisata kedua sesudah Bali, cukup potensial dalam pengembangan kegiatan hotel dan restoran, sehingga para investor lebih tertarik berinvestasi pada sektor tersebut. Sedangkan industri tekstil mendukung tumbuh pesatnya industri batik yang merupakan produk andalan DIY, terutama pascapenetapan batik sebagai karya seni Indonesia. Investasi jasa lainnya yang berkembang di DIY terutama terkait jasa pendukung perkembangan dunia pendidikan.

Tabel 14.3. Realisasi PMDN di DIY menurut Sektor, 2010

Sektor	Perusahaan	Nilai (juta Rp)	TKI	TKA	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Primer	7	27 572,51	146	0	46,36
1. Tan. Pangan	1	1 029,00	60	0	31,66
2. Perkebunan	1	105,84	8	0	2,95
3. Peternakan	3	25 287,67	40	0	50,18
4. Perikanan	1	400,00	0	0	26,67
5. Kehutanan	0	0,00	0	0	-
6. Pertambangan	1	750,00	38	0	100,00
Sekunder	41	891 545,01	16 608	6	96,29
1. Industri Makanan	10	72 747,04	2 805	0	63
2. Industri Tekstil	18	642 641,20	8 965	3	188
3. Industri Kayu	0	0,00	0	0	0
4. Industri Kertas	1	443,88	57	0	204
5. Industri Farmasi	0	0,00	0	0	0
6. Industri Kimia	1	231,56	16	0	1
7. Industri Mineral Non Logam	0	0,00	0	0	0
8. Industri Logam Dasar	1	1 547,56	2	0	55
9. Industri Barang Logam	3	14 278,94	1 261	0	80
10. Industri Lainnya	15	156 430,35	3 162	3	33
Tersier	62	969 032,82	6 527	7	62,40
1. Bangunan	0	0,00	0	0	0,00
2. Hotel dan Restoran	22	643 773,20	2 751	4	105,67
3. Perdagangan	2	13 611,62	584	1	40,83
4. Perumahan	0	0,00	0	0	0,00
5. Pengangkutan	28	35 530,03	1 660	2	83,54
6. Jasa Lainnya	9	274 792,97	1 498	0	32,54
7. Listrik, Gas, Air Minum	1	1 325,00	34	0	12,93
Jumlah	118	1 884 925,87	22 941	13	72,53

Sumber: BKPM Provinsi DIY

Grafik 14.3. Distribusi Realisasi PMDN menurut Kelompok Sektor di DIY, 2009



Sumber: BKPM Provinsi DIY

Senada dengan investor dalam negeri, para investor asingpun lebih berminat untuk berinvestasi di sektor hotel dan restoran.



Tabel 14.4. Realisasi PMA di DIY menurut Sektor, 2010

Sektor	Perusahaan	Nilai (juta Rp)	TKI	TKA	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Primer	4	36 212,01	197	11	26,63
1. Tan. Pangan	1	1 823,45	65	2	18,24
2. Perkebunan	1	18 180,00	18	3	0,00
3. Peternakan	1	15 526,81	110	6	17,46
4. Perikanan	1	681,75	4	0	5,25
5. Kehutanan	0	0,00	0	0	0,00
6. Pertambangan	0	0,00	0	0	0,00
Sekunder	36	479 306,17	10 892	44	50,35
1. Industri Makanan	1	19 145,72	215	5	73,74
2. Industri Tekstil	8	112 581,73	5 045	15	107,10
3. Industri Kayu	0	0,00	0	0	0,00
4. Industri Kertas	0	0,00	0	0	0,00
5. Industri Farmasi	0	0,00	0	0	0,00
6. Industri Kimia	1	23 291,00	127	0	206,26
7. Industri Mineral Non Logam	0	0,00	0	0	0,00
8. Industri Logam Dasar	2	9 745,61	75	0	39,52
9. Industri Barang Logam	0	0,00	0	0	0,00
10. Industri Lainnya	24	314 542,10	5 430	24	40,18
Tersier	52	2 195 494,31	4 782	58	80,61
1. Bangunan	0	0,00	0	0	0,00
2. Hotel dan Restoran	7	608 926,65	1 065	11	82,97
3. Perdagangan	31	587 139,77	3 303	32	0,00
4. Perumahan	0	0,00	0	0	0,00
5. Pengangkutan	3	3 218,50	9	1	42,72
6. Jasa Lainnya	10	995 836,88	312	14	69,96
7. Listrik, Gas, Air Minum	1	372,51	93	0	7,05
Jumlah	92	2 711 012,49	15 871	113	49,77

Sumber: BKPM Provinsi DIY

Realisasi kumulatif penanaman modal asing (PMA) pada tahun 2010 mencapai 166.28 juta US\$ dan Rp1,20 triliun, atau bila dikurs dalam rupiah mencapai Rp2,71 triliun. Realisasi kumulatif PMA tersebut dilaksanakan oleh 92 perusahaan dengan serapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 15.871 orang dan tenaga kerja asing 113 orang. Jika dibandingkan dengan perencanaannya, realisasi PMA ini masih sebesar 49,77 persen.

Distribusi realisasi PMA terbesar pada sektor jasa lainnya yang mencapai 36,73 persen. Kemudian diikuti oleh sektor hotel dan restoran sebesar 22,46 persen; sektor perdagangan 21,66 persen; serta sektor industri lainnya mencapai 11,60 persen. Senada dengan investor dalam negeri, para investor asingpun lebih berminat untuk berinvestasi di sektor hotel dan restoran. Kunjungan wisatawan yang menunjukkan tren positif menjadi daya tarik yang direalisasikan dalam investasi tersebut.

Realisasi PMDN meningkat 0,13 persen, yakni Rp1.882,51 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp1.884,93 miliar pada tahun 2010. Sedangkan realisasi PMA justru menurun sebesar 1,10 persen, yakni Rp2.741,20 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp2.711,01 miliar pada tahun 2010. Baik PMDN maupun PMA pada tahun 2010 mampu menyerap 38.812 orang tenaga kerja, atau meningkat sebesar 1,51 persen. Masih adanya peningkatan investasi ini menunjukkan bahwa DIY merupakan daerah yang cukup kondusif untuk dikembangkan bagi penyediaan lapangan kerja.

Tahukah Anda?

Baik PMDN maupun PMA pada tahun 2010 mampu menyerap 38.812 orang tenaga kerja, atau meningkat sebesar 1,51 persen.



Untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dari waktu ke waktu, maka perlu dilakukan penghitungan indeks harga secara kontinu.

Harga barang-barang kebutuhan pokok yang stabil merupakan salah satu indikasi stabilnya perekonomian di wilayah tersebut. Untuk itu harga perlu dipantau perkembangannya, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu indikator penentu kebijakan ekonomi makro pemerintah, terutama di bidang moneter, misalnya untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan penetapan tingkat suku bunga bank. Untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dari waktu ke waktu, maka perlu dilakukan penghitungan indeks harga secara kontinu. Beberapa indeks harga yang sering digunakan diantaranya adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk wilayah perkotaan dan Nilai Tukar Petani (NTP) untuk wilayah pedesaan.

Indeks Harga Konsumen

Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Yogyakarta pada tahun 2010 (2007=100) berada pada posisi 125,25. Angka ini mengandung arti bahwa dibandingkan dengan tahun 2007 komoditas barang dan jasa kebutuhan rumah tangga pada tahun 2010 secara umum telah mengalami kenaikan harga rata-rata sebesar 25,25 persen. IHK tertinggi menurut kelompok pengeluaran terjadi pada kelompok bahan makanan dengan angka indeks mencapai 151,24 dan disusul oleh kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau dengan IHK sebesar 126,96. Sedangkan IHK terendah terjadi pada kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 107,71 persen.

Gambar 15.1. Pemantauan Harga di Pasar Tradisional Kota Yogyakarta



Sumber: BPS DIY

Tabel 15.1. IHK dan Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2010

Bulan	IHK Umum	Inflasi Umum
(1)	(2)	(3)
Januari	117,30	0,57
Pebruari	117,66	0,31
Maret	117,81	0,13
April	118,10	0,25
Mei	118,26	0,14
Juni	119,75	1,26
Juli	121,43	1,40
Agustus	121,95	0,43
September	123,24	1,06
Oktober	123,58	0,28
Nopember	124,35	0,62
Desember	125,25	0,72

Sumber: BPS DIY

Tahukah Anda?

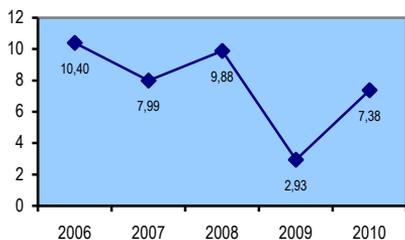
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Yogyakarta pada tahun 2010 (2007=100) berada pada posisi 125,25.



Pada tahun 2010 laju inflasi kembali mengalami kenaikan yaitu mencapai 7,38 persen. Melonjaknya harga bahan makanan pokok sebagai akibat anomali musim di tahun 2010 merupakan pemicu utama terjadinya inflasi di kota Yogyakarta.



Grafik 15.1. Inflasi Kota Yogyakarta 2006-2010



Sumber: BPS DIY

Tabel 15.2. IHK dan Inflasi menurut Kelompok Pengeluaran, 2010

Kelompok Pengeluaran	IHK Des 2009	IHK Des 2010	Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Umum	116,64	125,25	7,38
Bahan Makanan	127,24	151,24	18,86
Makanan Jadi	120,37	126,96	5,47
Perumahan	118,34	124,84	5,49
Sandang	119,19	125,64	5,41
Kesehatan	112,27	114,48	1,97
Pendidikan	114,49	119,36	4,25
Transpor & Komunikasi	102,03	107,71	5,57

Sumber: BPS DIY

Perubahan IHK antar periode digambarkan oleh besaran angka inflasi/ deflasi. Laju inflasi Kota Yogyakarta selama periode 2006-2010 mengalami perubahan yang fluktuatif. Pada tahun 2006 laju inflasi mencapai 10,40 persen, tahun 2007 turun menjadi 7,99 persen kemudian naik lagi pada tahun 2008 menjadi 9,88 persen. Pada tahun 2009 Kota Yogyakarta mengalami inflasi terkecil sejak 20 tahun terakhir, yaitu sebesar 2,93 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah yang menurunkan harga BBM hingga 2 kali, yaitu pada bulan Desember 2008 dan Januari 2009, sehingga berakibat pada turunnya tarif angkutan umum dan stabilnya harga kebutuhan pokok masyarakat.

Pada tahun 2010 laju inflasi kembali mengalami kenaikan yaitu mencapai 7,38 persen. Melonjaknya harga bahan makanan pokok sebagai akibat anomali musim di tahun 2010 merupakan pemicu utama terjadinya inflasi di kota Yogyakarta. Komoditas beras dan cabe merupakan komoditas yang memberikan andil yang cukup besar terhadap inflasi umum di kota Yogyakarta pada kurun waktu tersebut. Laju inflasi tertinggi pada tahun 2010 terjadi pada kelompok bahan makanan yang mencapai 18,86 persen, kemudian diikuti oleh kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 5,57 persen dan kelompok perumahan sebesar 5,49 persen. Sedangkan laju inflasi terendah terjadi pada kelompok kesehatan dengan angka sebesar 1,97 persen.

Tahukah Anda?

Ketika inflasi di Kota Yogyakarta lebih tinggi dari Kota Jakarta, tidak berarti harga barang kebutuhan pokok di Kota Yogyakarta lebih mahal dari harga di Kota Jakarta, karena inflasi digunakan untuk melihat perkembangan harga antar waktu di suatu daerah, bukan antar daerah.



Indeks harga yang diterima petani (It) di Provinsi DIY pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 10,14 persen menjadi 142,47 dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 129,36.

Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, yaitu dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. NTP dihitung dengan membandingkan indeks harga yang diterima petani (It) dan yang dibayar petani (Ib). Sedangkan penghitungan indeks harga yang diterima (It) dan yang dibayar (Ib) petani menggunakan formula indeks Laspeyres yang dimodifikasi (*modified Laspeyres Index*). Semakin tinggi NTP di suatu daerah akan menggambarkan bahwa, tingkat kesejahteraan petani di daerah tersebut juga semakin baik.

Indeks harga yang diterima petani (It) di Provinsi DIY pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 10,14 persen menjadi 142,47 dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 129,36. Kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok hortikultura, yaitu sebesar 14,26 persen dimana kelompok sayur-sayuran naik 16,27 persen dan kelompok buah-buahan naik 13,35 persen. Kelompok tanaman pangan naik sebesar 11,83 persen yang terdiri dari kenaikan kelompok padi sebesar 14,94 persen dan kelompok palawija sebesar 10,39 persen. Sedangkan kelompok perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan juga mengalami kenaikan indeks masing-masing sebesar 10,79 persen, 1,61 persen dan 5,41 persen.

Tabel 15.3. Indeks Harga Yang Diterima Petani DIY, 2009-2010

Kelompok Komoditas	Desem-ber 2009	Desem-ber 2010	Perub. (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Diterima Petani	129,36	142,47	10,14
Tanaman Pangan	127,02	142,04	11,83
-Padi	119,46	137,31	14,94
-Palawija	130,85	144,44	10,39
Hortikultura	137,91	157,57	14,26
-Sayur-sayuran	144,14	167,59	16,27
-Buah-buahan	135,27	153,33	13,35
Perkebunan Rakyat	136,84	151,62	10,79
Peternakan	130,24	132,34	1,61
-Ternak Besar	118,14	111,84	-5,34
-Ternak Kecil	126,58	122,41	-3,30
-Unggas	143,44	156,91	9,39
-Hasil Ternak	139,23	146,95	5,54
Perikanan	128,12	135,05	5,41
-Penangkapan	115,71	122,03	5,46
-Budidaya	132,54	139,69	5,40

Sumber: BPS DIY

Tabel 15.4. Indeks Harga Yang Dibayar Petani DIY, 2009-2010

Kelompok Komoditas	Desem-ber 2009	Desem-ber 2010	Perub. (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Dibayar Petani	118,86	125,30	5,46
Konsumsi Rmhtangga	118,86	126,16	6,13
-Bahan Makanan	124,64	136,92	9,85
-Makanan Jadi	121,98	129,14	5,88
-Perumahan	120,18	122,00	1,52
-Sandang	118,52	126,13	6,41
-Kesehatan	114,32	117,85	3,09
-Pendidikan,Rekreasi & Olahraga	111,57	115,82	3,81
-Transportasi dan Komunikasi	103,12	104,07	0,92
BPPBM	118,33	122,15	3,24
Bibit	122,47	128,22	4,70
Obat &Pupuk	116,44	121,47	4,32
Sewa Lahan, Pajak	114,58	118,69	3,59
Transportasi	115,98	118,52	2,20
Penambahan Barang Modal	123,87	128,83	4,01
Upah Buruh Tani	115,78	118,37	2,24

Sumber: BPS DIY

Pada tahun 2010, angka NTP di DIY mencapai angka sebesar 113,70, atau mengalami kenaikan sebesar 4,44 persen dibanding tahun 2009 yang hanya sebesar 108,87.

Tabel 15.5. Indeks Harga Yang Diterima (It), Indeks Harga Yang Dibayar (Ib) dan Nilai Tukar Petani (NTP) DIY, 2010

Bulan	It	Ib	NTP
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	131,75	119,46	110,29
Pebruari	131,74	119,93	109,85
Maret	132,66	119,87	110,67
April	134,11	119,76	111,98
Mei	135,03	119,95	112,57
Juni	136,16	120,93	112,60
Juli	138,84	122,69	113,16
Agustus	141,08	123,16	114,55
September	141,46	123,84	114,22
Oktober	141,13	124,15	113,67
Nopember	142,38	124,50	114,36
Desember	142,47	125,30	113,70

Sumber: BPS DIY

Grafik 15.2. NTP Provinsi DIY, 2007-2010 (Tahun 2007=100)



Sumber: BPS DIY

Tahukah Anda?

Semakin tinggi nilai NTP, relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani.



Indeks harga yang dibayar petani (Ib) menunjukkan fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat pedesaan, khususnya petani, serta fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Pada tahun 2010 Ib DIY mencapai angka sebesar 125,30 atau naik sebesar 5,46 persen dibanding indeks tahun sebelumnya sebesar 118,86. Kenaikan ini dipicu oleh kenaikan komoditas pada kelompok konsumsi rumah tangga sebesar 6,13 persen dan kelompok Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) sebesar 3,24 persen.

NTP menunjukkan daya tukar (*term of trade*) antara produk pertanian yang dijual petani dengan barang dan jasa yang dibutuhkan petani dalam memproduksi dan konsumsi rumah tangga. Dengan membandingkan kedua perkembangan angka tersebut, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil pertaniannya. Atau sebaliknya, apakah kenaikan harga jual produksi pertanian dapat menambah pendapatan petani yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan para petani. Semakin tinggi nilai NTP, relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani. Kenaikan It yang lebih tinggi dari kenaikan Ib berakibat pada kenaikan NTP di DIY. Pada tahun 2010, angka NTP di DIY mencapai angka sebesar 113,70, atau mengalami kenaikan sebesar 4,44 persen dibanding tahun 2009 yang hanya sebesar 108,87.

PENGELUARAN PENDUDUK

16

Dengan rata-rata tingkat inflasi seluruh komoditas sebesar 7,38 persen, wajar apabila konsumsi masyarakat semakin meningkat secara signifikan.

Pada tahun 2010 tercatat rata-rata pengeluaran per kapita penduduk DIY sebesar Rp553.966,- sebulan, terdiri dari Rp244.003,- untuk makanan dan Rp 309.963,- untuk konsumsi bukan makanan. Jika dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran per kapita tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 19,13 persen. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pengeluaran makanan dan non makanan yang mencapai 18,05 persen dan 19,99 persen. Dengan rata-rata tingkat inflasi seluruh komoditas sebesar 7,38 persen, wajar apabila konsumsi masyarakat semakin meningkat secara signifikan.

Kendati porsi konsumsi pangan masih lebih rendah dibanding porsi konsumsi non makanan (44,05 persen), namun porsi konsumsi makanan jadi masih cukup tinggi (16,71 persen dari total konsumsi). Hal ini disebabkan banyaknya mahasiswa/pelajar yang tinggal di DIY secara indekos/kontrak/ sewa dan lebih praktis mengkonsumsi makanan jadi dibanding dengan memasak sendiri.

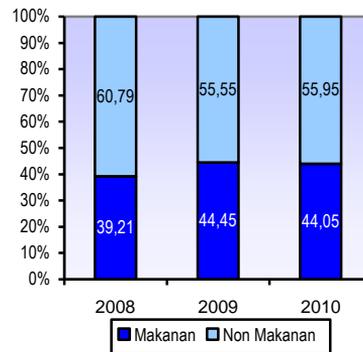
Sedangkan konsumsi non pangan penduduk DIY terbesar digunakan untuk barang dan jasa yang mencapai 22,44 persen. Diikuti oleh konsumsi untuk perumahan, bahan bakar, penerangan dan air yang mencapai 19,86 persen. Pola tersebut senada dengan pola konsumsi non makanan tahun 2009. Persamaan pola konsumsi tersebut mengindikasikan tidak adanya pergeseran skala prioritas konsumsi masyarakat DIY.

Tabel 16.1. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas, 2009-2010 (Rupiah)

Kelompok Komoditas	2009	2010	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan	206 690	244 003	18,05
-Kota	232932	270 886	16,29
-Desa	159436	195 603	22,68
Non Makanan	258 321	309 963	19,99
-Kota	314808	385 305	22,39
-Desa	156617	174 305	11,29
Jumlah	465 011	553 966	19,13
-Kota	547 740	656 191	19,80
-Desa	316 053	369 908	17,04

Sumber: Susenas 2010

Grafik 16.1. Distribusi Persentase Pengeluaran Rumah Tangga, 2008-2010



Sumber: Susenas 2010

Tahukah Anda?

Pada tahun 2010 tercatat rata-rata pengeluaran per kapita penduduk DIY sebesar Rp553.966,- sebulan, terdiri dari Rp244.003,- untuk makanan dan Rp 309.963,- untuk konsumsi bukan makanan.





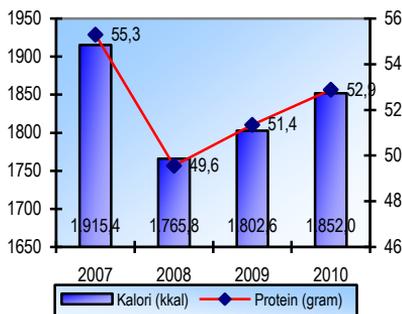
Tabel 16.2. Rata-rata Kalori dan Protein yang Dikonsumsi Per Kapita Per Hari menurut Kelompok Makanan di DIY, 2010

Kelompok Makanan (1)	Kalori (kcal) (2)	Protein (gram) (3)
Padi-padian	700,92	16,45
Umbi-umbian	33,15	0,24
Ikan	14,81	2,36
Daging dan Hasilnya	39,74	2,48
Telur, Susu dan Hasilnya	62,56	3,48
Sayur-sayuran	43,51	2,90
Kacang-kacangan	78,51	6,86
Buah-buahan	41,45	0,46
Lemak dan Minyak	210,86	0,49
Bahan Minuman	118,97	1,01
Bumbu-bumbuan	9,76	0,38
Konsumsi lainnya	59,53	1,22
Makanan dan minuman jadi	438,27	14,55
Jumlah	1 852,04	52,88

Sumber: Susenas 2010

Rata-rata kalori yang dikonsumsi oleh penduduk DIY pada tahun 2010 mencapai 1.852,04 kilo kalori per kapita per hari. Dengan mengacu standar kecukupan kebutuhan minimum energi yang diputuskan dalam Widyakarya Pangan dan Gizi (1978), 2.100 kkal per kapita per hari, rata-rata konsumsi kalori penduduk DIY masih lebih rendah. Namun, jumlah kalori tersebut meningkat 2,74 persen dibanding rata-rata konsumsi kalori 2009. Peningkatan tersebut terutama dipicu oleh pertumbuhan konsumsi kalori yang berasal dari kacang-kacangan, daging, dan bumbu-bumbuan, masing-masing sebesar 12,41 persen; 11,66 persen; dan 10,16 persen per kapita sehari. Rata-rata konsumsi kalori di perkotaan mencapai 1.847,16 kkal, lebih rendah dibanding konsumsi kalori di pedesaan yang senilai 1.854,76 kkal per kapita sehari.

Grafik 16.2. Rata-rata Kalori dan Protein yang Dikonsumsi Per Kapita Per Hari di DIY, 2007-2010



Sumber: Susenas 2007-2010

Konsumsi protein penduduk DIY pada tahun 2010 mencapai 52,88 gram per kapita per hari, atau meningkat 2,98 persen. Peningkatan konsumsi protein tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan konsumsi protein bumbu-bumbuan, buah-buahan dan daging, masing-masing 11,76 persen; 9,52 persen; dan 9,25 persen. Sebaliknya konsumsi lemak, lainnya dan makanan jadi justru menurun. Pada periode 2007-2010 konsumsi kalori dan protein berfluktuasi, dengan konsumsi tertinggi pada tahun 2007. Kemudian secara konstan terus meningkat, hingga tahun 2010, namun belum dapat mencapai seperti pada tahun 2007.

Pada tahun 2010 tercatat ekspor dari DIY senilai US\$ 140,23 juta, naik sebesar 29,01 persen dibanding nilai ekspor tahun 2009 sebesar US\$ 108,70 juta.

Terjaminnya ketersediaan berbagai komoditas kebutuhan masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga. Untuk menjaga stabilitas perdagangan, baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri, perlu adanya aktivitas perdagangan yang mencakup diantaranya adalah ekspor dan impor beberapa komoditas barang untuk kebutuhan masyarakat di DIY. Data ekspor dan impor ke dan dari luar negeri dicatat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY.

Pada tahun 2010 tercatat ekspor dari DIY senilai US\$ 140,23 juta, naik sebesar 29,01 persen dibanding nilai ekspor tahun 2009 sebesar US\$ 108,70 juta. Kenaikan nilai ekspor tersebut menunjukkan mulai membaiknya iklim perdagangan di luar negeri. Seperti misalnya di Amerika Serikat yang mempunyai kontribusi sebesar 33,68 persen, ternyata mengalami kenaikan nilai ekspor sebesar 24,03 persen, yaitu senilai US\$ 47,23 juta, lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya senilai US\$ 38,08 juta. Negara Jerman menjadi Negara pengimpor produk DIY terbesar kedua setelah Amerika Serikat dengan kontribusi sebesar 11,31 persen. Pada tahun 2010, nilai ekspor ke Jerman mengalami kenaikan sebesar 83,78 persen menjadi US\$ 15,86 juta yang tahun 2009 tercatat sebesar US\$ 8,63 juta. Negara-negara lain yang menjadi tujuan ekspor DIY dan mempunyai nilai yang relatif tinggi adalah Korea Selatan, Jepang dan Perancis dengan kontribusi masing-masing sebesar 7,61 persen, 6,73 persen dan 3,89 persen.

Tabel 17.1. Nilai Ekspor dari DIY menurut Negara Tujuan, 2010

Negara	Nilai (JutaUS\$)	Kontribusi	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Amerika Serikat	47.23	33,68	24,03
Jerman	15.86	11,31	83,78
Korea Selatan	10.67	7,61	45,37
Jepang	9.44	6,73	34,09
Perancis	5.46	3,89	52,94
Inggris	5.31	3,79	-10,15
Turki	4.20	3,00	88,34
Belanda	3.54	2,52	6,95
Belgia	3.54	2,52	42,17
Lainnya	34.98	24,94	16,21
Jumlah	140.23	100,00	29,01

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Prov. DIY

Grafik 17.1. Volume dan Nilai Ekspor DIY, 2006-2010



Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Prov. DIY

Tahukah Anda?

Negara Jerman menjadi negara pengimpor produk DIY terbesar kedua setelah Amerika Serikat dengan kontribusi sebesar 11,31 persen.



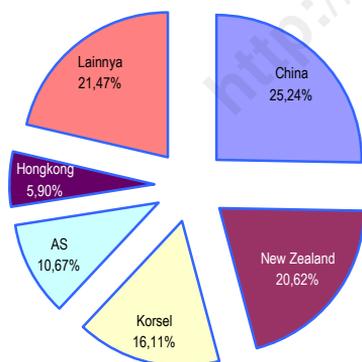
Pada tahun 2010, realisasi impor DIY mengalami penurunan nilai sebesar 1,56 persen sehingga menjadi 25,95 juta US\$ dibandingkan nilai impor tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 26,36 juta US\$.

Tabel 17.2. Nilai Impor dari DIY menurut Negara Asal, 2010

Negara	Nilai (JutaUS\$)	Kontribusi	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
China	6.55	25,24	0,15
New Zealand	5.35	20,62	-7,28
Korea Selatan	4.18	16,11	-27,81
Amerika Serikat	2.77	10,67	241,98
Hongkong	1.53	5,90	-27,14
Jepang	1.23	4,74	75,71
Taiwan	1.21	4,66	-32,40
Singapura	0.71	2,74	36,54
Lainnya	1.03	9,33	-55,98
Jumlah	25.95	100,00	-1,56

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Prov. DIY

Tabel 17.2. Nilai Impor dari DIY menurut Negara Asal, 2010



Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Prov. DIY

Tahukah Anda?

Penurunan impor terbesar berasal dari negara Taiwan yang turun sebesar 32,40 persen menjadi 1,21 juta US\$.



Perkembangan impor di DIY relatif sulit dicatat dengan kondisi sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh pelabuhan bongkar dan pelaku impor umumnya berada di luar DIY. Disamping itu, tidak semua importir melaporkan realisasi impornya, sehingga yang tercatat adalah realisasi dari importir yang secara rutin melaporkan ke Dinas Perindagkop DIY. Meskipun demikian, dapat dipastikan bahwa barang yang diimpor semuanya merupakan bahan baku produksi, bukan barang konsumtif. Barang-barang tersebut diantaranya adalah tekstil, bahan baku susu, kulit disamak, mesin, kapas, label dan asesoris garmen.

Pada tahun 2010, realisasi impor DIY mengalami penurunan nilai sebesar 1,56 persen sehingga menjadi 25,95 juta US\$ dibandingkan nilai impor tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 26,36 juta US\$. Penurunan impor terbesar berasal dari negara Taiwan yang turun sebesar 32,40 persen menjadi 1,21 juta US\$. Kemudian disusul oleh impor dari Korea Selatan dan Hongkong yang turun masing-masing sebesar 27,81 persen dan 27,14 persen.

Jika dilihat distribusi persentase nilai impor, terbesar berasal dari Negara China yaitu 25,24 persen yang senilai 6,55 juta US\$, disusul oleh New Zealand 20,62 persen senilai 5,35 juta US\$ dan Korea Selatan mempunyai persentase sebesar 16,11 persen dengan nilai sebesar 4,18 juta US\$. Ekspansi barang impor dari China yang sangat besar disebabkan daya saingnya yang tinggi, antara lain dengan menawarkan harga yang lebih murah.

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

18

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010 mencapai 4,87 persen.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2010 nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY mencapai 45,59 triliun rupiah atas dasar harga berlaku dan 21,04 triliun rupiah atas dasar harga konstan 2000. Dengan demikian terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,87 persen dibanding PDRB tahun sebelumnya. Sampai triwulan II tahun 2011, PDRB DIY sudah mencapai 24,56 triliun rupiah atas dasar harga berlaku dan 10,75 triliun rupiah atas dasar harga konstan 2000. Artinya, laju pertumbuhan ekonomi sampai dengan triwulan II 2011 telah mencapai 4,38 persen. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya perekonomian DIY, meskipun sempat mengalami bencana erupsi Gunung Merapi di penghujung tahun 2010.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,38 persen didorong oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan sebesar 9,28 persen. Hal ini karena semakin tingginya permintaan barang-barang industri, terutama industri makanan khas Jogja, serta batik dan kerajinan. Dibandingkan tahun 2010 peranan sektor industri makin meningkat, dari 14,03 persen pada tahun 2010 menjadi 14,83 persen pada semester I 2011.

Sektor pertanian hanya menyumbang pertumbuhan sebesar 0,39 persen, karena dampak iklim kemarau basah pada tahun 2010. Kendati demikian, peranan sektor pertanian tetap meningkat pada semester I 2011, menjadi 15,38 persen.

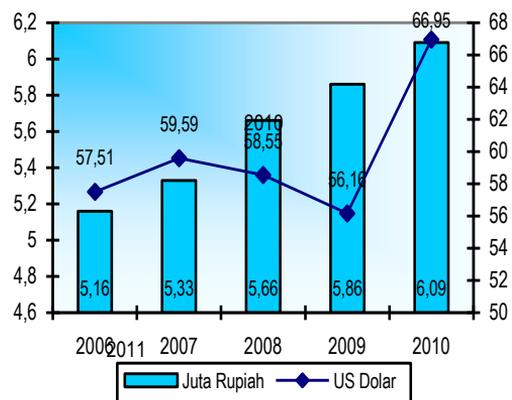
Tabel 18.1. PDRB, Distribusi Persentase dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Sektor di Provinsi DIY, 2010-2011

Sektor	2010			2011		
	Berlaku	Konstan	LPE	Berlaku	Konstan	LPE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian	6 612	3 617	-0,70	3 777	1 900	0,39
2. Pertambangan & Penggalian	305	140	0,88	179	78	15,42
3. Industri Pengolahan	6 397	2 794	7,00	3 642	1 488	9,28
4. Listrik, gas & air bersih	607	193	4,00	330	98	3,59
5. Konstruksi	4 833	2 040	6,06	2 320	946	4,85
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	9 008	4 374	5,09	4 849	2 210	2,53
7. Pengangkutan & Komunikasi	4 117	2 246	5,50	2 204	1 176	8,67
8. Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	4 554	2 053	7,87	2 381	1 043	7,54
9. Jasa-jasa	9 158	3 586	6,44	4 876	1 813	2,18
PDRB	45 592	21 042	4,87	24 558	10 753	4,38

Sumber: DDA 2011

Keterangan: Tahun 2011 sampai triwulan II

Grafik 18.1. Distribusi Persentase PDRB menurut Sektor di DIY, 2010-2011





Tabel 18.2. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi DIY Tahun 2010

Sektor	2009	2010
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian	15,38	14,50
2. Pertambangan & Penggalian	0,71	0,67
3. Industri Pengolahan	13,35	14,03
4. Listrik, Gas & Air Bersih	1,35	1,33
5. Konstruksi	10,70	10,60
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	19,72	19,76
7. Pengangkutan & Komunikasi	9,20	9,03
8. Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	9,88	9,99
9. Jasa-jasa	19,71	20,09
PDRB	100,00	100,00

Sumber: DDA 2011

Struktur Ekonomi

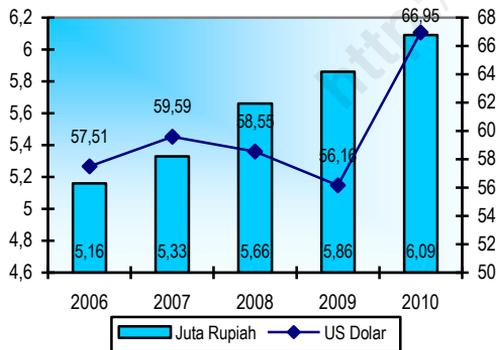
Sektor jasa-jasa memberi sumbangan terbesar dalam pembentukan PDRB 2010 di DIY (20,79 persen). Sektor ini didominasi oleh Pemerintahan Umum, sehingga besarnya peranan sektor jasa-jasa menunjukkan kinerja pemerintahan yang semakin berpihak kepada rakyat. Sektor perdagangan, hotel dan restoran juga menyumbang PDRB 2010 cukup besar (19,76 persen). Sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia sesudah Bali, DIY sangat berpotensi untuk memacu pengembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Selain itu, kekayaan budaya yang dimilikinya mampu menarik wisatawan. Sebaliknya sektor pertambangan dan penggalian hanya menyumbang sebesar 0,67 persen, karena hanya ada subsektor penggalian yang relatif kecil nilai tambahnya.

PDRB Per Kapita

Pada tahun 2010 tercatat PDRB per kapita Provinsi DIY mencapai 13,20 juta rupiah atas dasar harga berlaku, atau mencapai 6,09 juta rupiah atas dasar harga konstan 2000. Secara riil terjadi kenaikan sebesar 231,13 ribu rupiah dibandingkan tahun 2009 (3,95 persen).

Pada kurun waktu 2006-2010, PDRB per kapita menunjukkan peningkatan yang relatif konstan setiap tahun, dari 5,16 juta rupiah pada tahun 2006 menjadi 6,09 juta rupiah di tahun 2010. Apabila dinilai dalam US Dolar, mengalami depresiasi pada tahun 2008 dan 2009 (58,55 USD dan 56,16 USD). Namun pada tahun 2010 meningkat secara signifikan (66.95 USD) karena nilai Rupiah yang terapresiasi.

Gambar 18.2. PDRB Per Kapita adh Konstan 2000 Provinsi DIY, 2006-2010



Tahukah Anda?

PDRB per kapita penduduk DIY mencapai 6,09 juta rupiah atau 66.95 US Dolar pada tahun 2010.



PERBANDINGAN REGIONAL

19

Pada tahun 2010 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Provinsi DIY menduduki peringkat ke-26 secara nasional, yaitu 13,18 juta rupiah.

PDRB

Berdasarkan harga berlaku, PDRB Provinsi DIY terletak pada posisi ke-20 sesudah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebelum Provinsi Jambi, secara nasional. Pada tahun 2010, DIY hanya memberi kontribusi terhadap total PDRB 33 provinsi di Indonesia sebesar 0,95 persen.

Kendati konsentrasi ekonomi berada di Pulau Jawa, namun Provinsi DIY yang berorientasi pada pendidikan dan kebudayaan hanya mampu berkontribusi 1,54 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa. Selain itu, wilayah DIY yang relatif sempit dan potensi ekonomi yang terbatas, memberi andil terhadap rendahnya kontribusi ekonomi DIY dalam lingkup nasional.

PDRB Per Kapita

Pada tahun 2010 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Provinsi DIY menduduki peringkat ke-26 secara nasional, yaitu 13,18 juta rupiah. Jika dibandingkan provinsi-provinsi di Pulau Jawa, DIY menduduki peringkat terakhir (ke-6).

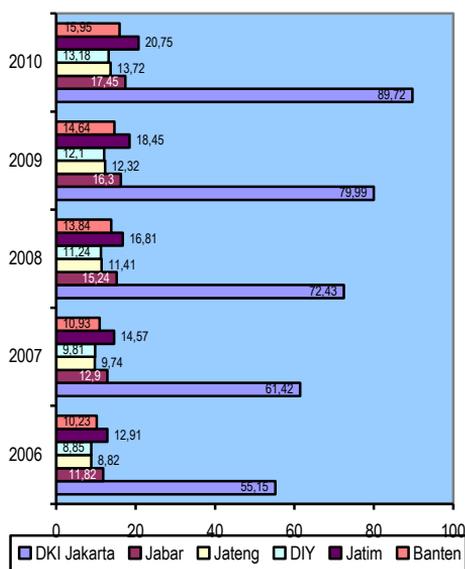
PDRB per kapita tertinggi dari 33 provinsi dicapai oleh Provinsi Kalimantan Timur (89,84 juta rupiah), dan terendah dicapai oleh Provinsi Maluku Utara (5,18 juta rupiah). DKI Jakarta yang menduduki peringkat pertama di Pulau Jawa mencapai 89,72 juta rupiah, satu peringkat di bawah Kalimantan Timur. Dari Grafik 19.1 tampak adanya kesenjangan PDRB per kapita di Pulau Jawa, di mana perekonomian masih didominasi oleh DKI Jakarta.

Tabel 19.1. PDRB Provinsi-provinsi di Pulau Jawa, 2010

Provinsi	PDRB (triliun Rp)		Peringkat Nasional	Kontribusi
	Adh Berlaku	Adh Konstan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DKI Jakarta	858,45	394,71	1	17,83
Jawa Barat	737,66	312,84	3	15,32
Jawa Tengah	390,59	176,19	4	8,11
DI Yogyakarta	45,63	21,04	20	0,95
Jawa Timur	775,19	340,61	2	16,1
Banten	148,98	76,31	8	3,09
33 Provinsi	4 813,83	2 065,46		

Sumber: BPS DIY

Grafik 19.1. PDRB Per Kapita adh Berlaku Provinsi-provinsi di Pulau Jawa, 2005-2010 (juta Rp)



Sumber: BPS DIY

Keunggulan DIY secara nasional terletak pada lamanya usia harapan hidup yang menunjukkan bahwa tingkat kesehatan penduduk DIY sangat baik dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Tabel 19.2. IPM 33 Provinsi di Indonesia, 2010

Provinsi	Angka Harapan Hidup (tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rp/bln)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NAD	68,70	96,88	8,81	611,42	71,70
SumUt	69,50	97,32	8,85	636,33	74,19
SumBar	69,50	97,09	8,48	635,29	73,78
Riau	71,40	98,35	8,58	646,63	76,07
Jambi	69,10	96,07	7,84	633,67	72,74
SumSel	69,60	97,36	7,82	629,38	72,95
Bengkulu	69,90	95,30	8,25	628,51	72,92
Lampung	69,50	94,64	7,75	618,63	71,42
Kep. BaBel	68,90	95,69	7,45	641,51	72,86
Kep. Riau	69,80	97,19	9,16	643,00	75,07
DKI Jakarta	73,20	99,13	10,93	628,67	77,60
JaBar	68,20	96,18	8,02	632,22	72,29
JaTeng	71,40	89,95	7,24	637,27	72,49
DIY	73,22	90,84	9,07	646,56	75,77
JaTim	69,60	88,34	7,24	643,60	71,62
Banten	64,90	96,20	8,32	629,70	70,48
Bali	70,72	88,40	8,21	634,67	72,28
NTB	62,11	81,05	6,77	639,89	65,20
NTT	67,50	88,59	6,99	603,75	67,26
KalBar	66,60	90,26	6,82	631,65	69,15
KalTeng	71,20	97,78	8,03	636,47	74,64
KalSel	63,81	95,94	7,65	637,46	69,92
KalTim	71,20	97,05	8,87	642,51	75,56
SulUt	72,22	99,45	8,89	634,88	76,09
SulTeng	66,60	96,08	8,00	629,30	71,14
SulSel	70,00	87,75	7,84	636,60	71,62
SulTra	67,80	91,85	8,11	616,99	70,00
Gorontalo	66,81	96,00	7,38	622,92	70,28
SulBar	67,80	88,48	7,11	631,76	69,64
Maluku	67,40	98,14	8,76	614,01	71,42
MalUt	66,01	96,08	8,63	600,20	69,03
PapBar	68,51	93,19	8,21	596,08	69,15
Papua	68,60	75,60	6,66	606,38	64,94
Indonesia	69,43	92,91	7,92	633,64	72,27

Sumber: BPS RI

Indeks Pembangunan Manusia

Secara nasional, IPM Provinsi DIY menduduki peringkat ke-4 setelah Riau, dengan nilai 75,77 tahun. Keunggulan DIY secara nasional terletak pada lamanya usia harapan hidup yang menunjukkan bahwa tingkat kesehatan penduduk DIY sangat baik dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Seperti yang sudah diuraikan pada Bab 7, angka harapan hidup yang tinggi didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan masyarakat yang memadai dan aksesibilitasnya tinggi. Selain itu, tingkat keamanan dan kenyamanan berdomisili di DIY cukup tinggi, terbukti dengan tingginya preferensi penduduk untuk menghabiskan masa tuanya di DIY.

Angka melek huruf di DIY yang sebesar 90,84 persen terletak pada peringkat ke-23 sesudah Sulawesi Tenggara. Peringkat pertama diraih oleh DKI Jakarta yang mencapai 99,13 persen. Namun rata-rata lama sekolah DIY cukup tinggi, yakni mencapai 9,07 tahun, pada peringkat ke-3 sesudah Kepulauan Riau, sedangkan peringkat pertama juga oleh DKI Jakarta (10,93 tahun).

Pada aspek ekonomi, DIY menduduki peringkat ke-2 sesudah Riau, yakni memiliki pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebesar 646,56 ribu rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat DIY cukup tinggi, sehingga diperkirakan kebutuhan untuk hidup di DIY masih dapat dipenuhi. Itulah sebabnya, tingkat kemiskinan di DIY masih lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan nasional.



Tabel Lampiran 1.
Jumlah Desa menurut Kabupaten/Kota dan Letak Geografis
di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2010

Kabupaten/ Kota	Pesisir	Bukan Pesisir			Jumlah
		Lembah/ Daerah Aliran Sungai	Lereng/ Punggung Bukit	Dataran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kulonprogo	10	-	22	56	88
2. Bantul	5	-	11	59	75
3. Gunungkidul	18	-	56	70	144
4. Sleman	-	-	11	75	86
5. Yogyakarta	-	-	-	45	45
Provinsi DIY	33	0	100	305	438

Sumber : Statistik Podes Provinsi DIY 2008, Badan Pusat Statistik

Tabel Lampiran 2.
Komposisi Anggota DPRD menurut Fraksi dan Komisi
di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2010

Fraksi	Komisi				Pimpin-an Dewan	Jumlah
	A Pemerin- tahan	B Perekono- mian/ Keuangan	C Pemban- ngunan	D Kesra		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. PDI-P	2	3	3	2	1	11
2. PAN	1	2	2	2	1	8
3. Partai Golkar	1	1	2	2	1	7
4. PKB	1	1	2	1	-	5
5. PKS	1	2	2	2	-	7
6. Partai Demokrat	2	2	2	3	1	10
7. FPNPI Raya	2	1	2	2	-	7
Jumlah	10	12	15	14	4	55

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta

Tabel Lampiran 3.
Rencana Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, 2009-2010
 (000 Rp.)

Rincian	2009	2010
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	596 850 802	621 738 060
1. Pajak Daerah	524 567 435	526 658 538
2. Retribusi Daerah	32 843 464	35 839 076
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14 071 903	25 376 334
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25 368 000	33 864 112
B. Dana Perimbangan	618 381 981	615 334 816
1. Dana Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	61 052 031	76 479 469
2. Dana Alokasi Umum	523 919 950	527 471 247
3. Dana Alokasi Khusus	33 410 000	11 384 100
C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6 361 458	4 056 726
1. Hibah	3 827 100	4 056 726
2. Dana Darurat	0	0
3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	0	0
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	2 534 358	0
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	0	0
6. Dana Tunjangan Pendidikan	0	0
Jumlah Pendapatan	1 221 594 241	1 241 129 602

Sumber : Pemerintah Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta

Tabel Lampiran 4.
Rencana APBD Kabupaten/Kota se Provinsi DIY, 2010 (Rp.)

Kabupaten/Kota	Penerimaan	Pengeluaran	Defisit
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Kulonprogo	565 183 046	596 292 274	-31 109 228
02. Bantul	876 204 470	915 091 018	-38 886 548
03. Gunungkidul	729 518 588	776 960 886	-47 442 298
04. Sleman	985 404 159	1 028 576 357	-43 172 198
71. Yogyakarta	754 156 794	847 138 308	-92 981 514
34. D.I.Yogyakarta	3 910 467 057	4 164 058 843	-253 591 786

Sumber: Pemerintah Provinsi DIY

Tabel Lampiran 5.
Jumlah Penduduk Usia Kerja Yang Bekerja menurut Sektor di DIY, 2006-2010
(orang)

Sektor	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	612 454	545 800	560 089	570 574	539 703
Pertambangan, Penggalian, Listrik, Gas dan Air Minum	19 150	26 297	21 239	20617	15 758
Industri	191 091	209 456	250 507	237 240	247 093
Konstruksi	133 499	153 273	150 571	145 381	109 933
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	411 000	435 072	456 825	455 331	438 282
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	57 522	58 821	88 960	82 639	67 368
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	45 076	47 183	41 732	48 441	38 651
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	280 783	298 343	322 282	335 425	318 360
Jumlah	1 750 575	1 774 245	1 892 205	1 895 648	1 775 148

Sumber: Sakernas Agustus

Tabel Lampiran 6.
Jumlah Penduduk Usia Kerja Yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama di DIY,
2008-2010 (orang)

Status Pekerjaan	2008	2009	2010
(1)	(4)	(5)	(6)
Berusaha sendiri	311 450	271 699	244 167
Berusaha dg dibantu art/buruh tidak tetap	431 446	451 329	432 308
Berusaha dg buruh tetap	75 608	56 174	69 183
Pekerja/buruh/karyawan	583 342	614 886	542 632
Pekerja bebas di pertanian	57 016	54 807	35 860
Pekerja bebas di non pertanian	122 476	145 312	116 098
Pekerja tak dibayar	310 867	301 441	334 900
Jumlah	1 892 205	1 895 648	1 775 148

Sumber: Sakernas Agustus

Tabel Lampiran 7.
Laju Inflasi Kota Yogyakarta menurut Kelompok Komoditas, 2005-2009
(%)

Kelompok Komoditas	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bahan Makanan	15,62	13,30	14,92	3,91	18,86
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	13,85	7,33	9,01	7,50	5,47
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	6,68	6,17	13,78	1,40	5,49
Sandang	8,04	9,34	9,90	5,81	5,41
Kesehatan	16,09	4,37	8,19	1,86	1,97
Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	15,36	12,57	5,62	2,26	4,25
Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan	1,50	2,97	6,12	-1,23	5,57
Umum	10,40	7,98	10,80	2,93	7,38

Sumber: BPS DIY

Tabel Lampiran 8.
Indikator Kemiskinan Provinsi D.I. Yogyakarta 2006-2010

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)	Jumlah penduduk miskin (000)	Persentase penduduk miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Perkotaan</u>			
Maret 2006	184 638	346,00	17,85
Maret 2007	200 855	335,30	15,63
Maret 2008	208 655	324,20	14,99
Maret 2009	228 236	311,47	14,25
Maret 2010	240 282	308,36	13,98
<u>Perdesaan</u>			
Maret 2006	148 523	302,70	27,64
Maret 2007	156 349	298,20	25,03
Maret 2008	169 934	292,10	24,32
Maret 2009	182 706	274,31	22,60
Maret 2010	195 406	268,94	21,95
<u>Kota+Desa</u>			
Maret 2006	170 720	648,70	19,15
Maret 2007	184 965	633,50	18,99
Maret 2008	194 830	616,30	18,32
Maret 2009	221 978	585,78	17,23
Maret 2010	224 258	577,30	16,83

Sumber: BPS DIY

Tabel Lampiran 9.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi DIY menurut Sektor,
2006-2010 (Juta Rupiah)

Sektor	2006	2007	2008	2009 ¹⁾	2010 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN	4 574 164,48	4 941 799,78	5 993 780,82	6 366 771,35	6 611 710,59
a. Tanaman Bahan Makanan	3 438 464,04	3 610 606,08	4 419 012,97	4 652 257,24	4 817 984,70
b. Tanaman Perkebunan	99 492,10	118 189,47	149 666,32	139 877,85	147 299,78
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	624 190,31	742 176,30	889 911,14	987 858,30	1 048 204,79
d. Kehutanan	315 671,45	350 340,81	385 214,72	419 458,38	424 158,18
e. Perikanan	96 346,58	120 487,11	149 975,66	167 319,59	174 063,14
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	218 170,32	258 761,30	280 106,06	293 983,37	304 659,94
a. Minyak & Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Pertambangan Bukan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Penggalian	218 170,32	258 761,30	280 106,06	293 983,37	304 659,94
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	4 078 214,00	4 475 679,91	5 062 274,79	5 528 855,57	6 396 639,13
a. Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pengilangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gas Alam Cair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Bukan Migas	4 078 214,00	4 475 679,91	5 062 274,79	5 528 855,57	6 396 639,13
1. Makanan, Minuman & Tembakau	1 718 484,26	1 858 825,04	2 379 204,08	2 650 342,70	3 385 042,39
2. Tekstil, Barang dari Kulit & Alas kaki	763 939,90	815 415,19	778 188,77	877 451,08	843 172,92
3. Kayu & Barang dari Kayu Lainnya	468 736,62	547 573,27	512 337,62	455 005,61	469 290,62
4. Kertas & Barang Cetak	183 391,61	207 421,10	217 375,23	236 405,46	245 159,38
5. Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	165 341,39	196 202,69	232 748,93	282 326,40	351 537,03
6. Semen & Barang Galian Bukan Logam	181 528,93	214 571,50	232 562,07	249 411,25	283 281,07
7. Logam Dasar Besi & Baja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	323 493,48	339 811,91	362 242,50	391 774,33	435 995,01
9. Barang Lainnya	273 297,80	295 859,21	347 615,58	386 138,74	383 160,71
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	377 002,27	423 370,23	488 333,57	560 316,10	607 072,04
a. Listrik	355 809,97	398 571,99	461 849,79	531 445,61	576 248,19
b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	21 192,30	24 798,24	26 483,78	28 870,50	30 823,84
5. KONSTRUKSI	2 866 921,58	3 470 711,19	4 075 606,00	4 431 411,16	4 833 423,00
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	5 597 602,89	6 326 699,84	7 321 298,87	8 165 613,48	9 008 181,05
a. Perdagangan Besar & Eceran	2 379 562,77	2 701 533,45	3 150 427,56	3 497 027,93	3 884 721,36
b. Hotel	454 950,22	549 130,43	717 178,75	801 873,00	867 921,50
c. Restoran	2 763 089,91	3 076 035,96	3 453 692,56	3 866 712,56	4 255 538,19
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	3 050 035,88	3 318 452,75	3 739 696,54	3 809 094,20	4 117 417,84
a. Pengangkutan	2 240 252,81	2 416 332,44	2 793 303,35	2 840 046,35	3 049 965,11
1. Angkutan Rel	79 534,43	84 773,60	100 512,20	108 273,49	103 935,77
2. Angkutan Jalan Raya	1 905 134,48	2 042 213,58	2 326 738,41	2 325 993,09	2 479 465,82
3. Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyebr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Angkutan Udara	174 972,06	197 837,02	255 865,21	279 763,39	307 391,72
6. Jasa Penunjang Angkutan	80 611,84	91 508,24	110 187,53	126 016,39	159 171,79
b. Komunikasi	809 783,07	902 120,31	946 393,19	969 047,84	1 067 452,74
1. Pos dan Telekomunikasi	730 461,17	815 643,00	0,00	0,00	0,00
2. Jasa Penunjang Komunikasi	79 321,91	86 477,31	0,00	0,00	0,00
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	2 755 733,86	3 188 427,59	3 724 285,35	4 090 674,81	4 554 466,72
a. Bank	340 275,96	491 845,00	695 720,00	735 275,00	900 031,00
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	335 801,39	333 071,72	395 721,35	430 101,89	464 646,76
c. Jasa Penunjang Keuangan	7 665,80	8 208,10	9 471,28	11 505,04	11 992,68
d. Real Estat	1 954 171,12	2 219 808,08	2 467 056,89	2 742 482,54	2 980 645,76
e. Jasa Perusahaan	117 819,59	135 494,68	156 315,83	171 310,34	197 150,53
9. JASA-JASA	5 899 503,71	6 512 833,82	7 416 302,51	8 160 329,45	9 158 282,75
a. Pemerintahan Umum	4 213 635,00	4 598 174,28	5 238 290,79	5 762 623,36	6 490 408,64
1. Administrasi Pemerintah & Pertahanan	2 599 219,80	2 833 995,33	3 225 149,04	3 515 340,49	3 950 218,88
2. Jasa Pemerintah Lainnya	1 614 415,20	1 764 178,94	2 013 141,75	2 247 282,88	2 540 189,76
b. Swasta	1 685 868,71	1 914 659,55	2 178 011,73	2 397 706,09	2 667 874,11
1. Jasa Sosial & Masyarakat	845 448,63	947 148,12	1 079 643,35	1 174 712,57	1 293 735,70
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	106 094,69	116 859,05	121 786,07	132 694,18	147 826,62
3. Jasa Perorangan & Rumahtangga	734 325,38	850 652,38	976 582,30	1 090 299,34	1 226 311,79
PDRB	29 417 348,99	32 916 736,41	38 101 684,50	41 407 049,50	45 591 853,06

Keterangan: *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Sumber: BPS DIY

Tabel Lampiran 10.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi DIY menurut Sektor,
2006-2010 (Juta Rupiah)

Sektor	2006	2007	2008	2009 ¹⁾	2010 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN	3 306 927,55	3 333 381,87	3 523 942,55	3 642 695,93	3 617 081,20
a. Tanaman Bahan Makanan	2 528 698,65	2 492 371,69	2 673 404,63	2 773 292,48	2 757 165,44
b. Tanaman Perkebunan	81 353,69	86 905,13	88 807,27	93 429,23	95 771,66
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	452 490,44	483 794,92	484 151,03	493 162,02	483 698,65
d. Kehutanan	174 236,36	186 281,00	190 343,69	190 273,26	187 277,36
e. Perikanan	70 148,41	84 029,14	87 235,93	92 538,94	93 168,09
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	126 136,95	138 357,84	138 328,23	138 748,17	139 966,86
a. Minyak & Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Pertambangan Bukan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Penggalian	126 136,95	138 357,84	138 328,23	138 748,17	139 966,86
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	2 481 167,12	2 528 020,09	2 562 548,76	2 610 759,67	2 793 579,70
a. Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pengilangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gas Alam Cair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Bukan Migas	2 481 167,12	2 528 020,09	2 562 548,76	2 610 759,67	2 793 579,70
1. Makanan, Minuman & Tembakau	860 185,77	854 290,94	965 586,02	1 020 655,37	1 173 571,52
2. Tekstil, Barang dari Kulit & Alas kaki	511 558,61	505 206,15	452 314,50	477 007,32	446 258,78
3. Kayu & Barang dari Kayu Lainnya	336 146,96	367 545,32	321 517,93	267 691,28	270 040,47
4. Kertas & Barang Cetak	129 201,06	138 467,19	139 745,11	143 754,62	147 618,61
5. Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	117 393,23	130 504,95	144 581,94	163 472,48	197 748,66
6. Semen & Barang Galian Bukan Logam	126 765,14	134 743,09	136 178,57	137 245,47	151 233,19
7. Logam Dasar Besi & Baja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	220 145,47	218 330,17	217 340,08	220 616,30	237 317,56
9. Barang Lainnya	179 770,89	178 932,27	185 284,61	180 316,84	169 790,92
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	152 862,39	165 772,36	174 933,01	185 598,94	193 027,37
a. Listrik	140 186,10	152 779,22	162 218,37	172 772,30	179 870,40
b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	12 676,29	12 993,14	12 714,64	12 826,65	13 156,98
5. KONSTRUKSI	1 580 312,00	1 732 944,92	1 838 429,00	1 923 719,64	2 040 306,00
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	3 569 622,20	3 750 364,75	3 947 661,66	4 162 115,56	4 373 850,56
a. Perdagangan Besar & Eceran	1 534 973,88	1 613 883,78	1 698 740,46	1 791 891,65	1 889 076,52
b. Hotel	259 896,23	287 901,37	342 329,18	364 118,91	376 542,84
c. Restoran	1 774 752,09	1 848 579,59	1 906 592,01	2 006 105,00	2 108 231,19
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	1 761 671,74	1 875 306,69	2 008 919,26	2 128 594,28	2 245 695,60
a. Pengangkutan	1 235 198,73	1 286 539,74	1 351 434,94	1 416 840,53	1 453 852,30
1. Angkutan Rel	35 934,76	36 849,68	39 516,63	44 027,51	40 816,60
2. Angkutan Jalan Raya	996 813,77	1 041 603,04	1 073 134,44	1 104 480,49	1 129 741,84
3. Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyebr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Angkutan Udara	156 489,92	159 105,25	185 357,03	209 573,18	222 471,30
6. Jasa Penunjang Angkutan	45 960,28	48 981,77	53 426,84	58 759,35	60 822,57
b. Komunikasi	526 473,01	588 766,95	657 484,33	711 753,75	791 843,29
1. Pos dan Telekomunikasi	474 902,60	532 306,50	0,00	0,00	0,00
2. Jasa Penunjang Komunikasi	51 570,41	56 460,45	0,00	0,00	0,00
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	1 591 885,36	1 695 163,04	1 793 789,26	1 903 410,58	2 053 162,21
a. Bank	187 811,00	250 719,71	318 858,09	329 114,09	401 755,03
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	201 707,08	184 785,67	181 371,57	202 655,49	218 338,56
c. Jasa Penunjang Keuangan	4 990,06	5 329,50	5 534,37	6 026,54	6 264,45
d. Real Estat	1 130 299,40	1 181 982,37	1 210 446,11	1 284 734,89	1 338 835,00
e. Jasa Perusahaan	67 077,82	72 345,80	77 579,11	80 879,57	87 969,17
9. JASA-JASA	2 965 164,00	3 072 200,16	3 223 929,30	3 368 613,89	3 585 597,81
a. Pemerintahan Umum	2 049 433,00	2 121 210,16	2 230 823,87	2 332 558,54	2 491 964,73
1. Administrasi Pemerintah & Pertahanan	1 301 165,69	1 345 636,34	1 409 287,96	1 460 884,57	1 557 186,65
2. Jasa Pemerintah Lainnya	748 267,31	775 573,82	821 535,91	871 673,97	934 778,08
b. Swasta	915 731,00	950 990,00	993 105,42	1 036 055,35	1 093 633,08
1. Jasa Sosial & Masyarakat	425 402,01	429 786,57	450 615,95	470 494,20	493 809,57
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	70 716,51	76 936,23	79 678,04	83 728,85	88 685,45
3. Jasa Perorangan & Rumahtangga	419 612,48	444 267,20	462 811,43	481 832,30	511 138,07
PDRB	17 535 749,31	18 291 511,71	19 212 481,03	20 064 256,65	21 042 267,31

Keterangan: *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Sumber: BPS DIY

Tabel Lampiran 11.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DIY menurut Sektor,
2005-2009 (%)

Sektor	2006	2007	2008	2009 ^{*)}	2010 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN	3,80	0,80	5,72	3,37	-0,70
a. Tanaman Bahan Makanan	4,56	-1,44	7,26	3,74	-0,58
b. Tanaman Perkebunan	5,87	6,82	2,19	5,20	2,51
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	-0,13	6,92	0,07	1,86	-1,92
d. Kehutanan	4,93	6,91	2,18	-0,04	-1,57
e. Perikanan	-1,76	19,79	3,82	6,08	0,68
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	3,11	9,69	-0,02	0,30	0,88
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan Bukan Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	3,11	9,69	-0,02	0,30	0,88
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	0,73	1,89	1,37	1,88	7,00
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
2. Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. Industri Bukan Migas	0,73	1,89	1,37	1,88	7,00
1. Makanan, Minuman & Tembakau	1,73	-0,69	13,0	5,70	14,98
2. Tekstil, Barang dari Kulit & Alas kaki	0,26	-1,24	-10,5	5,46	-6,45
3. Kayu & Barang dari Kayu Lainnya	3,77	9,34	-12,5	-16,74	0,88
4. Kertas & Barang Cetak	-0,41	7,17	0,92	2,87	2,69
5. Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	2,18	11,17	10,8	13,07	20,97
6. Semen & Barang Galian Bukan Logam	-2,16	6,29	1,07	0,78	10,19
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	-
8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	-2,90	-0,82	-0,45	1,51	7,57
9. Barang Lainnya	-1,54	-0,47	3,55	-2,68	-5,84
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	-0,17	8,45	5,53	6,10	4,00
a. Listrik	0,11	8,98	6,18	6,51	4,11
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	-3,15	2,50	-2,14	0,88	2,58
5. KONSTRUKSI	13,28	9,66	6,09	4,64	6,06
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	3,62	5,06	5,26	5,43	5,09
a. Perdagangan Besar & Eceran	4,94	5,14	5,26	5,48	5,42
b. Hotel	-18,58	10,78	18,9	6,37	3,41
c. Restoran	6,72	4,16	3,14	5,22	5,09
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	5,28	6,45	7,12	5,96	5,50
a. Pengangkutan	3,73	4,16	5,04	4,84	2,61
1. Angkutan Rel	3,36	2,55	7,24	11,42	-7,29
2. Angkutan Jalan Raya	4,40	4,49	3,03	2,92	2,29
3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyebr.	-	-	-	-	-
5. Angkutan Udara	0,03	1,67	16,5	13,06	6,15
6. Jasa Penunjang Angkutan	2,67	6,57	9,07	9,98	3,51
b. Komunikasi	9,10	11,83	11,7	8,25	11,25
1. Pos dan Telekomunikasi	9,04	12,09	-	-	-
2. Jasa Penunjang Komunikasi	9,73	9,48	-	-	-
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	-1,93	6,49	5,82	6,11	7,87
a. Bank	-23,87	33,50	27,2	3,22	22,07
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	13,87	-8,39	-1,85	11,73	7,74
c. Jasa Penunjang Keuangan	2,84	6,80	3,84	8,89	3,95
d. Real Estat	-0,08	4,57	2,41	6,14	4,21
e. Jasa Perusahaan	5,92	7,85	7,23	4,25	8,77
9. JASA-JASA	4,04	3,61	4,94	4,49	6,44
a. Pemerintahan Umum	3,54	3,50	5,17	4,56	6,83
1. Administrasi Pemerintah & Pertahanan	3,33	3,42	4,73	3,66	6,59
2. Jasa Pemerintah Lainnya	3,92	3,65	5,93	6,10	7,24
b. Swasta	5,17	3,85	4,43	4,32	5,56
1. Jasa Sosial & Masyarakat	5,00	1,03	4,85	4,41	4,96
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	4,49	8,80	3,56	5,08	5,92
3. Jasa Perorangan & Rumahtangga	5,47	5,88	4,17	4,11	6,08
PDRB	3,70	4,31	5,03	4,43	4,87

Keterangan: *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Sumber: BPS DIY

Tabel Lampiran 12.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi DIY menurut Penggunaan,
2005-2009 (Juta Rupiah)

Komponen Penggunaan	2006	2007	2008	2009 ^{*)}	2010 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga	14 303 801	15 674 783	18 615 698,47	20 610 786,18	23 198 864,19
a. Makanan	6 735 959	7 431 548	8 762 852,68	9 608 852,18	10 936 141,28
b. Bukan Makanan	7 567 842	8 243 235	9 852 845,79	11 001 934,00	12 262 722,91
2. Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba	522 632	682 748	924 599,62	1 171 357,20	1 437 471,47
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah	6 671 520	7 980 673	9 727 102,99	10 789 365,48	11 709 925,02
4. Pembentukan modal tetap domestik bruto	9 178 969	10 834 671	12 983 263,74	13 964 317,26	15 027 836,42
5. Perubahan Inventori	1 522 144	2 103 045	1 946 834,21	1 625 831,20	1 432 255,61
6. Ekspor barang-barang dan jasa-jasa	10 676 446	12 595 237	14 674 508,51	15 989 976,36	17 873 356,75
a. Antar negara / luar negeri	1 288 749	1 200 821	1 319 367,25	1 116 017,32	1 226 874,52
b. Antar provinsi	9 387 697	11 394 416	13 355 141,26	14 873 959,04	16 646 482,23
Dikurangi :					
7. Impor barang-barang dan jasa-jasa	13 458 163	16 954 421	20 770 323,03	22 744 584,19	25 087 856,39
a. Antar negara / luar negeri	574 159	507 308	627 860,81	538 717,15	640 380,27
b. Antar provinsi	12 884 003	16 447 113	20 142 462,23	22 205 867,04	24 447 476,13
PDRB	29 417 349	32 916 736	38 101 684,50	41 407 049,50	45 591 853,06

Keterangan: *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Sumber: BPS DIY

Tabel Lampiran 13.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi DIY menurut Penggunaan,
2005-2009 (Juta Rupiah)

Komponen Penggunaan	2006	2007	2008	2009 ^{*)}	2010 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga	7 959 534	8 132 032	8 628 746,59	9 211 149,17	9 881 632,38
a. Makanan	4 071 366	4 108 534	4 264 429,04	4 432 214,27	4 675 895,78
b. Bukan Makanan	3 888 168	4 023 498	4 364 317,55	4 778 934,90	5 205 736,60
2. Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba	294 742	343 688	407 633,95	486 708,78	565 673,77
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah	3 290 766	3 537 965	3 811 938,03	4 099 837,70	4 215 306,97
4. Pembentukan modal tetap domestik bruto	4 864 177	4 997 308	5 210 713,85	5 378 098,83	5 561 444,23
5. Perubahan Inventori	1 276 467	1 445 731	1 310 455,35	1 070 058,03	869 850,24
6. Ekspor barang-barang dan jasa-jasa	7 327 337	7 690 728	8 153 611,28	8 409 941,18	8 950 511,67
a. Antar negara / luar negeri	995 173	898 174	919 861,37	824 998,57	892 261,67
b. Antar provinsi	6 332 164	6 792 554	7 233 749,91	7 584 942,61	8 058 250,00
Dikurangi :					
7. Impor barang-barang dan jasa-jasa	7 477 274	7 855 940	8 310 618,02	8 591 537,04	9 002 151,96
a. Antar negara / luar negeri	354 055	292 182	317 137,69	258 237,69	286 818,03
b. Antar provinsi	7 123 219	7 563 757	7 993 480,33	8 333 299,34	8 715 333,92
PDRB	17 535 749	18 291 512	19 212 481,03	20 064 256,65	21 042 267,31

Keterangan: *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Sumber: BPS DIY

Tabel Lampiran 14.
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi DIY menurut Penggunaan,
2006-2010 (Juta Rupiah)

Komponen Penggunaan	2006	2007	2008	2009 ^{*)}	2010 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga	1,41	2,17	6,11	6,75	7,28
a. Makanan	0,88	0,91	3,79	3,93	5,50
b. Bukan Makanan	1,96	3,48	8,47	9,50	8,93
2. Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba	20,14	16,61	18,61	19,40	16,22
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah	7,60	7,51	7,74	7,55	2,82
4. Pembentukan modal tetap domestik bruto	8,71	2,74	4,27	3,21	3,41
5. Perubahan Inventori	27,77	13,26	-9,36	-18,34	-18,71
6. Ekspor barang-barang dan jasa-jasa	-1,87	4,96	6,02	3,14	6,43
a. Antar negara / luar negeri	-9,69	-9,75	2,41	-10,31	8,15
b. Antar provinsi	-0,52	7,27	6,50	4,85	6,24
Dikurangi :					
7. Impor barang-barang dan jasa-jasa	4,10	5,06	5,79	3,38	4,78
a. Antar negara / luar negeri	46,43	-17,48	8,54	-18,57	11,07
b. Antar provinsi	2,63	6,18	5,68	4,25	4,58
PDRB	3,70	4,31	5,03	4,43	4,87

Keterangan: *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Sumber: BPS DIY

Tabel Lampiran 15.

Ringkasan PDRB Tanpa Migas Provinsi Se Indonesia Tahun 2010

PROVINSI	PDRB		Pertumbuhan 2009	Kontribusi (%)		Peringkat	
	ADHB	ADHK 2000		Thd. Pulau.	Thd. 33 Prov.	ADHB	ADHK
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)
SUMATERA	1 217 342	468 061	5,49	100,00	23,11	II	II
01. NAD	77 506	33 071	2,64	6,37	1,47	15	14
02. SUMUT	275 700	118 641	6,35	22,65	5,23	7	5
03. SUMBAR	87 221	38 860	5,93	7,16	1,66	13	12
04. RIAU	342 691	97 702	4,17	28,15	6,51	5	7
05. JAMBI	53 817	17 465	7,31	4,42	1,02	19	23
06. SUMSEL	157 772	63 736	5,43	12,96	3,00	9	10
07. BENGKULU	18 037	8 330	5,14	1,48	0,34	29	29
08. LAMPUNG	107 277	38 305	5,75	8,81	2,04	11	13
09. KEP. BABEL	25 706	10 867	5,85	2,11	0,49	27	27
10. KEP. RIAU	71 615	41 083	7,21	5,88	1,36	14	11
JAWA	3 054 146	1 356 226	6,30	100,00	57,99	I	I
11. DKI JAKARTA	862 159	395 665	6,51	28,23	16,37	1	1
12. JAWA BARAT	753 018	321 876	6,09	24,66	14,30	3	3
13. JAWA TENGAH	444 396	186 995	5,84	14,55	8,44	4	4
14. DI YOGYAKARTA	45 592	21 042	4,87	1,49	0,87	21	19
15. JAWA TIMUR	778 456	342 254	6,68	25,49	14,78	2	2
16. BANTEN	170 525	88 394	5,94	5,58	3,24	8	8
BALI NUSRA	143 765	61 469	5,83	100,00	2,73	V	V
17. BALI	66 691	28 881	5,83	46,39	1,27	16	17
18. NTB	49 363	20 057	6,29	34,34	0,94	20	20
19. NTT	27 711	12 532	5,13	19,28	0,53	26	25
KALIMANTAN	482 543	190 335	5,26	100,00	9,16	III	III
20. KALBAR	60 475	30 292	5,35	12,53	1,15	17	16
21. KALTENG	42 567	18 789	6,47	8,82	0,81	22	21
22. KALSEL	58 542	30 674	5,58	12,13	1,11	18	15
23. KALTIM	320 959	110 580	4,95	66,51	6,09	6	6
SULAWESI	243 834	106 893	8,08	100,00	4,63	IV	IV
24. SULUT	36 835	18 371	7,12	15,11	0,70	23	22
25. SULTENG	36 856	17 437	7,79	15,12	0,70	24	24
26. SULSEL	117 830	51 197	8,18	48,32	2,24	10	9
27. SULTRA	33 269	12 226	8,19	13,64	0,63	25	26
28. GORONTALO	8 057	2 917	7,63	3,30	0,15	31	33
29. SULBAR	10 987	4 744	11,91	4,51	0,21	30	30
MALUKU DAN PAPUA	125 451	38 592	0,65	100,00	2,38	VI	VI
30. MALUKU	8 085	4 251	6,47	6,44	0,15	32	31
31. MALUKU UTARA	5 387	3 035	7,96	4,29	0,10	33	32
32. PAPUA BARAT	22 527	8 686	26,82	17,96	0,43	28	28
33. PAPUA	89 451	22 620	-2,65	71,30	1,70	12	18
33 PROPINSI	5 267 080	2 221 577	6,08		100,00		